



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021–2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2021-2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih Tahun 2021-2026.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
- c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah.
- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
- h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Bab IX : Penutup.

Pasal 4

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah lima tahunan dan tahunan yang disusun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Agustus 2021



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Agustus 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(4, 41 / 2021)

8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021–2026

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan

sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021–2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4 Maksud dan Tujuan I-7

1.5 Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-15

2.3 Aspek Pelayanan Umum II-22

2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-26

2.5 Standar Pelayanan Minimal II-57

2.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah..... II-61

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-14

3.3 Kerangka Pendanaan III-29

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan IV-2

4.2 Isu Strategis Daerah..... IV-10

4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... IV-20

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1

5.2 Misi V-2

5.3 Tujuan dan Sasaran V-3

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Pedoman Transisi IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-1

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-11
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-12
Tabel 2.4	Angka Kelahiran Kasar Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-12
Tabel 2.5	Angka Kematian Kasar Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-13
Tabel 2.6	Angka Migrasi Keluar Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung	II-13
Tabel 2.7	Angka Migrasi Masuk Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-13
Tabel 2.8	Persebaran Penduduk Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-14
Tabel 2.9	Persebaran Penduduk Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Badung.....	II-14
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Badung.....	II-15
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Badung.....	II-16
Tabel 2.12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Badung.....	II-18
Tabel 2.13	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 Kabupaten Badung	II-19
Tabel 2.14	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019 Kota Denpasar.....	II-20
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-20
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf Tahun 2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-21
Tabel 2.17	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung ..	II-21
Tabel 2.18	Perkembangan Olahraga Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung ..	II-22
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-22
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-23
Tabel 2.21	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-23
Tabel 2.22	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-23
Tabel 2.23	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-24

Tabel 2.24	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-25
Tabel 2.25	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung.....	II-25
Tabel 2.26	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung.....	II-25
Tabel 2.27	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung.....	II-26
Tabel 2.28	Angka Konsumsi RT Perkapita Tahun 2015 s.d. 2018 Provinsi Bali	II-27
Tabel 2.29	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2018 Provinsi Bali.....	II-27
Tabel 2.30	Angka Kriminalitas Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-28
Tabel 2.31	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Badung	II-29
Tabel 2.32	Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019 Kabupaten Badung	II-29
Tabel 2.33	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung ..	II-30
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020	II-59
Tabel 2.35	Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022 s.d. 2026 Kabupaten Badung	II-63
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020.....	III-3
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020.....	III-5
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020	III-7
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020.....	III-9
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020.....	III-19
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020.....	III-21
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020	III-23
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Badung	III-25
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020 Kabupaten Badung.....	III-27
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020	III-28
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2022-2026.....	III-33

Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2022-2026	III-35
Tabel 3.14	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022-2026.....	III-38
Tabel 4.1	Analisis Pencapaian Indikator TPB di Tiap Perangkat Daerah	IV-22
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Badung	V-6
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Badung.....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung	VI-6
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Badung.....	VI-14
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Badung	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 – 2026 Kabupaten Badung	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	VIII-4
Tabel 8.3	Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Badung Tahun 2022-2026.....	VIII-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional
Dan Perencanaan Daerah..... I-5

Gambar 4.1 Keselarasan Dan Keterkaitan Isu-Isu Strategis RPJMD Semesta
Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 Dengan RPJMN
Tahun 2020-2024 Dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018–2023 IV-19

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021–2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, maka Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri melantik pasangan terpilih I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Badung periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Pebruari 2021, untuk periode kedua yang sebelumnya telah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung periode Tahun 2016-2021.

Salah satu tugas Kepala Daerah segera setelah dilantik adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung bersama seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing, menyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang telah disampaikan pada masa Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2020 tersebut. Selain penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah, RPJMD juga mengakomodir hasil evaluasi kinerja daerah periode sebelumnya, isu-isu strategis daerah dan potensi-potensi unggulan Kabupaten Badung yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas perekonomian daerah.

RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bali serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung.

Dalam proses penyusunan RPJMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, digunakan 5 (lima) pendekatan yaitu : (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah dan (5) bawah-atas. Melalui kelima pendekatan tersebut maka secara substansi dokumen RPJMD dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : (1) Persiapan, (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, (3) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD, (4) Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD, (5) Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dengan Gubernur, (6) Penyusunan Rancangan RPJMD, (7) Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RPJMD, (8) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, (9) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD, (10) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD dengan DPRD, (11) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD oleh Gubernur, dan (12) Penetapan Peraturan Daerah RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan tingkat Kabupaten yang akan dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD dimaksud juga akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Straregis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan tingkat Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

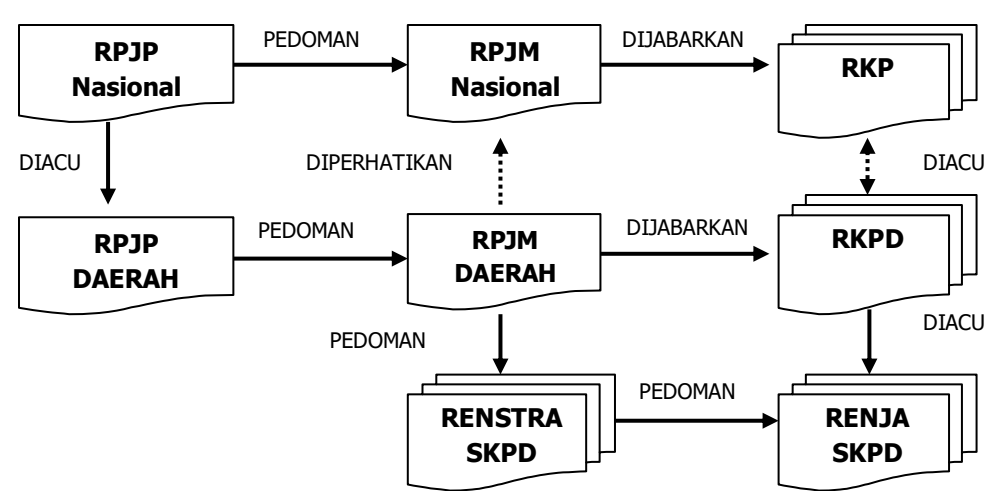
- u. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- y. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD. Hubungan antar dokumen perencanaan dimaksud disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah



Keterangan :

- a. Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- b. Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- d. RKA-PD (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Badung, serta memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota tetangga sebagaimana tercantum dalam RPJMD masing-masing. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Bali yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Bali, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Bali, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Bali.

Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Badung yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Badung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Badung.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung untuk memberikan arah kebijakan

pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan kedalam program-program pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program pembangunan daerah yang terukur dan berkinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;
- c. Menyediakan landasan formal bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud Dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Geografi Dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Standar Pelayanan Minimal
- 2.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah

- Bab III : Gambaran Keuangan Daerah
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3 Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis Daerah
 - 4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan Dan Sasaran
- Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Bab IX : Penutup
 - 9.1 Pedoman Transisi
 - 9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km² (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Prosentase Luas Wilayah (%)
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2.	Kuta	17,52	4,19
3.	Kuta Utara	33,86	8,09
4.	Mengwi	82,00	19,59
5.	Abiansemal	69,01	16,49
6.	Petang	115,00	27,48
BADUNG		418,52	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2019

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

2. Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara Astronomi Kabupaten Badung terletak antara 08o14'01" – 08o50'52" Lintang Selatan dan 115o05'03" - 115o26'51" Bujur Timur. Dengan Luas Wilayah 418,52 km² atau sekitar 7,43% dari daratan Pulau Bali. Kabupaten Badung terbagi atas 6 wilayah Kecamatan dan 62 Desa/Kelurahan. Kecamatan Petang memiliki luas wilayah terbesar yaitu; 115,00 km² , sedangkan Kecamatan Kuta

memiliki wilayah terkecil yaitu; 17,52 km², dan memiliki ketinggian dari permukaan laut sebesar 0-2.075 m.

b) Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 - 65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0 - 350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansemal 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah.

3. Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah, Kabupaten Badung berada pada ketinggian antara 0 – 2.075 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Wilayah Kecamatan Petang memiliki topografi paling tinggi antara 275-2.075 DPL, sedangkan terendah berada di wilayah Kecamatan Mengwi 0-350 meter DPL.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, wilayah Kabupaten Badung memiliki kemiringan lereng antara 0 - >40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah ± 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;
- b) Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebaian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemal dengan luas daerah ± 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;
- c) Kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan

Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah ± 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;

- d) Kemiringan lereng $> 40\%$, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah ± 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.
- e) Ketinggian di atas permukaan laut adalah 0 – 2.075 Meter.

4. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kecamatan Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gampingan dan napal.

5. Hidrologi

a) Daerah aliran sungai

Kabupaten Badung memiliki sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Pada Sub-SWS 03.01.02 mengalir sungai utama Tukad Yeh Penet dan sungai-sungai lainnya yang sebagian diantaranya termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

b) Sungai, danau dan rawa

– Tukad Ayung

Tukad Ayung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di Pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 Km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dimanfaatkan untuk sektor kehidupan baik yang berada di Wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.

– Tukad Mati

Tukad Mati adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Badung di bagian hulu dan hilir, sementara bagian tengahnya melintasi wilayah Kota Denpasar. Anak sungai Tukad

Mati paling sedikit yaitu terdiri dari Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Fungsi Tukad Mati saat ini selain untuk mengairi beberapa lahan sawah, terutama adalah sebagai drainase kota.

- Tukad Badung

Tukad Badung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langan, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan. Pada bagian hilir Tukad Badung terdapat Waduk Estuary Nusa Dua yang mempunyai kemampuan untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 lt/det untuk melayani kebutuhan di wilayah Badung Selatan.

- Tukad Yeh Penet

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu: Tukad Sungai, Tukad Dangkan, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

- Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad Cangu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, dan lain-lainnya.

- Sungai-sungai di Daerah Nusa Dua

Sungai-sungai di daerah Nusa Dua merupakan sungai musiman dengan pola aliran radial, memancar ke empat arah. Karakteristik pengaliran dengan panjang sungai rata-rata 5,44 Km dan luas daerah tangkapan rata-rata 3,37 Km². Jumlah pengaliran ke arah selatan lebih banyak, lebih panjang dan lebih cepat, sementara jumlah DPS-nya berimbang dengan arah yang ke utara. Sungai-sungai tersebut antara lain Tukad Batumejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma, dan lain-lain. Khusus untuk Danau dan daerah rawa-rawa, Kabupaten Badung tidak memiliki.

4. Klimatologi

a) Curah Hujan

Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Maret), hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air.

Curah hujan di bawah normal terjadi pada bulan Pebruari, Maret, April, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember, dan Desember. Curah hujan rata-rata per tahun antara 893,4 - 2.702,6 mm.

b) Suhu

Suhu minimum terjadi pada bulan Agustus mencapai 23,4°C dan maksimum pada bulan Oktober mencapai 31,5 °C, sedangkan suhu rata-rata 26,1 °C – 27,9°C. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober mencapai 77% sedangkan tertinggi pada bulan Januari mencapai 84%. Ditinjau dari penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember mencapai 53% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 95%.

c) Kelembaban

Kelembaban udara di Kabupaten Badung berkisar antara 77% - 83%. Kelembaban tertinggi sebesar 83% terjadi pada bulan Januari sedangkan terendah terjadi pada bulan Juli dan September sebesar 77%.

5. Penggunaan Lahan

a) Kawasan lindung

Kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 2.882,57 Ha atau 6,89% dari luas wilayah Kabuapten Badung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
4. Kawasan rawan bencana alam;
5. Kawasan lindung geologi;
6. Kawasan lindung lainnya

A. Kawasan Lindung geologi

1) Kawasan Lindung geologi terdiri atas:

- a. Kawasan cagar alam geologi
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

2) Kawasan cagar alam geologi tersebar di Kawasan Semenanjung Bukit, Kecamatan Kuta Selatan.

3) Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :

- a. Kawasan rawan gempa bumi;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah;
- c. Kawasan rawan tsunami;
- d. Kawasan rawan abrasi pantai; dan
- e. Kawasan rawan intrusi air laut.

- 4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 - a. Kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Kawasan Sekitar Mata Air.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam tiga sistem wilayah pelayanan perkotaan, yaitu :

1. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara
 - a) Cakupan wilayah seluruh Kecamatan Petang.
 - b) Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Petang.
 - c) Fungsi utama Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara adalah konservasi dan pertanian terintegrasi.
2. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah :
 - a) Cakupan wilayah meliputi :
 - Kecamatan Abiansemal;
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Pendarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Abianbase, Desa Buduk dan Desa Tumbak Bayuh); dan
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kaja).
 - b) Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Blahkiuh, dan Kawasan Perkotaan Dalung.
 - Fungsi utama : pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional.
 - c) Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi);

- Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Canggu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod);
- Kecamatan Kuta; dan
- Kecamatan Kuta Selatan.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kuta.
- Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Kerobokan.
- Fungsi utama: kepariwisataan serta perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional.

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

a) Pusat-pusat perkotaan dan Perdesaan serta Wilayah pelayanan Kabupaten Badung, meliputi :

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
- Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsari.

b) Fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Badung meliputi :

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
- Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan

skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.

- Kawasan Perkotaan Mangupura terletak dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah serta pusat kegiatan olah raga.
 - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.
 - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan perkotaan Carangsari dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pertanian terintegrasi, pusat agrowisata dan pusat ekowisata.
- c) Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan Carangsari, meliputi :
- Pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa.
 - Pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang.
 - Pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata

C. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas :
 - a. Kawasan potensi rawan bencana angin kencang;
 - b. Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor;
 - c. Kawasan potensi rawan bencana kekeringan;
 - d. Kawasan potensi rawan gelombang pasang;
 - e. Kawasan potensi rawan bencana banjir;
 - f. Kawasan potensi rawan bencana gempa;
 - g. Kawasan potensi rawan bencana tsunami;
 - h. Kawasan potensi rawan bencana abrasi;
2. Kawasan potensi rawan bencana angin kencang dengan luas kurang lebih 7.098 ha (tujuh ribu sembilan puluh delapan hektar), meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.271 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 297 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.203 ha (seribu dua ratus tiga hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 771 ha (tujuh ratus tujuh puluh satu hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.826 ha (empat ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 508 ha (lima ratus delapan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.078 ha (seribu tujuh puluh delapan hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 979 ha (sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.310 ha (seribu tiga ratus sepuluh hektar).
3. Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 26 ha (dua puluh enam hektar) dan Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar).
 - c. Kawasan potensi rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial kurang lebih 11,2 ha (sebelas koma dua hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 11 ha (sebelas hektar).
 4. Kawasan potensi rawan gelombang pasang tersebar pada sepanjang Kawasan pesisir pantai di Wilayah Kabupaten.
 5. Rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar), meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana banjir potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana banjir potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar).
6. Kawasan potensi rawan bencana gempa
- Kawasan rawan gempa bumi dengan luas potensial kurang lebih 7.250,3 ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh koma tiga hektar), meliputi :
- a. Kawasan rawan gempa bumi potensi rendah dengan luas keseluruhan kurang lebih 6.294,5 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.392,9 ha (seribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.668,2 ha (seribu enam ratus enam puluh delapan koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 978,6 ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 950,7 ha (sembilan ratus lima puluh koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.304,2 ha (seribu tiga ratus empat koma dua hektar); dan
 - b. Kawasan rawan gempa bumi potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 955,8 ha (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 456,7 ha (empat ratus lima puluh enam koma tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 318,2 ha (tiga ratus delapan belas koma dua hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 181 ha (seratus delapan puluh satu hektar).
7. Kawasan potensi rawan bencana tsunami
- a. Kawasan rawan tsunami potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 394,5 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 8,5 ha (delapan koma lima hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 39,2 ha (tiga puluh sembilan koma dua hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 104,7 ha (seratus empat koma tujuh hektar) dan

- Kecamatan Kuta Selatan seluas keseluruhan kurang lebih 242,3 ha (dua ratus empat puluh dua koma tiga hektar); dan
- b. Kawasan rawan tsunami potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.167 ha (seribu seratus enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2,2 ha (dua koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 827,1 ha (delapan ratus dua puluh tujuh koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 313,7 ha (tiga ratus tiga belas koma tujuh hektar).
8. Kawasan potensi rawan bencana abrasi
- a. Kawasan rawan abrasi pantai sebarannya berada pada Kawasan pesisir pantai selatan sepanjang kurang lebih 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) meliputi Pantai Mengening, Pantai Seseh, Pantai Munggu, Pantai Pererenan, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Berawa, Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.
- b. Kawasan rawan intrusi air laut sebarannya berada pada Kawasan pesisir Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.

Selanjutnya, analisis aspek demografi untuk Kabupaten Badung adalah deskripsi mengenai :

1. Jumlah Umur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2
 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2015 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

KELOMPOK UMUR	2015			2016			2017			2018			2019		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA
Usia Muda/Non Produktif (0 – 14 Thn)	57.656	53.075	110.731	53.473	49.563	103.036	52.180	48.488	100.668	51.403	46.946	98.349	52.999	49.071	102.070
Usia Produktif (15 - 64 Thn)	158.120	157.940	316.060	164.639	165.622	330.261	167.544	169.179	336.723	169.979	171.708	341.687	173.613	176.095	349.708
Usia Tua/Non Produktif (≥65 Thn)	16.526	18.719	35.245	15.968	17.680	33.648	15.838	17.969	33.807	17.030	19.609	36.639	18.079	20.707	38.786
TOTAL KABUPATEN	232.302	229.734	462.036	234.080	232.865	466.945	235.562	235.636	471.198	238.412	238.263	476.675	244.691	245.873	490.564

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2018		Penduduk Tahun 2019		Angka Pertumbuhan Penduduk (%)
		(Jiwa)	%	(Jiwa)	%	
1	Petang	30.812	6,46	31.196	6,36	1,24
2	Abiansemal	92.391	19,38	94.200	19,2	1,94
3	Mengwi	121.651	25,52	124.365	25,35	2,21
4	Kuta Utara	78.744	16,52	81.250	16,56	3,13
5	Kuta	52.352	10,98	53.626	10,93	2,4
6	Kuta Selatan	100.725	21,13	105.927	21,59	5,03
Kab. Badung		476.675	100	490.564	100	2,87
Tahun 2018						1,15
Tahun 2017						0,91
Tahun 2016						1,05
Tahun 2015						0,21

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk

Tabel 2.4
Angka Kelahiran Kasar Tahun 2016 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk		CBR
			Awal Tahun	Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Petang	393	30.812	31.196	12,68
2	Abiansemal	1.324	92.391	94.200	14,19
3	Mengwi	2.272	121.651	124.365	18,47
4	Kuta Utara	1.870	78.744	81.250	23,38
5	Kuta	2.620	52.352	53.626	49,44
6	Kuta Selatan	2.104	100.725	105.927	20,36
Total		10.677	476.675	490.564	22,08
Tahun 2018		10.523	471.198	476.675	22,2
Tahun 2017		8.722	466.210	471.198	18,61
Tahun 2016		7.977	462.036	466.210	17,19

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.5
 Angka Kematian Kasar Tahun 2016 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Penduduk		CDR
			Awal Tahun	Akhir Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Petang	326	30.812	31.196	10,51
2	Abiansemal	789	92.391	94.200	8,46
3	Mengwi	1.024	121.651	124.365	8,32
4	Kuta Utara	524	78.744	81.250	6,55
5	Kuta	523	52.352	53.626	9,87
6	Kuta Selatan	725	100.725	105.927	7,02
Total		3.911	476.675	490.564	8,09
Tahun 2018		3.468	471.198	476.675	7,32
Tahun 2017		3.457	466.210	471.198	7,38
Tahun 2016		1.393	462.036	466.210	3,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.6
 Angka Migrasi Keluar Tahun 2016 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Σ Migrasi Keluar			Σ Penduduk Pertengahan Tahun	Mo
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1	Petang	34	140	174	31.004	5,61
2	Abiansemal	100	389	489	93.296	5,24
3	Mengwi	178	616	794	123.008	6,45
4	Kuta Utara	379	570	949	79.997	11,86
5	Kuta	499	592	1.091	52.989	20,59
6	Kuta Selatan	415	687	1.102	103.326	10,67
Jumlah		1.605	2.994	4.599	483.620	9,51
Tahun 2018		1.610	3.021	4.631	473.937	9,77
Tahun 2017		1.289	2.514	3.803	468.704	8,11

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.7
 Angka Migrasi Masuk Tahun 2016 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Σ Migrasi Masuk			Σ Penduduk Pertengahan Tahun	Mi
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1	Petang	87	196	283	31.004	9,13
2	Abiansemal	402	738	1.140	93.296	12,22
3	Mengwi	807	1.261	2.068	123.008	16,81
4	Kuta Utara	943	1.291	2.234	79.997	27,93
5	Kuta	569	706	1.275	52.989	24,06
6	Kuta Selatan	1.695	2.126	3.821	103.326	36,98
Jumlah		4.503	6.318	10.821	483.620	22,38
Tahun 2018		5.323	7.034	12.357	473.937	26,07
Tahun 2017		3.856	5.411	9.267	468.704	19,77

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Distribusi/Persebaran Penduduk

Tabel 2.8
Persebaran Penduduk Tahun 2016 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)
1	2	3	4	5
1	Petang	31.196	115	271
2	Abiansemal	94.200	69,01	1.365
3	Mengwi	124.365	82	1.517
4	Kuta Utara	81.250	33,86	2.400
5	Kuta	53.626	17,52	3.061
6	Kuta Selatan	105.927	101,13	1.047
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk		490.564	418,52	1.172
Tahun 2018		476.675	418,52	1.138
Tahun 2017		471.198	418,52	1.125
Tahun 2016		466.945	418,52	1.115
Tahun 2015		462.036	418,52	1.103
Tahun 2014		461.062	418,52	1.101

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5. Komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria

Tabel 2.9
Persebaran Penduduk Tahun 2016 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No.	KECAMATAN	Σ Agama dan Kepercayaan							JUMLAH
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Petang	540	78	22	30.534	21	0	1	31.196
2	Abiansemal	1.029	337	105	92.657	71	0	1	94.200
3	Mengwi	3.172	3.039	1.600	116.335	214	5	0	124.365
4	Kuta Utara	11.066	5.660	4.004	59.805	714	0	1	81.250
5	Kuta	17.827	2.208	1.316	31.325	944	6	0	53.636
6	Kuta Selatan	17.472	5.735	3.573	77.636	1.485	14	12	105.927
Total		51.106	17.057	10.620	408.292	3.449	25	15	490.564
Tahun 2018		49.927	16.227	10.283	396.955	3.236	27	20	476.675
Tahun 2017		50.452	15.745	9.958	391.982	3.012	27	22	471.198
Tahun 2016		49.316	14.956	9.565	390.331	2.736	18	23	466.945
Tahun 2015		50.126	14.320	9.200	385.602	2.763	15	10	462.036

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Badung

(Dalam Miliar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.243,22	7,20	2.314,08	7,00	2.350,92	6,66	2.432,98	6,52	2.432,41	7,81
2	Pertambangan dan Penggalian	105,23	0,34	113,20	0,34	110,11	0,31	114,72	0,31	112,31	0,36
3	Industri Pengolahan	1.448,48	4,65	1.448,59	4,38	1.524,12	4,32	1.616,24	4,33	1.517,40	4,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	66,48	0,21	67,68	0,20	69,69	0,20	73,03	0,20	46,89	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	93,19	0,30	95,70	0,29	99,32	0,28	104,72	0,28	102,99	0,33
6	Konstruksi	3.009,19	9,66	3.288,83	9,95	3.634,55	10,30	3.868,02	10,36	3.865,50	12,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.354,25	7,56	2.511,43	7,60	2.706,54	7,67	2.924,81	7,84	2.723,56	8,74
8	Transportasi dan Pergudangan	5.590,88	17,94	5.867,55	17,75	6.257,04	17,74	6.479,93	17,36	3.482,39	11,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.142,31	26,13	8.842,93	26,75	9.464,54	26,83	9.951,51	26,66	6.894,68	22,13
10	Informasi dan Komunikasi	2.481,24	7,96	2.667,21	8,07	2.871,84	8,14	3.119,68	8,36	3.460,14	11,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	952,64	3,06	972,11	2,94	998,18	2,83	1.090,78	2,92	1.030,98	3,31
12	Real Estat	1.264,18	4,06	1.342,30	4,06	1.443,44	4,09	1.544,63	4,14	1.554,55	4,99
13	Jasa Perusahaan	248,11	0,80	261,47	0,79	279,41	0,79	296,95	0,80	280,67	0,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.296,41	4,16	1.278,83	3,87	1.338,51	3,79	1.422,58	3,81	1.394,58	4,48
15	Jasa Pendidikan	1.132,38	3,63	1.185,85	3,59	1.267,35	3,59	1.348,60	3,61	1.328,68	4,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	468,67	1,50	506,70	1,53	543,52	1,54	589,44	1,58	608,15	1,95
17	Jasa lainnya	260,51	0,84	287,59	0,87	316,33	0,90	346,72	0,93	324,07	1,04
PDRB		31.157,37	100,00	33.052,05	100,00	35.275,42	100,00	37.325,33	100,00	31.159,95	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.11
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020
 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 Kabupaten Badung

(Dalam Miliyar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.101,24	6,57	3.289,45	6,28	3.440,19	5,95	3.655,80	5,83	3.668,31	7,45
2	Pertambangan dan Penggalian	138,50	0,29	153,15	0,29	160,43	0,28	168,72	0,27	166,71	0,34
3	Industri Pengolahan	1.883,65	3,99	1.935,99	3,70	2.102,11	3,64	2.278,38	3,63	2.178,25	4,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	90,74	0,19	105,05	0,20	113,05	0,20	120,70	0,19	77,76	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109,58	0,23	118,40	0,23	123,24	0,21	131,21	0,21	131,87	0,27
6	Konstruksi	3.890,03	8,24	4.367,44	8,34	5.020,41	8,69	5.517,28	8,80	5.504,21	11,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.978,27	6,31	3.303,20	6,31	3.646,38	6,31	4.003,29	6,38	3.828,09	7,78
8	Transportasi dan Pergudangan	12.005,99	25,43	13.506,25	25,80	15.149,34	26,21	16.327,01	26,03	8.464,25	17,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.454,62	28,50	15.111,90	28,87	16.564,22	28,66	17.929,06	28,58	12.113,93	24,61
10	Informasi dan Komunikasi	2.639,83	5,59	2.902,35	5,54	3.201,00	5,54	3.517,86	5,61	3.928,08	7,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1232,71	2,61	1.307,71	2,50	1386,77	2,40	1.543,42	2,46	1.501,16	3,05
12	Real Estat	1.492,87	3,16	1.635,47	3,12	1.800,53	3,12	1.973,19	3,15	2.002,48	4,07
13	Jasa Perusahaan	326,48	0,69	353,56	0,68	386,10	0,67	417,67	0,67	410,12	0,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.481,87	3,14	1.639,20	3,13	1.808,76	3,13	1.962,48	3,13	1.992,48	4,05
15	Jasa Pendidikan	1.443,50	3,06	1.562,22	2,98	1.723,29	2,98	1.880,33	3,00	1.919,16	3,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	599,83	1,27	663,41	1,27	727,76	1,26	805,01	1,28	859,31	1,75
17	Jasa lainnya	338,45	0,72	388,92	0,74	437,69	0,76	491,95	0,78	469,08	0,95
PDRB		47.208,16	100,00	52.343,67	100,00	57.791,25	100,00	62.723,36	100,00	49.215,26	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Potret kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode Tahun 2015-2020 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan memiliki pola yang hampir sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2020 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar Rp.31,16 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.37,32 triliun. Total nilai tambah yang terbentuk

(PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2020 sebesar Rp.49,21 trilyun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.57,79 trilyun.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum (PDRB atas dasar harga konstan) pada Tahun 2020 mencapai Rp.6,89 trilyun sedangkan penyediaan akomodasi dan makan minum (PDRB atas dasar harga berlaku) mencapai Rp.12,11 trilyun.

Selain lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar yakni lapangan usaha konstruksi (PDRB atas dasar harga konstan) yang mencapai Rp.3,86 trilyun pada Tahun 2020 sedangkan pada urutan kedua lapangan usaha untuk tahun 2020 pada PDRB atas dasar harga berlaku adalah transportasi dan pergudangan mencapai Rp.8,46 trilyun. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom ke Bali.

Di posisi ketiga terdapat lapangan usaha transportasi dan pergudangan (PDRB atas dasar harga konstan) yang menghasilkan nilai tambah terbesar mencapai Rp.3,48 trilyun pada Tahun 2020 lapangan usaha konstruksi (PDRB atas dasar harga berlaku) mencapai Rp.5,50 trilyun. Diposisi selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.12
 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020
 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
 Kabupaten Badung

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,20	6,57	7,00	6,28	6,66	5,95	6,52	5,83	7,81	7,45
2	Pertambangan dan Penggalian	0,34	0,29	0,34	0,29	0,31	0,28	0,31	0,27	0,36	0,34
3	Industri Pengolahan	4,65	3,99	4,38	3,70	4,32	3,64	4,33	3,63	4,87	4,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,15	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,23	0,29	0,23	0,28	0,21	0,28	0,21	0,33	0,27
6	Konstruksi	9,66	8,24	9,95	8,34	10,30	8,69	10,36	8,80	12,41	11,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,56	6,31	7,60	6,31	7,67	6,31	7,84	6,38	8,74	7,78
8	Transportasi dan Pergudangan	17,94	25,43	17,75	25,80	17,74	26,21	17,36	26,03	11,18	17,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26,13	28,50	26,75	28,87	26,83	28,66	26,66	28,58	22,13	24,61
10	Informasi dan Komunikasi	7,96	5,59	8,07	5,54	8,14	5,54	8,36	5,61	11,10	7,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	2,61	2,94	2,50	2,83	2,40	2,92	2,46	3,31	3,05
12	Real Estat	4,06	3,16	4,06	3,12	4,09	3,12	4,14	3,15	4,99	4,07
13	Jasa Perusahaan	0,80	0,69	0,79	0,68	0,79	0,67	0,80	0,67	0,90	0,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	3,14	3,87	3,13	3,79	3,13	3,81	3,13	4,48	4,05
15	Jasa Pendidikan	3,63	3,06	3,59	2,98	3,59	2,98	3,61	3,00	4,26	3,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,50	1,27	1,53	1,27	1,54	1,26	1,58	1,28	1,95	1,75
17	Jasa lainnya	0,84	0,72	0,87	0,74	0,90	0,76	0,93	0,78	1,04	0,95
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selama periode Tahun 2015 – 2020, struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum serta lanpangan usaha transportasi dan pergudangan. Sarana kepariwisataan di Kabupaten Badung yang cukup banyak memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Badung. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, mampu memberikan sumbangan besar pada lapangan usaha transportasi disamping transportasi darat.

Selanjutnya lapangan usaha konstruksi menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 12,41 persen (PDRB ADHK) dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 17,20 (PDRB ADHB) pada Tahun 2020, diikuti oleh lapangan transportasi dan pergudangan (PDRB ADHK) sebesar 11,18 persen dan lapangan usaha konstruksi yang menyumbang sebesar 11,18 persen (PDRB ADHB). Pembangunan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung yang bersumber dari belanja pemerintah daerah turut menjadi stimulan dalam perkembangan lapangan usaha konstruksi. Peranan atau distribusi masing-masing lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.13
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020
 Kabupaten Badung

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB	ADHK
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,45	7,81
2	Pertambangan dan Penggalian	0,34	0,36
3	Industri Pengolahan	4,43	4,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,33
6	Konstruksi	11,18	12,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,78	8,74
8	Transportasi dan Pergudangan	17,20	11,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,61	22,13
10	Informasi dan Komunikasi	7,98	11,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,05	3,31
12	Real Estate	4,07	4,99
13	Jasa Perusahaan	0,83	0,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	4,48
15	Jasa Pendidikan	3,90	4,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,75	1,95
17	Jasa Lainnya	0,95	1,04
	PDRB	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

B. Laju Inflasi

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indek Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar. Dalam kurun waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2019, tingkat inflasi Kota Denpasar sebagai acuan tingkat inflasi

Kabupaten Badung berada dibawah tingkat inflasi Nasional. Namun pada Tahun 2018 tingkat inflasi Kabupaten Badung berada di atas inflasi Nasional yang mencapai 3,4 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam empat tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2018 dimana mencapai 3,4 persen. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2019 yang mencapai 2,37 persen.

Tabel 2.14
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2015 s.d. 2019
 Kota Denpasar

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Inflasi
Inflasi	2,33	2,94	3,31	3,40	2,37	2,87

Sumber Data : Bagian Ekonomi, Setda Kabupaten Badung

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka Melek Huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam table, sebagai berikut :

Tabel 2.15
 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2015 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf	95,13	97,05	97,10	96,81	99,81

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Angka melek huruf pada tahun 2015 yaitu 95,13 meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 97,05 dan 97,10 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 96,81. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 99,81.

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Tahun 2019
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kecamatan Petang	25.133	22.957	91,34
2	Kecamatan Abiansemal	74.476	66.372	89,12
3	Kecamatan Mengwi	99.333	90.937	91,55
4	Kecamatan Kuta Utara	65.109	59.541	91,45
5	Kecamatan Kuta	38.334	42.052	91,16
6	Kecamatan Kuta Selatan	82.391	72.026	87,42
	Jumlah	350.167	388.494	90,13

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

B. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah siswa Kabupaten Badung pada Tahun 2015-2019 untuk jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA/SMK selama 3 tahun. Dengan demikian mulai jenjang SD sampai SMA/SMK angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. Secara rinci rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9,44	9,90	9,99	10,06	10,38

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga mempunyai kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan daya saing masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Badung dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat dari keberadaan sekaa-sekaa kesenian/ grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan sarana olahraga. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan seni budaya dan olahraga mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya tersebut.

Perkembangan olahraga yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel 2.18 berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Olahraga
Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	89	126	178	253	268
2	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	6	6	6	6	6

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	56.758	53.631	46.024	53.579	54.007
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.890	53.636	54.020	43.877	45.827
1.3.	APS SD/MI	103,32	99,99	85,20	122,11	117,85
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	29.090	23.873	25.821	21.946	21.946
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.776	24.168	20.935	23.802	22.935
2.3.	APS SMP/MTs	122,35	98,78	123,34	92,20	95,69

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

Demikian pula halnya dengan capaian angka partisipasi sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unsur pembentuk capaian tingkat kabupaten, telah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan. Adapun angka partisipasi sekolah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.20
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2019
 Menurut Kecamatan
 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan Petang	2.343	2.669	87,79	1.333	1.365	97,66
2	Kecamatan Abiansemal	9.125	8.775	103,99	4.109	4.428	92,80
3	Kecamatan Mengwi	12.723	10.949	116,20	6.203	5.437	114,09
4	Kecamatan Kuta Utara	13.705	7.402	185,15	5.967	3.930	151,83
5	Kecamatan Kuta	8.043	5.166	155,69	4.038	2.387	169,17
6	Kecamatan Kuta Selatan	14.195	10.866	130,64	6.182	5.388	114,74
	Jumlah	60.134	45.827	131,22	27.832	22.935	121,35

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.21
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
 Tahun 2015 s.d. 2019
 Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	275	278	283	284	285
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	53.890	53.636	45.527	43.877	45.827
1.3.	Rasio	5,102	5,183	6,216	6,473	6,219
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	52	55	59	65	67
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	23.776	24.168	25.231	23.802	22.935
2.3.	Rasio	2,187	2,276	2,338	2,731	2,921

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

Tabel 2.22
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019
 Menurut Kecamatan
 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	27	2.669	10,1161	4	1.365	2,9304
2	Kecamatan Abiansemal	65	8.775	7,4074	7	4.428	1,5808
3	Kecamatan Mengwi	73	10.949	6,6673	15	5.437	2,7589
4	Kecamatan Kuta Utara	42	7.402	5,6741	19	3.930	4,8346
5	Kecamatan Kuta	25	5.166	4,8393	7	2.387	2,9326
6	Kecamatan Kuta Selatan	53	10.866	4,8776	15	5.388	2,7840
	Jumlah	285	45.827	6,2190	67	22.935	2,9213

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

Rasio ketersediaan sekolah sebagaimana dalam Tabel 2.21 dan Tabel 2.22 diatas mencerminkan ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar per 10.000 orang penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan

kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia tertentu.

Di kabupaten Badung rasio ketersediaan sekolah pada masing-masing kecamatan sangat berfluktuasi, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada wilayah kecamatan tertentu dengan kisaran untuk tingkat sekolah dasar yaitu terendah kecamatan Kuta dan tertinggi Kecamatan Petang serta untuk jenjang SMP, terendah Kecamatan Abiansemai dan tertinggi Kecamatan Kuta Utara.

3. Rasio guru/murid

Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.718	3.673	3.795	3.627	3.703
1.2.	Jumlah Murid	61.136	60.989	59.208	59.126	58.800
1.3.	Rasio	60,82	60,22	64,10	61,34	62,97
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.824	1.991	1.989	1.794	1.805
2.2.	Jumlah Murid	29.212	29.824	29.851	29.169	28.414
2.3.	Rasio	62,44	66,76	66,63	61,50	63,53

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Rasio ini memberikan informasi ketersediaan tenaga pengajar dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan antar waktu rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Badung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup statis. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya fluktuasi jumlah guru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa, namun belum signifikan.

Demikian juga halnya dengan perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2015 sebesar 62,44 terdiri dari jumlah guru sebesar 1.824 dan jumlah murid sebesar 29.212 sedangkan pada Tahun 2019 rasio meningkat menjadi 63,53 terdiri dari jumlah guru sebesar 1.805 dan jumlah murid sebesar 28.414. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah murid pada jenjang sekolah menengah pertama bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah guru. Situasi seperti ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang program kegiatan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru agar mampu mencapai mutu pengajaran yang optimal.

Selanjutnya, apabila dilihat data per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Tabel 2.24, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap

murid pada tahun 2019 pada jenjang sekolah dasar paling tinggi berada pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta Selatan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru terhadap murid tertinggi pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2019
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	237	2.350	0,101	97	1.454	0,067
2	Kecamatan Abiansemal	696	9.177	0,076	281	4.505	0,062
3	Kecamatan Mengwi	788	12.198	0,065	435	6.753	0,064
4	Kecamatan Kuta Utara	764	13.531	0,056	349	5.510	0,063
5	Kecamatan Kuta	447	7.953	0,056	238	4.014	0,059
6	Kecamatan Kuta Selatan	748	13.950	0,054	383	6.527	0,059
	Jumlah	3.680	59.159	0,407	1.783	28.763	0,374

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.25
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2015	Jumlah Investor	1.701	328	2.029
2016	Jumlah Investor	1.606	335	1.941
2017	Jumlah Investor	501	290	791
2018	Jumlah Investor	286	90	376
2019	Jumlah Investor	318	513	831

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Badung tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari data Tabel 2.25, terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan jumlah investor selalu mengalami

peningkatan, namun jumlah investor (PMDN) atau investor (PMA) berfluktuasi.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.26
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 s.d. 2019
Kabupaten Badung

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2016	1.782	\$ 799.994.951,82	1.941	\$ 527.102.408,72
2017	602	\$ 2.245.973.834,35	653	\$ 196.735.050,04
2018	376	\$ 410.549.649,37	255	\$ 327.963.749,59
2019	5.560	\$ 6.474.895.145,51	831	\$ 630.291.101,78

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Dari data tabel 2.26 di atas terlihat bahwa jumlah nilai investasi dari tahun 2016 sampai 2019 berfluktuasi. Jumlah investasi terbesar terjadi pada tahun 2019.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	36.386	780	7.722	8.251	11.394
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	5739	129	653	255	831
3	Rasio daya serap tenaga kerja	6,34	6,04	11,82	32,35	13,71

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (PMA/PMDN). Dari data Tabel 2.27 di atas terlihat ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2015–2019 berfluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 32,35.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan untuk hasil analisis konsumsi RT perkapita, sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Bali dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Bali

Uraian	2015	2016	2017	2018
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	1.045.144,90	1.099.561,31	1.099.561,31	-

Sumber : BPS Provinsi Bali

b. Nilai Tukar Petani

Kabupaten Badung tidak melakukan perhitungan untuk hasil nilai tukar petani (NTP), sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah nilai tukar petani (NTP) Provinsi Bali, dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2015 s.d. 2018
Provinsi Bali

Bulan	2015	2016	2017	2018
Januari	104,18	104,96	106,25	103,48
Pebruari	103,9	105,42	105,79	103,88
Maret	103,41	104,86	104,72	103,5
April	103,05	104,81	108,98	103,18
Mei	103,05	105,94	104,57	103,23
Juni	103,93	106,58	104,49	103,54
Juli	104,6	106,67	104,14	103,54
Agustus	104,25	106,66	103,94	103,54
September	104,54	107,44	104,45	103,28
Oktober	104,91	107,13	104,49	103,7
November	105,41	107,06	104,51	103,15
Desember	105,13	106,74	103,93	103,87

Sumber Data : BPS Provinsi Bali

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.30
Angka Kriminalitas Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus narkoba	28	86	103	108	100
2.	Jumlah kasus pembunuhan	2	3	1	3	-
3.	Jumlah kejahatan seksual	-	6	6	15	2
4.	Jumlah kasus penganiayaan	71	60	37	48	67
5.	Jumlah kasus pencurian	157	186	156	208	219
6.	Jumlah kasus penipuan	4	14	23	18	13
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	262	355	326	400	401

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Badung yang aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 terjadi 262 kasus, kemudian meningkat menjadi 355 kasus pada tahun 2016, namun menurun menjadi 326 kasus pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 400 kasus selanjutnya terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 401 kasus. Jenis kriminalitas yang mencolok adalah pencurian dan narkoba.

b. Jumlah Demonstrasi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak terdapat kasus demo baik dari bidang politik, ekonomi serta pemogokan kerja.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut

Tabel 2.31
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Badung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	14,46	14,54	15,74	16,54	17,17
2	Jumlah penduduk	616.40	630.00	643.50	656.9	3.775.279
3	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2,34	0,23	2,44	2,52	0,38

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

- b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)
- Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.32
Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Badung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	152.3	154	155.3	156.30	1.117.551
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	31.5	33	34.8	36.40	161.383
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	183.8	187	190.1	192.70	1.278.934
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	432.6	443	453.4	464.20	2.496.345
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	42,49	42,21	41,93	41,51	51,23

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditunjukkan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	6,81%	6,08%	6,74%	5,83%		8,2 - 8,65	Belum Tercapai
2	Laju inflasi (%)	2,94	3,31	3,40	2,37	0,55	4,12 - 4,55	Sesuai
3	PDRB per kapita (ADHB) (Juta)	74,93	81,34	87,99	93,70	-	87,30-92,45	Belum Tercapai
4	PDRB per kapita (ADHK) (Juta)	49,46	51,36	53,70	55,71	-	38,51-43,37	Belum Tercapai
5	Indeks Gini	0,32	0,32	0,34	-	-	0,33-0,37	Belum Tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,80	80,54	80,87	81,59	81,60	81,370	Melampaui
7	Angka melek huruf	97,05	97,10	96,81	99,81	97,71	-	-
8	Angka rata-rata lama sekolah	9,9	9,99	10,06	10,38	10,39	9,94	Melampaui
9	Angka usia harapan hidup	74,42	74,53	74,71	74,99	75,10	74,73 - 78,47	Melampaui
10	Presentase balita gizi buruk	3,3	0,02	3,74	0,9	0,8	<5%	Sesuai
11	Persentase Balita gizi kurang (%)	3,51	4,12	7,4	2,6	2,2	20,1	Melampaui
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50%	Melampaui
13	Angka partisipasi angkatan kerja	339.967	344.882	359.041	373.958	394.943	0	-
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,92	70,43	71,44	72,67	72,69	0	-
15	Tingkat pengangguran terbuka	0,34	0,32	0,44	0,38	6,92	0,32	Melampaui
16	Rasio penduduk yang bekerja	99,66	99,67	99,56	99,61	93,08	0	
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	72,67	70,2	71,12	72,39	67,66	-	-
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,39	94,50	95,95	95,94	95,95		
	Produksi Padi (Ton)	109.715	113.825	123.695	123.438	111.755	-	-
	Produksi kakao	346,81	149,35	78,15	94,05	95,93	-	-
	Produksi kelapa	2.196,28	520,93	1.577,61	2.081,01	2.122,63	-	-
	Produksi Kapas	200,00	125,00	40,12	35,00	-	-	-
	Produksi Kopi	715,40	77,62	676,85	675,56	689,55	-	-
	Produksi Vanilli	0,00	0,00	0,10	0,15	0,24	-	-
	Produksi Kapuk	200,00	56,31	40,12	35,00	40,00	-	-
	Produksi Jambu Mette	16,15	16,35	6,81	5,50	6,40	-	-
	Produksi cengkeh	53,21	30,32	32,46	42,52	41,60	-	-
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28,87	28,66	28,67	28,67	-	28,97%	Belum Tercapai
20	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,99%	3,70%	3,64%	3,63%	4,43%	-	-
21	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,81%	6,08%	6,74%	5,83%		6,15-7,15	Belum Tercapai
22	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	2,06%	2,06%	1,98%	1,78%	2,02%	2,00 – 3,00	Sesuai
23	Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	16.567	17.063	17.325	17.628	17.503	18512,87 - 19536,19	-
24	IPG	-	95	95	96	-	76,00	Belum Tercapai
25	IDG	-	61	62	75	-	56,49 - 59,35	Belum Tercapai
26	PDRB Konstan (Milyar)	31.157,37	33.052,05	35.278,50	37.335,77	-	38,51-43,37	Belum Tercapai
27	PDRB berlaku (Milyar)	47.208,17	52.343,65	57.799,28	62.794,58	-	-	
28	PDRB per kapita (ADHB) (Juta)	74,93	81,34	87,99	93,70	-	87,30-92,45	Belum Tercapai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai tukar petani	104,69	103,48	104,07	-	-	-	-
2	Angka kriminalitas	355	326	1244	1294	1096	-	-
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100	Sesuai
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,99	85,20	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B	98,78	100,00	92,20	95,69	100,00	100	Sesuai
1.5	Angka partisipasi sekolah							
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,99	85,20	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,78	100,00	92,20	95,69	100,00	100	Sesuai
1.6	Angka Kelulusan :							
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100	Sesuai
1.7	Angka Melanjutkan (AM) :							
1.7.1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Sesuai
1.8	Fasilitas Pendidikan :							
1.8.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	40,00	45,00	90,00	95,00	95,00	97,00	Belum Tercapai
1.8.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	60,00	60,00	95,00	95,00	95,00	278,00	-
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	4,280	4,833	5,157	5,119	5,066	52	-
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:20	1:16	1:19	1:16	1:15	-	-
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	1:20	1:17	1:18	1:15	1:15	1:32	Belum Tercapai
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:20	1:16	1:19	1:16	1:15	1:20	Belum Tercapai
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:20	1:17	1:18	1:15	1:15	1:32	Belum Tercapai
1.14	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
1.15	APK TK (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.16	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.17	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.18	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.19	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.20	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.	Kesehatan :							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	3.16 per 1000 KH	2.99per 1000 KH	2.9 per 1000 KH	3 per 1000 KH	2.29 per 1000 KH	-	-
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1-3.16/1000 KH	1-2.99/1000 KH	1-2.9/1000 KH	1-3/1000 KH	1-2.29/1000 KH	95	-
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4.04 per 1000 KH	3 per 1000 KH	0.3 per 1000 KH	3.3 per 1000 KH	2.77 per 1000 KH	-	-
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2.1 per 1000 KH	1.8 per 1000 KH	2.1 per 1000 KH	2.2 per 1000 KH	1.91 per 1000 KH	-	-
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	0 per 100.000 KH	46.01 per 100.000 KH	28.56 per 100.000 KH	28.16 per 100.000 KH	114.45 per 100.000 KH	2,99	-
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	23	23	25	25	25	99,45	Belum Tercapai
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	73,1	73,1	73,1	73,1	83,6	0,016	Melampaui
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	50.32 /100,000	64.18 /100,000	62.87 /100,000	100.87 /100,000	184,87 /100,000	1,13	Melampaui
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	62.65%	40.82%	97.30%	87.10%	70%	80%	Belum Tercapai
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95.73%	80.12%	96.20%	96.60%	94.70%	95	Belum Tercapai
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	83,47%	97,73%	73,40%	101,62%	99,55%	-	-
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91	96	90,1	91,7	93	-	-
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.19	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.20	Angka kejadian Malaria	0/mil	0,01/mil	0,01/mil	0,02/mil	0,08/mil	< 1/mil	Melampaui
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	-	-	-	-	-	-	Sesuai
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,5	<0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	-
2.23	Cakupan kunjungan bayi	94.89%	80.40%	105.20%	104%	116.76%	100	Melampaui
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93.69%	75.64%	95.40%	97.30%	92.10%	80%	Melampaui
2.25	Cakupan pelayanan nifas	91.57%	76.07%	95%	95.70%	93.80%	80%	Melampaui
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80.19%	36.40%	88.80%	76.30%	74.20%	96,67	Belum Tercapai
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	88.70%	87.96%	88%	87.96%	51.60%	10	Melampaui

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.28	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	100	100	100	99,9	100%	Belum Tercapai
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.31	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	91,57	76,07	95	95,7	93,8	80%	Melampaui
2.32	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	80,19	36,4	88,8	76,6	74,2	96,67	Belum Tercapai
2.33	Prevalensi Balita Stunting (%)	9.71	11.37	9.2	8.1	6.1	85	Belum Tercapai
2.34	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.35	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	67.0	69.48	68.6	70.65	74.6	100	Belum Tercapai
2.36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.37	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	100	100	100	100	99,9	100%	Sesuai
2.38	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.39	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0,109	0,109	0,109	0,109	0,100	0,109	Sesuai
2.40	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	95	105	200	221	261	96,50	-
2.41	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	145	300	308	389	245	1:40	Melampaui
2.42	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	285	618	604	717	560	1 : 100	Melampaui
2.43	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	44,61	46,53	48,07	49,61	47,69	90%	Belum Tercapai
2.44	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Sesuai
2.45	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	90,65	82,10	84,08	85,88	82,20	50%	Melampaui
2.46	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100,00	100,00	50%	Melampaui
2.47	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.48	AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun	2,5 per 100.000 pdk	2,6 per 100.000 pdk	2,5 per 100.000 pdk	2,5 per 100.000 pdk	0	-	
2.49	Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.50	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.51	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.52	Pelaksanaan tata laksana Diare Sesuai Standar (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.53	Penemuan dan penanganan HIV/AIDS (%)	< 0,5	<0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	<0.5	Sesuai
2.54	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	95,5	95,92	99,3	99,35	99,45	99,45	Sesuai
2.55	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	90,0	91,1	92,0	93,5	94,5	100	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai ($<$) sesuai (=) melampaui ($>$)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-	-	1	-	-	2	Belum Tercapai
3.2	Terlaksananya perjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	-	1	-	2	-	4	Belum Tercapai
3.3	Rasio Jaringan Irigasi	57.61	57.69	66.35	66.45	66.35	90	Belum Tercapai
3.4	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	11,158.00	11,158.00	11,158.00	11,158.00	11,158.00	100%	Melampaui
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	-	100%	99.78%	100%	98.60%	88,636	Melampaui
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	-	100%	99.78%	100%	98.60%	-	-
4.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	-	100%	100%	100%	98.43%	-	-
4.4	Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit)	-	625	142	565	-	-	-
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Msyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	29.87	29.26	40.18	39.61	39.61	-	-
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	55%	65%	70%	80%	90%	80%	Melampaui
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98.30%	99.00%	98.19%	99.44%	99.44%	100%	Sesuai
5.5	Persentase Penegakan PERDA	70%	75%	80%	85%	90%	90%	Sesuai
5.6	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	1	1078	58	58	58	80	Melampaui
5.7	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	1	298	1240	30	140	1	Melampaui
5.8	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	-	-	77,70%	84%	-	100%	Belum Tercapai
5.9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	30.51	29.87	29.26	40.18	39.61	31.18	Melampaui
5.10	Jumlah kasus Penegakan PERDA	1100	1000	900	800	700	700	Sesuai
5.11	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	50%	56%	65%	70%	80%	80%	Sesuai
5.12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
5.13	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	92.30%	98.30%	99.00%	98.19%	99.44%	92.20%	Melampaui
5.14	Status audit Keuangan BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Melampaui
5.15	Tersusunnya LPPD Bupati	70 buku	47 buku	47 buku	57 buku	57 buku	47 buku	Melampaui

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
5.16	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
5.17	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	92	92	92	92	92	92	Sesuai
5.18	Angka kriminalitas	355	326	1244	1294	1096	-	-
5.19	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	2	2	2	80	Belum Tercapai
5.20	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	3	7	4	4	1	Melampaui
5.21	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,57	2,32	2,24	2,75	4,71	-	-
5.22	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	30,51	29,87	29,26	40,18	39,61	31,18	Melampaui
5.23	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	378	Sesuai
5.24	Penegakan PERDA	70	75	80	85	90	90	Sesuai
5.25	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	Sesuai
5.26	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	50%	55%	65%	70%	80%	80%	Sesuai
5.27	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922	1922	1922	1922	1922	1922	Sesuai
5.28	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	79,73%	83,61%	-	79,90%	Belum Tercapai
6.	Sosial							
6.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	3 KUBE	8 KUBE	-	-	-	-	-
6.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	372	293	342	298	246	-	-
6.3	Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	-	-	13.104 orang	16.301 orang	-	-	-
6.4	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	430 orang	55 orang	259 orang	165 orang	51 orang	-	-
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	30,20%	30,40%	30,60%	30,80%	57,81%	Belum Tercapai
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	7,50%	7,50%	7,50%	20%	20%	-	-
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	41,73%	45,24%	50,16%	50,16%	-	-	-
1.4	Rasio KDRT	0,015%	0,02%	0,02%	0,018%	0,017%	0,04%	Belum Tercapai
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	64%	45,45%	51,06%	46%	54,05%	-	-
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	60%	56,81%	40,4%	57%	54,05%	-	-
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99.67%	99.13%	99.71%	99.74%	99.75%	-	-
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	82.70%	84.77%	84.30%	84.27%	84.48%	-	-
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80.21%	80.88%	79.22%	80.14%	80.15%	-	-
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	27.25%	30.65%	32.21%	-	-	-	-
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1.17	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	75%	75%	75%	90%	100%	-	-
1.18	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	38	38	38	38	60	53	Melampaui
1.19	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	38	38	38	38	60	53	Melampaui
1.20	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	1	7	7	7	7	7	Sesuai
1.21	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	63%	63%	63%	63%	63%	63%	Sesuai
1.22	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	30	30	55	55	55	55	Sesuai
1.24	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	1	1	1	6	6	1	Melampaui
1.25	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
1.26	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1.26	1.21	1.18	1.09	1.04	2,01	Melampaui
1.27	Rasio akseptor KB (%)	80.66%	79.63%	80.03%	80.58%	79.27%	74.00%	Melampaui
1.28	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0.22%	0.20%	0.17%	0.19%	0.13%	0.07%	Melampaui

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.29	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	80.66%	79.63%	80.03%	80.58%	79.27%	76.40%	Melampaui
1.30	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	2.35%	2.82%	2.84%	2.84%	3.47%	2,25	Melampaui
1.31	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	1:(2-3)	1:(2-3)	1:(2-3)	1:(1-2)	1:(1-2)	1	Sesuai
1.32	Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1	Sesuai
1.33	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
1.34	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
1.35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	91.00%	89.16%	89.23%	89.30%	91.83%	89.36%	Melampaui
1.36	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	94.83%	75.73%	75.77%	75.81%	82.84%	75.84%	Melampaui
1.37	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	6	8	14	17	31	19	Melampaui
1.38	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	78	24	56	68	8	76	Belum Tercapai
1.39	Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
1.40	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%	80%	-	-
2.	Pangan							
2.1	Ketersediaan pangan utama	64981.11	70306.49	70064.07	-	-	-	-
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	92,5/79,4	110,3/117,0	110,3/117,0	110,3/117,0	-	-	-
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	600 sample	600 sample	600 sample	600 sample	226 sample	-	-
2.4	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	39.32	45.25	66.71	66.71	66.71	49	Melampaui
2.5	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	97.39	94.50	95.95	95.94	95.95	96.5	Melampaui
2.6	Ketersediaan pangan utama	64,517.77	64,981.11	70,306.49	70,064.07		-	-
2.7	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2,092.00	2,197.00	2,184.00	2,174.00	2,174.00	2200	Belum Tercapai
2.8	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	65.70	65.00	70.53	62.75	62.750	77.5	Belum Tercapai
2.9	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1.21	1.1	1.09	0.16	0.9	2,2	Belum Tercapai
2.10	Rasio akseptor KB	80.66%	79.63%	80.03%	80.58%	79.27%	78,90	Melampaui
2.11	Cakupan peserta KB aktif	80.66%	79.63%	80.03%	80.58%	79.27%	89.35%	Belum Tercapai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
3.	Pertanahan							
3.1	Penyelesaian kasus tanah Negara	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	4 obyek	Melampaui
3.2	Penyelesaian izin lokasi	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	-	-
4.	Lingkungan Hidup							
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	13.50	13.80	14.34	14.80	14.90	-	-
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	27.17	28.00	28.50	29.80	29.80	-	-
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.00	24.10	24.20	26.60	24.60	-	-
4.4	Laporan Inventarisasi GRK		-	1 dokumen	-	-	-	-
4.5	Jumlah limbah B3 yang dikelola	62.453 kg	65.901 kg	75.545 kg	84.073 kg	80.451,25 kg	-	-
4.6	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	-	-	-	-	1	-	-
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	24 piagam Adiwiyata	22 piagam Adiwiyata	22 piagam Adiwiyata, 1 Trofi Adipura	3 Sertifikat Kalpataru	-	-	-
4.8	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	77,6	88,4	67,7	66,85	-	-	-
4.9	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	14.16	14.60	14.78	15.00	14.80	-	-
4.10	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	29.47	29.84	29.75	30.82	31.43	-	-
4.11	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	24.62	24.65	24.65	24.65	24.61	-	-
4.12	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	44 lokasi	300 lokasi/usaha	300 lokasi	105 lokasi	-	-
4.13	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	100 usaha	100 usaha	100 usaha	-	-	-
4.14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	-	30 kasus	50 kasus	55 kasus	6 kasus	-	-
4.15	Timbulan sampah yang ditangani	-	68.795,20 ton	75.624,40 ton	77.161 ton	57.143,52 ton	76.711,49 ton	Melampaui
4.16	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-	0,1772	0,1925	0,154	0,1118	0,24	Melampaui
4.17	Persentase cakupan area pelayanan	-	0,35	0,4	0,45	0,5	0,51	Sesuai
4.18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	84.68	84.68	92.75	89.99	66.85	93,3	Belum Tercapai
4.19	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
4.21	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.22	Pencemaran status mutu air (%)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	79.00	Belum Tercapai
4.23	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.24	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
4.25	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	8	8	50	50	18	100	Belum Tercapai
4.26	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	14,03Ha	Belum Tercapai
4.27	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100	100	100	100	100		-
4.28	Persentase penanganan sampah	77.00	77.60	88.40	67.70	66.85	-	-
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	86.42%	90.70%	93%	97.68%	98%	98%	Sesuai
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.36	0.94	0.97	0.99	0.99	0.95	Melampaui
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	0.34	0.55	0.34	0.57	0.65	0.89	Belum Tercapai
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	98.12%	100%	100%	98.77%	99.34%	-	-
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	86.42%	90.70%	93%	97.68%	98%	98%	Sesuai
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0.8642	0.907	0.93	0.9768	0.98	0.98	Sesuai
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0.8184	0.7965	0.9748	0.9271	0.96	0.98	Sesuai
5.8	Kepemilikan KTP (%)	86.42%	90.70%	93%	97.68%	98%	97%	Melampaui
5.9	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	86.42%	90.70%	93%	97.68%	98%	-	-
5.10	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	98.12%	100%	100%	98.77%	99.34%	-	-
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46	Sesuai
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	Sesuai
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	Sesuai
6.4	Persentase LPM Berprestasi	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	Sesuai
6.5	PKK aktif	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606	Sesuai
6.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	95.40%	99.10%	87.50%	91.40%	85.70%	-	-
6.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	64 kelompok	64 kelompok	65 kelompok	66 kelompok	67 kelompok	67 kelompok	Sesuai
6.8	Jumlah LSM	2	2	2	2	2	2	Sesuai
6.9	Posyandu aktif	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	573 kelompok	Sesuai
6.10	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
6.11	Tersusunnya RPJMDes	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
6.12	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	Sesuai
6.13	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	Sesuai
6.14	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang resonsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
6.15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
6.16	Meningkatnya LKM berprestasi	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
6.17	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
6.18	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
6.19	Terbentuknya BUMDES	12 Bumdesa	13 Bumdesa	10 Bumdesa	8 Bumdesa	6 Bumdesa	6 Bumdesa	Sesuai
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.08	2.08	2.08	2.08	2.25	-	-
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-	-
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	34.21%	34.21%	34.21%	34.21%	34.21%	-	-
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	-	-
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1	-	-
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	1	1	1	1	1	-	-
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	0	0	-	-
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.21	1.18	1.09	1.04	1.07	2,01	Belum Tercapai
7.9	Ratio Akseptor KB	78.64%	80.03%	80.58%	79.27%	79.74%	78,90	Melampaui
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0.22%	0.20%	0.17%	0.19%	0.13%	0,07	Melampaui

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2.35%	2.82%	2.84%	2.84%	3.47%	2,25	Melampaui
7.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2.35%	2.82%	2.84%	2.84%	3.47%	2,25	Melampaui
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70%	70%	70%	73%	76%	-	-
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91.00%	89.16%	89.23%	89.30%	91.83%	89,36	Melampaui
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	94.49%	72.54%	94.01%	98.14%	97.52%	-	-
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	93.16%	92.13%	78.91%	90.50%	84.13%	-	-
7.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	93.16%	92.13%	78.91%	90.50%	84.13%	-	-
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%	90%	90%	90%	90%	-	-
7.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%	90%	90%	90%	90%	-	-
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88.50%	87.63%	87.76%	82.28%	83.83%	75,84	Melampaui
7.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	88.50%	87.63%	87.76%	82.28%	83.83%	-	-
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	46.53%	48.07%	49.61%	47.69%	47.69%	-	-
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	40%	44%	49%	50%	51%	-	-
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	40%	44%	49%	50%	51%	-	-
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21	21	21	21	-	-
7.30	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	100%	46.40%	48.40%	49.50%	66.80%	-	-
8.	Perhubungan							
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	702,204	600,208	557,245	219,886	18,070	1,065,015	Belum Tercapai
8.2	Rasio ijin trayek	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	0.727%	0,375	Melampaui
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	12282	8603	10720	9403	4444	17,428	Belum Tercapai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	2	Belum Tercapai
8.5	Persentase layanan angkutan darat	-	-	-	-	-	-	-
8.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	57.00	43.463	52.029	52.891	25.91	-	-
8.7	Pemasangan Rambu rambu	1080	1378	1600	1600	1600	-	-
8.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.54	0.54	0.49	0.49	0.40	0.95	Belum Tercapai
8.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	702,204	600,208	557,245	219,886	18,070	1,065,015	Melampaui
8.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	702,204	600,208	557,245	219,886	18,070	104162.871	Belum Tercapai
8.11	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	88.80%	89.37%	90.21%	90.79%	90.92%	96,8%	Belum Tercapai
8.12	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	43 menit	43 menit	48 menit	Belum Tercapai
8.13	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	12,282	8,603	10,720	9,403	4,444	17428	Belum Tercapai
9. Komunikasi dan Informatika								
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	12 Kelompok	19 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok	-	-
10. Koperasi, Usaha kecil dan Menengah								
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	66.90%	79.60%	75.10%	67.90%	60.20%	75.72%	Belum Tercapai
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	94.80%	94.70%	93.31%	95.91%	97.10%	84,35	Melampaui
11. Penanaman Modal								
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1941	653	255	831	4425	2,649	Melampaui
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7,065,807,788,89100	2,637,233,345,856.00	4,577,390,053,048.00	8,477,415,319,088.00	10,905,119,222,129.00	3,899,203,310.35	Melampaui
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	6.04	11.82	32.35	11.71	6.87	6.00	Melampaui
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-73,020,989,073.45	-4,428,574,443,035.60	1940,156,707,192	3,900,025,265,960.00	2,427,703,903,12100	424.59	-
12. Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	37.89	39.87	43.00	44.98	50.08	-	-
12.2	Persentase wirausaha muda	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	-	-
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	-	-	-	98.40	-	-	-
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-
12.6	Jumlah atlet berprestasi	49.92	52.86	57.58	72.74	-	-	-
12.7	Jumlah prestasi olahraga	94.74	95.24	100.00	96.15	-	16 Cabor	-
12.8	Jumlah organisasi pemuda	596	596	596	604	604	14	Melampaui
12.9	Jumlah kegiatan kepemudaan	78	78	78	78	78	11	Melampaui
12.10	Jumlah organisasi olahraga	37	95	170	185	185	35	Melampaui
12.11	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	12	12	12	8	Melampaui
13. Statistik								
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	-	1 Sistem	-	-
13.2	Buku "Kabupaten dalam angka"	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Sesuai
13.3	Buku "PDRB"	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Sesuai

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
13.4	Buku Kecamatan Dalam Angka	-	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Sesuai
13.5	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	2,94	3,31	3,40	2,37	0,55	-	-
13.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :	1	12	-	-	-	-	-
13.7	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	319	676	873	747	1.340	3750 adv	Belum Tercapai
13.8	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :	-	3	3	3	-	-	-
13.9	Kerjasama informasi dan media massa :	-	-	-	-	23 Media Massa	-	-
13.10	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	-	-	-	-	4 Radio lokal	10	Belum Tercapai
13.11	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)					12 Surat Kabar Nasional/Lokal	22	Belum Tercapai
13.12	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	-	-	84 Website	-	-	62	Belum Tercapai
14.	Persandian							
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
15.	Kebudayaan							
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-	-	-
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	13 Buah	13 Buah	13 Buah	-	-	-	-
15.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	15 Karya Budaya	5 Karya Budaya	2 Karya Budaya	4 Karya Budaya	2 Karya Budaya	-	-
15.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	-	9 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	-	-
Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata	4729254	5910702	6511610	6196910	1071227	4.862.025	Belum Tercapai
1.2	Lama Kunjungan wisata	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	-	-
1.3	PAD sektor pariwisata	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	-	-	-	-	25,64%	-	-
1.5	Persentase desa wisata yang aktif	18,18%	27,27%	36,36%	45,45%	55%	-	-
1.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	28,16	28,87	28,66	28,67	28,67	28,97	Belum Tercapai
1.7	Persentase DTW yang ditata	-	64%	66%	69%	72%	72%	Sesuai
1.8	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	-	5.080.000	6.511.610	6.196.910	1.071.227	4.862.025	Belum Tercapai
1.9	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	2	3	4	5	6	1	Melampaui
1.10	Persentase desa wisata yang aktif	18,18%	27,27%	36,36%	45,45%	55%	-	-
2.	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB							
	- Produksi Jagung	45,38	43,27	49,48	54,54	57,79	-	-
	- Produksi Kedelai	3,66	12,13	12,27	11,22	15,20	-	-
	- Produksi Kacang Tanah	16,03	14,63	14,33	13,56	13,98	-	-
	- Produksi Kacang Hijau	10,00	9,3	0,00	0,00	9,75	-	-
	- Produksi Ubi Kayu	264,79	208,47	190,02	244,36	206,02	-	-
	- Produksi Ubi Jalar	193,52	185,09	187,12	222,40	276,88	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-
	Produksi kakao	370.04	346.81	149.35	78.15	94.05	-	-
	Produksi kelapa	5,214.31	2,196.28	520.93	1,577.61	2,081.01	-	-
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	63.86	60.96	63.37	65.52	61.65	-	-
2.6	Cakupan bina kelompok petani	200	225	250	300	350	9 klp	Melampaui
2.7	Produksi kelapa	5,214.31	2,196.28	520.93	1,577.61	2,081.01	0	-
2.8	Produksi kapas	200.00	125.00	40.12	35.00		0	-
2.9	Produksi kopi	715.40	77.62	676.85	675.56	689.55	-	-
2.10	Produksi Vanili	0.00	0.00	0.10	0.15	0.24	-	-
2.11	Produksi Kapuk	200.00	56.31	40.12	35.00	40.00	-	-
2.12	Produksi Jambu Mette	16.15	16.35	6.81	5.50	6.40	-	-
2.13	Produksi kemiri	-	-	-	-	-	36	-
2.14	Produksi cengkeh	53.21	30.32	32.46	42.52	41.60	58	Belum Tercapai
2.15	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis)	-	-	-	-	2	0	-
2.16	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	-	17	1	-	-	10	-
2.17	Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%)	-	-	-	0.98	-	-	-
2.18	Jumlah populasi sapi	28,433.00	28,511.00	29,874.00	30,458.00	32,183	31,548	Melampaui
2.19	Jumlah populasi kambing	955.00	1,014.00	1,043.00	445.00	414	916	Belum Tercapai
2.20	Jumlah populasi itik	88,810.00	66,819.00	57.240	66,562.00	71,571	93,268	Belum Tercapai
2.21	Jumlah populasi ayam	1,311,754.00	1,235,108.00	1,094,991.00	1,230,439.00	1,257,471	1,239,099	Melampaui
2.22	Angka Kesakitan Ternak	10.00	13.00	9.00	11.00	5.5	-	-
2.23	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	60,000.00	64,000.00	66.00	79,000.00	1,513	47,000	Belum Tercapai
2.24	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak	31,161.00	30,068.00	29,521.00	28,975.00	26,467	6,000	Melampaui
2.25	Nilai tukar petani	106.19	104.69	103.48	104.07		-	-
2.26	Jumlah Populasi Ternak	1,429,952	1,331,452	1,183,148	1,327,904	1,327,904	1,524,414	Belum Tercapai
3.	Perdagangan							
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	80,611,763.90	141,121,270.68	125,643,330.69	91,421,980.59	62,492,817.35	-	-
4.	Kelautan dan Perikanan							
4.1	Konsumsi ikan	32.91	32.95	33.61	34.12	35.15	33.11	Melampaui
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan	48	56	55	56	56	14 klp	Melampaui
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	6,451.03	6,658.62	8,756.31	8,789.22	7,911.77	4,880.86	Melampaui

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.2	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
1.6	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
2.	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3,56 JP	8,32 JP	14,70 JP	22,06 JP	3,76 JP	-	-
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	9.80%	11.05%	15.06%	8.41%	3.85%	-	-
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	96.42%	90.94%	97.54%	78.96%	80%	-	-
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	36	36	36	36	100%	Sesuai
3.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	36	36	36	36	100%	Sesuai
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3448	3145	3448	3145	2445	-	-
4.	Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	-	50.50	55.00	60.00	0.00	-	-
4.3	Penerapan SIDA:	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	50.00	55.30	57.90	-	-
4.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pengawasan							
5.1	Jumlah temuan BPK	41	19	20	32	20	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
6.	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	66,67%	80,21	81,40	81,35	81,35	-	-
6.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	66,67%	80,21	81,40	81,35	81,35	-	-

Berdasarkan Tabel 2.33 tentang hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.5.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari beberapa indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui indikator presentase balita gizi buruk dan persentase penduduk dibawah garis kemiskinan telah sesuai dengan standar yang di tetapkan. Disamping itu pula, terhadap beberapa indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu PDRB per kapita (ADHB) (Juta), PDRB per kapita (ADHK) (Juta), Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka rata-rata lama sekolah, Angka usia harapan hidup, Angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat pengangguran terbuka, Produksi kakao, Produksi kelapa, Produksi Kopi, Produksi Vanilli, Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, IDG, PDRB Konstan (Milyar), PDRB berlaku (Milyar) dan PDRB per kapita (ADHB) (Juta).

Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu Angka melek huruf, Rasio penduduk yang bekerja, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, Produksi Padi (Ton), Produksi Kapas, Produksi cengkeh, Pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran per Kapita.

2.5.2 Aspek Daya Saing Daerah

Dari beberapa indikator pada aspek daya saing daerah dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu Nilai tukar petani. Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu Angka kriminalitas.

2.5.3 Aspek Pelayanan Umum

a) Pendidikan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%), Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%), Angka Kelulusan Paket A (%), Angka Kelulusan Paket B (%) dan Angka Kelulusan Paket C (%). Sedangkan indikator Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah, Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dan Rasio guru/murid per kelas rata-rata melampaui standar yang telah ditetapkan.

Disamping itu pula, terdapat beberapa indikator dengan trend tetap yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka partisipasi kasar SD/SMP (%), Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%), Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%), Angka Kelulusan (AL) SD (%), Angka Kelulusan (AL) SMP (%), Angka Melanjutkan Ke SMP (%), Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.

Sedangkan indikator yang menunjukkan trend peningkatan yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B, Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar .

b) Kesehatan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, Tingkat kematian akibat malaria, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin, Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%), Persentase Puskesmas kondisi baik telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Disamping itu pula, terhadap beberapa indikator yang mengalami trend peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Cakupan kunjungan bayi, Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%), Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%), Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk), Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk) dan Persentase Keluarga memiliki Jamban (%).

Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH, Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran), Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan pelayanan ibu nifas (%), Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%), Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%), Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk), Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS, Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%) dan AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun.

Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Penderita diare yang ditangani, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan, Cakupan Desa Siaga Aktif (%), Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%), Cakupan penanganan pneumonia balita sesuai standar (100%), Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, Penderita DBD yang ditangani (%) dan Pelaksanaan tata laksana Diare Sesuai Standar (%).

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan diantaranya Terlaksananya perjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang dan Rasio Jaringan Irigasi, indikator yang mengalami trend tetap yaitu Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dan indikator yang mengalami trend tetap yaitu Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, dan indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah).

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit), Rasio rumah layak huni, Cakupan ketersediaan rumah layak huni, Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU dan Jumlah Rumah layak huni yang diselesaikan tiap tahun dan target penyelesaian (unit).

e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami fluktuasi dalam perkembangannya dari tahun ke tahun yaitu Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), sedangkan indikator yang mengalami tren peningkatan yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Persentase Penegakan, Kegiatan pembinaan politik daerah (orang), Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Penegakan PERDA, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%), Status audit Keuangan BPK, Persentase Desa tertib administrasi ADD (%), Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%), Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan, Cakupan patroli petugas Satpol PP dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten. Sedangkan indikator yang mengalami trend penurunan diantaranya Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang), Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk, Jumlah kasus Penegakan PERDA, Angka kriminalitas, Kegiatan pembinaan politik daerah, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

f) Sosial

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan diantaranya Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar sedangkan yang mengalami trend penurunan diantaranya Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar dan Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar.

g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan (%) telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Sedangkan indikator yang melampaui standar yang ditetapkan yaitu Rasio akseptor KB (%).

Disamping itu pula, terhadap beberapa indikator yang mengalami trend peningkatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA, Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi, Jumlah organisasi perempuan aktif (%), Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit), Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok), Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah), Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit), Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%), Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%), Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%), Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit).

Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD), Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang), Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%), Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%), Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan, Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya), Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan (%).

Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24

tahun, Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%), Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan, Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun, Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun, Penyelesaian Penerimaan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%).

h) Pangan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu, Ketersediaan pangan utama, Ketersediaan energi dan protein perkapita, Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr), Stok Pangan Harapan (SPPH),

Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, Ketersediaan pangan utama, Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr), Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr), Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang), Rasio akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif.

i) Pertanahan

Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya, Penyelesaian kasus tanah Negara, Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, Penyelesaian Masalah Tanah Kosong, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Penyelesaian izin lokasi.

j) Lingkungan Hidup

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Persentase cakupan area pelayanan, Persentase jumlah sampah yang tertangani, Pencemaran status mutu air (%), Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator yang melampaui standar yang ditetapkan yaitu, Timbulan sampah yang ditangani, Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R.

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu, Peningkatan Indeks Kualitas Air, Peningkatan Indeks Kualitas Udara, Laporan Inventarisasi GRK, Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara, Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha).

Sedangkan indikator-indikator yang menunjukkan trend penurunan yaitu, Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Jumlah limbah B3 yang dikelola, Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup, Persentase jumlah sampah yang tertangani pada

kondisi khusus di Provinsi, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan, Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%), Persentase penanganan sampah.

Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya, Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi, Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional, Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota, Pelayanan pencegahan pencemaran air (%), Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air, Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%), Pencemaran status mutu air (%), Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%).

k) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan penerbitan akta kelahiran telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan indikator Rasio bayi berakte kelahiran melampaui standar yang ditetapkan.

Indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Kepemilikan KTP (%), Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%) dan Kepemilikan Kartu Keluarga (%).

l) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dan PKK aktif telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, sedangkan dengan trend tetap yaitu Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Persentase LPM Berprestasi, Jumlah LSM, Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif, Tersusunnya RPJMDes, Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa,

Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan, Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender, Meningkatnya kualitas pembangunan desa, Meningkatnya LKM berprestasi, Terbangunnya infrastruktur desa dan Terbangunnya kantor desa yang layak.

Namun terdapat beberapa indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Terbentunya BUMDES dan Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat.

m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu Laju pertumbuhan penduduk (LPP), Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi, Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR), Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan, Persentase Pembiayaan Program Kependudukan dan indikator yang mengalami trend tetap yaitu Rata-rata usia kawin pertama wanita, Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa, Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan, Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB dan Total Fertility Rate (TFR).

n) Perhubungan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan yang mengalami trend penurunan yaitu Jumlah arus penumpang angkutan umum, Jumlah uji kir angkutan umum, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum, Rasio

panjang jalan per jumlah kendaraan, Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan, Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ dan Jumlah uji kir angkutan umum (buah).

o) Komunikasi dan Informatika

Indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada aspek pelayanan umum mengalami penurunan.

p) Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Persentase Usaha Mikro dan Kecil dan yang mengalami penurunan yaitu Persentase koperasi aktif (%).

q) Penanaman Modal

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional sedangkan yang mengalami trend penurunan yaitu Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja dan Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).

r) Kepemudaan dan Olahraga

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Persentase organisasi pemuda yang aktif, Persentase wirausaha muda, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Jumlah atlet berprestasi, Jumlah organisasi pemuda dan Jumlah organisasi olahraga. Indikator yang mengalami trend tetap diantaranya Jumlah kegiatan kepemudaan dan Jumlah kegiatan olahraga. Sedangkan indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Cakupan pembinaan olahraga dan Jumlah prestasi olahraga.

s) Statistik

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Buku Kecamatan Dalam Angka telah memenuhi standar yang ditetapkan, indikator yang mengalami trend peningkatan yaitu Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku "kabupaten dalam angka", Buku "PDRB", Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari), Kerjasama informasi dan media massa, Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit), Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) dan Jumlah Web site milik pemerintah daerah.

t) Persandian

Indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah pada aspek pelayanan umum mengalami peningkatan.

u) Kebudayaan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, indikator yang mengalami trend tetap yaitu Penyelenggaraan festival seni dan budaya sedangkan yang mengalami trend penurunan yaitu Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.

v) Pariwisata

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW, Persentase desa wisata yang aktif, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Persentase DTW yang ditata, Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian dan Persentase desa wisata yang aktif sedangkan yang mengalami tren penurunan yaitu Kunjungan wisata dan Lama Kunjungan wisata.

w) Pertanian

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan diantaranya Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Cakupan bina kelompok petani, Produksi kelapa, Produksi kopi, Produksi Vanili, Produksi Kapuk, Produksi Jambu Mette, Jumlah populasi sapi, Jumlah populasi itik, Jumlah populasi ayam.

Sedangkan indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Produksi cengkeh, Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok), Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%), Jumlah populasi kambing dan Angka Kesakitan Ternak.

x) Perdagangan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend penurunan yaitu Ekspor Bersih Perdagangan.

y) Kelautan dan Perikanan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Konsumsi ikan

dan Cakupan bina kelompok nelayan sedangkan yang mengalami trend penurunan yaitu Produksi perikanan kelompok nelayan.

z) Perencanaan Pembangunan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Hasil Evaluasi RKPD (dokumen), Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen), Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen), Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen), Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen) dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD telah sesuai standar yang ditetapkan.

aa) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dan Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah telah sesuai standar yang ditetapkan. Namun untuk indikator yang mengalami trend peningkatan diantaranya Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi,

bb) Penelitian dan Pengembangan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sedangkan yang mengalami trend penurunan yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

cc) Pengawasan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator Jumlah temuan BPK mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

dd) Sekretariat Dewan

Dari beberapa indikator pada aspek pelayanan umum dapat diketahui indikator yang mengalami trend peningkatan Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD dan Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD sedangkan yang mengalami trend tetap yaitu Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun jenis layanan dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

Adapun Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Badung yang meliputi 6 (Enam) Bidang Urusan Pemerintahan sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 2.34

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Capaian Target Tahunan				
					Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pendidikan								
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	5	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5	100	100	100	100	100
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	5	100	100	100	100	100
2	Urusan Kesehatan								
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	93,69	75,64	99,96	97,28	99,82
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	95,73	80,12	85,57	96,60	102,66
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	94,89	80,39	100	99,66	105,04
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	69,65	100	100	82,06	91,80
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	82,30	71,03	18,76
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	94,20	95,00	96,26	97,45	70,31
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	23,19	23,26	80,51	100	68,00
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	76,66	96,35	94,91
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	94,55	91,74
2.10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	5	100	100	100	100	105,76

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Capaian Target Tahunan				
					Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	70,81	81,99	81,02	79,15	41,14
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	0	59,50	89,31	100,74	79,40
3	Urusan Pekerjaan Umum								
3.1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,00	5	88,10	90,40	92,60	94,20	96,00
3.2	Penyediaan Layanan Pengolahan air Limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,04	5	93,20	94,00	94,80	95,20	97,04
4	Urusan Perumahan Rakyat								
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	5	100	100	100	100	100
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	5	0	0	100	100	0
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	5	0	0	100	100	100
5.4	Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	5	0	0	100	100	100
5.5	Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	5	100	100	100	100	100

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Capaian Target Tahunan				
					Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Urusan Sosial								
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	5	100	100	100	100	100

2.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah

Pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seluruh negara di belahan dunia termasuk Indonesia bersama-sama masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat *pandemic covid-19* masih menghantui ekonomi dunia dan Indonesia. Investasi dunia diperkirakan menurun sampai 10%, sedangkan tren investasi mengarah ke sektor-sektor bisnis berkelanjutan. Perdagangan global masih tertekan, namun terdapat sedikit harapan dari perdagangan intra regional, seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*).

Sektor kesehatan, pangan dan teknologi informasi menjadi harapan pertumbuhan ekonomi. Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2021 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 ini. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Pemerintah pusat beserta pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan serta pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* yang dilaksanakan Tahun 2021 ini memberi harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung.

Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2022. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022 adalah :

1. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Kondisi umum proyeksi ekonomi makro pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita (ADHK), PDRB Perkapita (ADHB), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Rasio Gini. Berikut proyeksi target indikator makro pembangunan Tahun 2022 sampai 2026 Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.35
 Proyeksi Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022 s.d. 2026
 Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROYEKSI				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,50-3,00	3,00-4,50	4,50-5,50	5,50-6,20	6,20-7,10
2	PDRB Perkapita (ADHK) (Dalam Juta Rupiah)	32.415.693,90	34.036.478,60	36.759.396,89	37.698.580,98	40.337.481,65
3	PDRB Perkapita (ADHB) (Dalam Juta Rupiah)	50.691.712,96	53.226.298,61	57.484.402,50	63.350.592,99	67.785.134,50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	2,00	1,95	1,80	1,78	1,65
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,20-3,00	1,00-2,00	0,90-1,50	0,60-0,90	0,30-0,60
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,60	81,61	81,63	81,65	81,67
7	Rasio Gini	0,301	0,300	0,299	0,291	0,282

Sumber Data : Data diolah oleh Tim Penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu yang dapat digunakan sebagai indikator capaian pembangunan daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan sebagai dampak adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 2,50%-3,00%, untuk tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi meningkatn sehingga mencapai angka sebesar 3,00%-4,50% disusul untuk tahun 2024 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 4,50%-5,50%. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masing-masing sebesar 5,50%- 6,20% dan 6,20% - 7,10%.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Badung dapat dilihat berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Atas dasar harga konstan besarnya PDRB Kabupaten Badung perhitungan dalam juta rupiah untuk tahun 2022 sebesar 32.415.693,90 selanjutnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga

mencapai angka sebesar 34.036.478,60 serta untuk tahun 2024 sebesar 36.759.396,89. Untuk tahun 2025 serta tahun 2026 PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan mencapai angka sebesar 37.698.580,98 dan 40.337.481,65.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku perhitungan dalam juta rupiah pada tahun 2022 sebesar 50.691.712,96 selanjutnya pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 53.226.298,61 dan 57.484.402,50 serta pada tahun 2025 sebesar 63.350.592,99. Pada tahun 2026 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 67.785.134,50 hal ini menunjukkan peningkatan proyeksi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun sebelumnya.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah, kemiskinan terdiri dari kemiskinan struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin serta kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung pada tahun 2022 sebesar 2,00% sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga mencapai angka sebesar 1,95%. Besarnya persentase kemiskinan Kabupaten

Badung untuk setiap tahunnya diproyeksikan akan mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 1,80%, tahun 2025 sebesar 1,78% serta tahun 2026 diproyeksikan sebesar 1,65%.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan suatu masalah dalam ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa terlepas dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (*Standard Labour Force Concepts*), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung diproyeksikan akan mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,20% - 3,00%. Selanjutnya tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami penurunan sehingga mencapai angka 1,00% - 2,00% begitu pula untuk tahun 2024 sebesar 0,90% - 1,50%. Pada tahun 2025 dan tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Badung juga tetap optimis untuk mampu menurunkan tingkat pengangguran sehingga diproyeksikan pada tahun 2025 sebesar 0,60% - 0,90% serta tahun 2026 sebesar 0,30% - 0,60%. Penyebab terjadinya fluktuasi pada tingkat pengangguran terbuka yaitu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak.

Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Badung mencapai angka sebesar 81,60 sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 diproyeksikan akan mengalami peningkatan sehingga untuk tahun 2023 sebesar 81,61 dan pada tahun 2024 sebesar 81,63. Pada tahun 2025 serta tahun 2026 IPM Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga mencapai angka sebesar 81,65 untuk tahun 2025 serta 81,67 untuk tahun 2026. IPM dapat dikatakan sebagai indikator yang penting di dalam melakukan pengukuran pembangunan suatu wilayah karena dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan oleh suatu wilayah.

Rasio Gini

Rasio Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati

angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai rasio gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat makin besar.

Pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 perkembangan rasio gini Kabupaten Badung diharapkan mengalami penurunan atau mendekati angka nol. Pada tahun 2022 rasio gini Kabupaten Badung mencapai angka 0,301, angka rasio gini Kabupaten Badung untuk tahun 2023 mengalami penurunan sehingga mencapai angka sebesar 0,300. Pada tahun 2024 rasio gini Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 0,299 menurun dari tahun sebelumnya serta untuk tahun 2025 dan tahun 2026 rasio gini Kabupaten Badung sebesar 0,291 dan 0,282.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan, maka analisis kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan daerah yang terdiri pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kapasitas kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari posisi keuangan daerah yaitu dari neraca daerah. Neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui cerminan posisi aset daerah, kewajiban daerah sampai dengan ekuitas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Badung

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD Kabupaten Badung yang terdiri atas: (a). Pendapatan Daerah; (b). Belanja Daerah; (c). Pembiayaan Daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah disajikan secara series untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	4.328.115.836.637,92	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.157.463.643,84	(0,46)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.563.459.644.191,57	4.172.457.395.825,25	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80	2.116.974.302.051,93	(5,95)
1.1.1.	Pajak Daerah	2.968.152.917.832,57	3.490.156.150.275,71	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18	1.613.756.252.261,10	(6,07)
1.1.2.	Retribusi Daerah	118.390.336.012,17	128.717.147.516,44	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38	65.061.615.365,10	(8,20)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	186.013.183.404,14	255.932.876.432,35	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13	243.081.327.172,33	8,21
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	290.903.206.942,69	297.651.221.600,75	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11	195.075.107.253,40	(8,72)
1.2.	Dana Perimbangan	543.323.024.805,00	555.889.276.981,00	558.028.882.096,00	568.230.992.821,00	567.546.105.116,00	1,10
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	78.823.886.305,00	73.843.811.809,00	80.192.486.416,00	61.162.551.974,00	88.941.535.805,00	5,99
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	336.243.365.000,00	330.336.650.000,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	330.780.978.000,00	(0,21)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	128.255.773.500,00	151.708.815.172,00	147.499.745.680,00	145.838.029.847,00	147.823.591.311,00	3,94
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	221.333.167.641,35	211.039.461.105,84	306.264.008.930,25	389.548.138.489,76	1.221.637.056.475,91	70,32
1.3.1.	Hibah	0,00	1.779.222.000,00	0,00	62.633.120.000,00	913.918.551.000,00	0,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	150.237.740.641,35	161.239.620.105,84	176.381.418.930,25	193.092.099.489,76	155.145.886.475,91	1,63
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	23.683.578.297,23	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	152.072.619.000,00	70,70
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	205.000.000,00	295.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	500.000.000,00	500,74
1.3.6.	Dana Insentif Daerah	39.843.644.999,00	7.500.000.000,00	81.250.000.000,00	74.538.152.000,00	96.352.731.000,00	230,79

Sumber : 1. Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung menurun yaitu di periode tahun 2016 sebesar Rp.4.328.15.836.637,92 sampai dengan periode tahun 2020 sebesar Rp.3.906.157.463.643,84 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar (0,46)%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung menurun dari periode tahun 2016–2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (5,95)% Secara persentase pertumbuhan masing–masing komponen PAD berbeda–beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar 8,21% sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar (8,72)%.

Pendapatan Kabupaten Badung berasal dari dana perimbangan yang didapat dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dana Perimbangan Kabupaten Badung pada periode 2016–2020 rata-rata tumbuh sebesar 1,10%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 5,99% serta yang mengalami penurunan adalah Dana Alokasi Umum dengan penurunan sebesar (0,21)%.

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan Kabupaten Badung berasal dari Lain–Lain Pendapatan yang Sah. Lain–Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Badung pada periode 2016–2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 70,32% sumber terbesar diperoleh dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 500,74% dan pertumbuhan terendah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 1,63%.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan belanja. Komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada tabel berikut disajikan perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2016-2020, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
	BELANJA	4.162.119.988.383,54	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.169.048.143,33	0,92
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.100.194.081.122,73	2.742.154.913.454,54	3.224.366.105.131,97	3.036.047.767.711,70	2.147.806.666.422,64	3,26
1	Belanja Pegawai	1.094.429.121.792,68	1.186.173.131.119,05	1.357.920.767.458,94	1.335.078.327.758,45	1.104.941.956.555,40	0,99
2	Belanja Subsidi	4.378.338.000,00	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00	(10,20)
3	Belanja Hibah	186.856.128.093,00	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.046.650.040,00	586.039.663.272,31	56,97
4	Belanja Bantuan Sosial	43.116.500.000,00	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.376.900.000,00	50.192.100.000,00	46,37
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	385.408.982.479,52	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	234.503.321.092,00	(3,63)
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	385.529.238.757,53	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	56.907.163.000,00	(12,09)
7	Belanja Tidak Terduga	475.772.000,00	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93	862,34
II	BELANJA LANGSUNG	2.061.925.907.260,81	2.671.781.510.035,59	2.575.218.294.940,07	2.697.734.876.871,47	1.729.362.381.720,69	(1,29)
1	Belanja Pegawai	52.697.107.085,00	75.057.726.519,00	107.521.240.115,00	125.443.881.681,00	108.629.082.831,00	22,24
2	Belanja Barang dan Jasa	814.112.678.451,43	1.355.612.118.594,21	1.560.931.092.975,98	1.747.622.979.699,95	1.167.823.814.095,75	15,11
3	Belanja Modal	1.195.116.121.724,38	1.241.111.664.922,38	906.765.961.849,09	824.668.015.490,52	452.909.484.793,94	(19,31)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode 2016–2020 bahwa Belanja daerah Kabupaten Badung memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 0,92%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp.2.100.194.081.122,73 di tahun 2016 menjadi Rp.2.147.806.666.422,64 di tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,26%, Sedangkan Belanja Langsung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni Rp.2.061.925.907.260,81 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.729.362.381.720,69 tahun 2020, dengan rata-rata penurunan Belanja Langsung sebesar (1,29)%.

C. Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Kenaikan (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH						
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	914.810.544.892,03	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	221.590.260.536,79	279.401.874.053,18	(15,90)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	913.860.040.176,70	1.075.352.169.826,97	600.949.745.581,30	221.406.310.542,79	278.775.207.361,18	(15,92)
2	Penarikan kembali pokok dana bergulir	950.504.715,33	284.016.170,00	31.666.654,00	183.949.994,00	126.666.692,00	72,70
3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.803.470.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.803.470.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Penguatan Modal Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	910.007.074.892,03	1.075.636.185.996,97	600.981.412.235,30	219.590.260.536,79	279.401.874.053,18	(15,54)
	SISA LEBH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	1.076.002.923.146,41	601.085.896.418,93	221.406.310.542,79	278.775.207.361,18	308.390.289.553,69	(17,69)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan Netto Kabupaten Badung mengalami penurunan rata rata sebesar (15,54)%, Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan rata-rata sebesar (15,90)%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni Rp.4.803.470.000,00 sedangkan di tahun 2020 tidak terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami penurunan dari Rp.1.076.002.923.146,41 pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2020 menjadi Rp.308.390.289.553,69 dengan rata-rata kenaikan SILPA Tahun berjalan sebesar (17,69)%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Badung, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2016-2020 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020

Uraian	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN %
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET						
ASET LANCAR	1.966.284.484.172,34	2.007.655.000.774,57	1.166.731.976.000,60	963.524.115.734,04	1.066.778.138.598,16	(11,62)
Kas	0,00	161.600.000.000,00	161.600.000.000,00	0,00	0,00	-
Kas di Kas Daerah	1.060.222.577.116,86	429.965.532.054,89	25.041.927.636,38	236.158.483.968,60	249.090.346.789,76	173,73
Kas di Bendahara Penerimaan	13.475.000,00	6.114.250,00	22.980.345,00	33.540.689,00	1.538.000,00	42,94
Kas di Bendahara Pengeluaran	54.901.000,00	0,00	0,00	2.997.215.672,05	43.672.730,00	-
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	891.029.138,60	2.467.645.159,88	-
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	6.364.380.799,58	13.653.531.338,05	-
Kas di BLUD	8.844.553.620,31	3.381.167.671,46	27.344.591.021,72	32.331.605.843,35	43.133.555.536,00	174,65
Kas Lainnya	7.007.823.193,32	6.265.493.019,58	7.399.706.716,69	12.876.536,00	44.893.035,00	39,08
Piutang Pendapatan	929.692.984.205,74	941.504.164.456,88	977.651.230.260,53	833.585.471.554,50	1.018.874.312.968,55	3,15
Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Bagi Hasil Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Denda/Bunga Pajak Hotel, Restoran, Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Biaya dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang JKBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang lain - lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang	(323.198.562.964,57)	(354.320.593.811,41)	(383.810.059.501,98)	(423.921.412.568,06)	(519.915.083.476,16)	12,76
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Bunga Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Deviden PT BPD Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Deviden Jamkrda Bali Mandara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Sisa Hasil Usaha KPN Bina Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Sewa atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Beban Dibayar Dimuka	125.160.417,18	9.623.220.175,96	315.520.138,51	10.802.769.657,07	5.089.974.431,85	2.690,73
Persediaan	283.521.572.583,50	809.629.902.957,21	351.166.079.383,75	264.268.154.443,35	254.293.752.085,23	25,10
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.644.518.405.341,07	1.762.537.470.553,72	1.825.428.324.830,48	1.835.604.529.053,40	1.784.982.062.158,48	2,14
Invesatasi Dana Bergulir	22.175.541.267,00	21.891.525.097,00	21.859.808.444,00	21.675.858.450,00	21.549.191.758,00	(0,71)
Investasi Non Permanen lainnya	9.337.558.220,00	9.337.558.220,00	9.337.558.220,00	9.337.558.220,00	9.337.558.220,00	-
Investasi Non Permanen lainnya Diragukan Tertagih	(8.379.222.467,00)	(8.379.222.467,00)	(10.840.413.068,00)	(10.710.621.390,00)	(10.585.621.365,00)	6,75
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	23.133.877.020,00	22.849.860.850,00	20.356.953.596,00	20.302.795.280,00	20.301.128.613,00	(3,10)
Invesatasi Jangka Panjang Permanen	1.621.384.528.321,07	1.739.687.609.703,72	1.805.071.371.234,48	1.815.301.733.773,40	1.764.680.933.545,48	2,21
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	1.621.384.528.321,07	1.739.687.609.703,72	1.805.071.371.234,48	1.815.301.733.773,40	1.764.680.933.545,48	2,21

lanjutan

Uraian	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2016	2017	2018	2019	2020	%
ASET TETAP	7.897.319.300.367,15	8.947.197.071.819,68	10.084.170.547.402,30	10.165.769.383.520,40	14.188.800.352.263,00	16,60
Tanah	3.704.755.284.242,35	4.336.140.899.543,00	4.691.234.221.224,00	4.828.022.041.258,00	8.965.273.438.281,20	28,46
Peralatan dan Mesin	967.691.902.310,94	1.266.572.682.002,61	1.542.989.923.937,55	1.661.179.446.851,72	1.965.756.968.020,36	19,68
Gedung dan Bangunan	2.094.241.713.896,30	2.278.175.506.468,83	2.606.756.042.670,88	2.912.877.331.079,18	3.160.732.569.642,46	10,86
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.092.934.797.638,62	2.993.754.363.342,74	3.665.664.900.501,08	3.744.810.403.912,72	3.649.805.520.842,31	4,71
Aset Tetap Lainnya	50.455.219.966,98	54.551.703.163,98	80.511.581.346,52	78.150.677.936,52	87.024.314.094,11	16,03
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.757.973.910,50	279.486.656.759,84	228.753.285.853,38	121.828.364.340,13	40.897.280.444,21	489,84
Akumulasi Penyusutan	(2.025.517.591.598,54)	(2.261.484.739.461,32)	(2.731.739.408.131,07)	(3.181.098.881.857,86)	(3.680.689.739.061,67)	16,15
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud	3.562.848.945,00	4.511.085.775,00	3.917.118.059,00	3.082.588.117,00	1.957.146.016,00	(11,09)
Aset Lain-lain	209.204.063.815,14	240.055.030.353,05	467.023.224.323,65	450.098.711.709,05	465.972.193.519,70	27,30
Jumlah Aset Lainnya	212.766.912.760,14	244.566.116.128,05	470.940.342.382,65	453.181.299.826,05	467.929.339.535,70	26,75
JUMLAH AKTIVA	11.720.889.102.640,70	12.961.955.659.276,00	13.547.271.190.616,10	13.418.079.328.133,90	17.508.489.892.555,30	11,16
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	96.347.742.246,87	84.744.409.868,56	734.758.735.930,30	119.049.148.578,80	142.696.617.690,31	172,76
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.567.651,00	132.410.577,00	2.895.177,00	13.925.286,00	44.893.035,00	414,63
Pendapatan diterima dimuka	14.545.050.001,66	16.747.802.761,91	17.952.497.062,53	19.060.895.756,46	16.219.018.428,83	3,40
Utang Beban	81.754.734.263,21	65.632.613.193,35	331.269.395.625,31	96.178.150.545,34	123.145.463.120,90	85,52
Utang jangka Pendek lainnya	37.390.331,00	2.231.583.336,30	385.533.948.065,46	3.796.176.991,00	3.287.243.105,58	5.733,04
EKUITAS DANA	11.624.541.360.393,80	12.877.211.249.407,50	12.812.512.454.685,80	13.299.030.179.555,10	17.365.793.274.865,00	11,16
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.720.889.102.640,70	12.961.955.659.276,00	13.547.271.190.616,10	13.418.079.328.133,90	17.508.489.892.555,30	11,16

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Badung memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2016-2020 sebesar (11,62)%. Investasi Jangka Panjang pemerintah memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2016-2020 sebesar 2,14%. Jumlah Aset Tetap Kabupaten Badung selama tahun 2016-2020 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 16,60%.

B. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2016-2020 memiliki angka rata-rata pertumbuhan positif sebesar 172,76%.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan Ekuitas Dana Kabupaten Badung selama tahun 2016-2020 rata-rata tumbuh sebesar 11,16%, dimana pada tahun 2016 Ekuitas Dana Kabupaten Badung sebesar Rp.11,624,541,360,393.80 menjadi Rp.17.365.793.274.865.00 pada tahun 2020.

3.1.3. Rasio Keuangan Kabupaten Badung

Berdasarkan data neraca Kabupaten Badung periode 2016–2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kabupaten Badung. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Tahun 2016-2020 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (current ratio)	20,41	23,69	1,59	8,09	7,48
2	Rasio Kas (quick ratio)	17,47	14,14	1,11	5,87	5,69
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,0082	0,0065	0,0542	0,0089	0,0082
2	Rasio hutang terhadap modal	0,0083	0,0066	0,0573	0,0090	0,0082

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Badung yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Lancar pada Tahun 2020 sebesar 7,48, ini berarti pada tahun 2020 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 7,48 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung pada Tahun 2020.

2. Rasio Kas (*Quick Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid untuk menutupi hutang lancar. Berdasarkan tabel diatas, *quick ratio* pada tahun 2020 sebesar 5,69, ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung 5,69 kali lebih besar dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya jadi Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada tahun 2020 sebesar 0,00815. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil, atau dengan kata lain Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung lebih banyak diperoleh dari pembelanjaan Pendapatan Kabupaten Badung yang bukan berasal dari hutang.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 sebesar 0,00822. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Badung, hal ini berarti Kabupaten Badung merupakan daerah yang mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Event*) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2016 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2020.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya *e-governance* di bidang Pajak Daerah.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- 6) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.

- 6) Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
- 7) Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
- 8) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020. Belanja Daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
2. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Badung bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten

Badung pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut :

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Badung, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020			RATA-RATA
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
2	BELANJA	4.628.105.968.489,68	4.162.119.988.383,54	89,93	6.430.198.120.435,66	5.413.936.423.490,13	84,20	8.155.281.067.642,20	5.799.584.400.072,04	71,11	6.548.287.598.483,84	5.733.782.644.583,17	87,56	4.793.391.784.707,68	3.877.169.048.143,33	80,89	(1,60)
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.257.951.472.308,49	2.100.194.081.122,73	93,01	3.253.094.357.116,32	2.742.154.913.454,54	84,29	4.274.272.528.422,53	3.224.366.105.131,97	75,44	3.617.476.167.418,24	3.036.047.767.711,70	83,93	2.781.605.222.380,57	2.147.806.666.422,64	77,21	(4,16)
02.01.01	Belanja Pegawai	1.187.242.652.792,94	1.094.429.121.792,68	92,18	1.625.853.910.894,64	1.186.173.131.119,05	72,96	1.625.853.910.894,64	1.357.920.767.458,94	83,52	1.389.333.507.861,00	1.335.078.327.758,45	96,09	1.216.344.927.602,36	1.104.941.956.555,40	90,84	0,80
02.01.02	Belanja Subsidi	5.201.096.000,00	4.378.338.000,00	84,18	9.340.792.000,00	7.476.567.750,00	80,04	9.527.607.840,00	5.770.880.000,00	60,57	11.441.487.840,00	5.167.970.000,00	45,17	8.433.880.000,00	1.121.800.000,00	13,30	(31,31)
02.01.03	Belanja Hibah	236.151.906.850,00	186.856.128.093,00	79,13	525.248.881.222,00	484.236.861.912,00	92,19	932.588.786.683,00	794.612.019.024,70	85,20	787.052.920.849,00	371.046.650.040,00	47,14	760.410.839.350,00	586.039.663.272,31	77,07	6,94
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	47.450.000.000,00	43.116.500.000,00	90,87	118.981.940.000,00	100.802.394.500,00	84,72	267.654.670.250,00	223.693.798.130,00	83,58	259.990.929.384,00	244.376.900.000,00	93,99	162.865.000.000,00	50.192.100.000,00	30,82	(15,72)
02.01.05	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	385.623.841.915,12	385.408.982.479,52	99,94	498.091.575.700,63	493.114.326.842,44	99,00	745.539.068.227,51	505.025.846.956,65	67,74	636.446.802.884,62	578.667.917.117,00	90,92	321.020.147.046,70	234.503.321.092,00	73,05	(4,49)
02.01.06	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	393.281.974.750,43	385.529.238.757,53	98,03	459.839.891.599,05	458.163.691.599,05	99,64	678.108.484.527,38	328.671.644.241,68	48,47	519.834.775.799,62	491.303.973.310,30	94,51	67.728.024.527,74	56.907.163.000,00	84,02	8,55
02.01.07	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	475.772.000,00	15,86	15.737.365.700,00	12.187.939.732,00	77,45	15.000.000.000,00	8.671.149.320,00	57,81	13.375.742.800,00	10.406.029.485,95	77,80	244.802.403.853,77	114.100.662.502,93	46,61	89,37
02.02	BELANJA LANGSUNG	2.370.154.496.181,19	2.061.925.907.260,81	87,00	3.177.103.763.319,34	2.671.781.510.035,59	84,09	3.881.008.539.219,67	2.575.218.294.940,07	66,35	2.930.811.431.065,60	2.697.734.876.871,47	92,05	2.011.786.562.327,11	1.729.362.381.720,69	85,96	1,92
02.02.01	Belanja Pegawai	56.258.255.390,00	52.697.107.085,00	93,67	89.355.043.637,00	75.057.726.519,00	84,00	120.232.784.433,00	107.521.240.115,00	89,43	137.689.642.037,20	125.443.881.681,00	91,11	118.688.350.284,00	108.629.082.831,00	91,52	(0,38)
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	874.011.249.179,25	814.112.678.451,43	93,15	1.609.047.947.982,54	1.355.612.118.594,21	84,25	2.111.668.858.048,69	1.560.931.092.975,98	73,92	1.928.934.790.542,35	1.747.622.979.699,95	90,60	1.385.653.885.015,92	1.167.823.814.095,75	84,28	(1,56)
02.02.03	Belanja Modal	1.439.884.991.611,94	1.195.116.121.724,38	83,00	1.478.700.771.699,80	1.241.111.664.922,38	83,93	1.649.106.896.737,98	906.765.961.849,09	54,99	864.186.998.486,05	824.668.015.490,52	95,43	507.444.327.027,19	452.909.484.793,94	89,25	8,43

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.6 dari data realisasi Belanja Tidak Langsung, terlihat realisasi mengalami penurunan dari 93,01% pada tahun 2016 menjadi 77,21% pada periode 2020, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai (4,16)%, pada periode 2016–2020. Serta tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2016 sebesar 87% menjadi sebesar 85,96 % pada tahun 2020, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 1,92% pada periode 2016-2020.

B. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Badung tertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

KODE	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
5.	BELANJA	1.652.798.069.646,36	1.994.974.666.174,70	2.389.473.550.816,84	2.277.106.353.947,40	1.909.618.911.220,03
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	912.634.582.714,68	1.014.946.522.052,00	1.151.700.354.628,50	1.126.820.876.173,45	955.957.183.421,40
5.1.1	Belanja Pegawai	912.634.582.714,68	1.014.946.522.052,00	1.151.700.354.628,50	1.126.820.876.173,45	955.957.183.421,40
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	572.925.773.826,68	531.097.283.563,00	536.986.880.754,00	552.428.735.610,00	560.827.515.176,50
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	331.586.158.888,00	472.487.449.489,00	597.475.656.774,50	559.777.739.107,00	384.873.938.832,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.122.650.000,00	11.361.789.000,00	17.237.817.100,00	14.614.401.456,45	10.255.729.412,90
5.2	BELANJA LANGSUNG	740.163.486.931,68	980.028.144.122,70	1.237.773.196.188,34	1.150.285.477.773,95	953.661.727.798,63
5.2.1	Belanja Pegawai	52.532.843.085,00	56.096.211.265,00	85.513.367.886,00	101.720.872.596,00	80.408.533.831,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	15.776.500.000,00	29.971.335.000,00	51.395.665.000,00	62.553.226.000,00	34.203.778.500,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.959.845.085,00	23.072.853.265,00	30.407.446.886,00	37.902.171.596,00	46.181.796.331,00
5.2.1.03	Uang Lembur	2.796.498.000,00	3.052.023.000,00	3.710.256.000,00	1.265.475.000,00	22.959.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	475.676.985.017,78	717.992.155.040,70	978.319.024.334,21	960.143.887.315,20	831.650.115.391,63
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.462.004.492,56	148.039.579.235,50	205.805.521.894,25	172.757.166.134,80	78.024.095.609,96
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	287.475.157.848,32	316.166.376.245,40	437.664.460.155,11	530.073.146.080,25	558.851.049.182,73
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.569.317.620,90	95.141.130.280,00	111.126.701.731,85	80.428.887.767,00	124.803.910.969,55
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	2.744.115.932,00	2.808.484.172,00	5.514.947.432,00	10.190.383.300,00	4.162.141.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.635.473.250,00	7.357.882.250,00	8.950.837.450,00	2.738.439.550,00	2.441.058.250,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	3.469.904.810,00	4.460.672.285,00	7.574.756.446,00	6.217.463.225,00	2.385.947.361,00
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	26.031.211.969,00	33.939.554.490,00	51.079.586.725,00	39.219.363.680,00	14.626.331.953,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	11.871.028.688,00	872.663.000,00	2.085.170.203,00	2.654.422.028,00	678.851.600,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.999.236.270,00	2.035.563.200,00	4.060.823.750,00	2.565.240.250,00	2.526.293.064,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.826.617.875,00	30.785.989.180,00	36.564.787.226,00	45.507.689.137,00	2.468.821.400,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.640.312.816,00	71.567.000.512,80	98.105.363.209,00	58.798.302.392,15	36.917.612.874,00
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	886.500.000,00	579.500.000,00	1.069.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.066.103.446,00	4.237.760.190,00	8.717.068.112,00	8.493.383.771,00	3.764.002.127,39
5.2.3	Belanja Modal	211.953.658.828,90	205.939.777.817,00	173.940.803.968,13	88.420.717.862,75	41.603.078.576,00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	66.089.047.989,00	39.207.949.900,00	28.512.371.038,00	7.618.654.989,00	13.088.103.470,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.185.167.653,00	9.392.527.231,00	25.170.050.707,00	4.173.448.100,00	4.854.633.637,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor					
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	108.474.951.144,00	132.018.976.532,00	102.901.227.890,25	62.674.638.485,75	22.968.540.104,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.235.134.282,90	24.900.563.838,00	15.803.931.372,88	13.394.795.316,00	630.827.665,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	969.357.760,00	419.760.316,00	1.553.222.960,00	559.180.972,00	60.973.700,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2016–2020 cenderung mengalami kenaikan yang dikarenakan terjadinya kenaikan Belanja Langsung. Pada tahun 2018–2020 cenderung mengalami penurunan, Penurunan tersebut lebih disebabkan karena penurunan Belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung, juga berkenaan dengan penurunan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN (Rp)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	2.581.119.112.182,31	4.328.245.675.773,67	59,634
2	Tahun Anggaran 2017	3.209.358.800.394,26	4.939.386.133.912,09	64,975
3	Tahun Anggaran 2018	4.050.449.797.704,62	5.420.009.298.379,53	74,731
4	Tahun Anggaran 2019	3.828.736.709.179,40	5.792.967.591.407,56	66,093
5	Tahun Anggaran 2020	3.018.748.416.754,46	3.906.157.463.643,84	77,282

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.8 diperoleh persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah menunjukkan kenaikan pada periode 2016-2020, tahun 2016 persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 59,63% dan tahun 2020 meningkat menjadi 77,28%.

C. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab.Badung pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016-2020
Kabupaten Badung

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Kenaikan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.397.984.523.250,16	1.620.278.985.614,61	1.793.262.901.457,48	1.847.601.019.974,75	1.193.347.294.512,90	(1,45)
1	Gaji Dan Tunjangan	572.925.773.826,68	531.097.283.563,00	536.986.880.754,00	552.428.735.610,00	560.827.515.176,00	(0,45)
2	Tambahan Penghasilan PNS	331.586.158.888,00	472.487.449.489,00	597.475.656.774,50	559.777.739.107,00	384.873.938.832,00	7,85
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	8.122.650.000,00	11.361.789.000,00	17.237.817.100,00	14.614.401.456,45	10.255.729.412,90	11,64
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	385.408.982.479,52	493.114.326.842,44	505.025.846.956,65	578.667.917.117,00	159.108.049.310,00	(6,89)
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	58.012.366.089,79	65.308.551.360,54	94.504.377.287,35	99.054.202.959,00	34.170.602.852,00	(0,85)
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	40.943.328.229,49	45.924.321.622,95	41.047.058.848,30	41.334.326.214,00	41.224.668.930,00	0,49
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	985.263.736,68	985.263.736,68	985.263.736,68	1.723.697.511,30	2.886.790.000,00	35,61
B	BELANJA LANGSUNG	78.094.038.765,90	163.635.396.080,00	214.234.663.513,85	191.605.663.138,00	214.178.631.411,55	35,42
1	Honorarium PNS	15.776.500.000,00	29.971.335.000,00	51.395.665.000,00	62.553.226.000,00	34.203.778.500,00	34,46
2	Honorarium Non PNS	33.959.845.085,00	23.072.853.265,00	30.407.446.886,00	37.902.171.596,00	46.181.796.331,00	11,56
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.796.498.000,00	3.052.023.000,00	3.710.256.000,00	1.265.475.000,00	4.162.141.000,00	48,43
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.635.473.250,00	7.357.882.250,00	8.950.837.450,00	2.738.439.550,00	2.441.057.250,00	(11,93)
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	886.500.000,00	579.500.000,00	1.069.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(25,85)
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.469.904.810,00	4.460.672.285,00	7.574.756.446,00	6.217.463.225,00	2.385.947.361,00	4,71
7	Belanja Premi Asuransi	14.569.317.620,90	95.141.130.280,00	111.126.701.731,85	80.428.887.767,00	124.803.910.969,55	149,34
JUMLAH		1.476.078.562.016,06	1.783.914.381.694,61	2.007.497.564.971,33	2.039.206.683.112,75	1.407.525.925.924,45	1,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada periode 2016-2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00%. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas yang berasal dari Belanja Tidak Langsung pada periode 2016-2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar (1,45)%, sedangkan yang berasal dari Belanja Langsung sebesar 35,42%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan. Hasil Analisis pembiayaan tertuang pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020
Kabupaten Badung

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.328.115.836.637,92	4.939.386.133.912,09	5.420.009.298.379,53	5.792.967.591.407,56	3.906.157.463.643,84	(0,46)
	Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	4.162.119.988.383,54	5.413.936.423.490,13	5.799.584.400.072,04	5.733.782.644.583,17	3.877.169.048.143,33	0,92
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.803.470.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Defisit Riil	161.192.378.254,38	(474.550.289.578,04)	(379.575.101.692,51)	57.184.946.824,39	28.988.415.500,51	(144,70)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	913.821.323.841,70	1.075.352.169.826,97	600.949.745.581,30	221.406.310.542,79	279.401.874.053,18	(15,85)
2	Penarikan Dana Bergulir	950.504.715,33	284.016.170,00	31.666.654,00	183.949.994,00	126.666.692,00	72,70
B.	Total Realisasi Penerimaan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Badung Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	913.821.323.842,19	100,00	1.076.132.762.279,49	100,00	585.412.694.942,57	100,00	221.406.310.542,79	100,00	278.775.207.361,18	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah bahwa dari tahun 2016–2020 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan memiliki angka pertumbuhan sebesar 0%. Untuk menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, maka dalam penentuan SILPA harus cermat dan didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran berkenaan.

3.2.3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016-2020

Percepatan penyusunan laporan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal diantaranya :

- A. Seringnya mutasi bagi petugas keuangan perangkat daerah dan kurang banyaknya personil yang memiliki kompetensi akuntansi. Sebagai solusi untuk permasalahan tersebut dilakukan pelatihan dan bimtek tentang pelaksanaan APBD dan penyusunan pelaporan keuangan, pembinaan kepada bendahara perangkat daerah secara intensif, serta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
- B. Belum terintegrasinya sistem Simda Barang Milik Daerah (BMD) dengan Simda Keuangan. Sebagai solusi permasalahan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan.
- C. Banyaknya peraturan yang tidak signifikan, seperti misalnya yang diketemukan antara Peraturan Pengelolaan Keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait permasalahan rekening. Solusi untuk permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan *mapping* ulang.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah

pada periode tahun 2016-2020, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode Tahun 2022-2026.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Penyusunan proyeksi realisasi APBD telah mempertimbangkan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, meskipun dalam kurun waktu rata-rata 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan kinerja ekonomi Kabupaten Badung cenderung tumbuh di bawah pertumbuhan rata-ratanya yaitu sebesar (0,46%), sebagai dampak peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Agung dan adanya pandemi *Covid-19*. Dengan kondisi tersebut, penyusunan proyeksi APBD mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat dengan pendekatan kombinasi realistis dan optimis, dimana pada Tahun 2022 dirancang menggunakan pendekatan realistis, sedangkan untuk proyeksi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 menggunakan pendekatan optimis. Selain itu, tingkat inflasi diasumsikan cukup terkendali dalam periode 2022-2026.

Penyusunan proyeksi APBD Kabupaten Badung dilakukan berdasarkan asumsi konservatif dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2020) dan perkiraan realisasi tahun 2021, penyusunan proyeksi realisasi APBD ini juga mempertimbangkan bila terjadi kondisi *force majeure*, seperti bencana alam, pandemi *Covid-19* yang tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi Bali pada umumnya dan perekonomian Kabupaten Badung khususnya industri pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh kinerja komponen pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen lain-lain pendapatan yang sah maupun realisasi belanja daerah secara umum.

Peningkatan proyeksi Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung setiap tahunnya dirancang mengalami peningkatan signifikan yang dimulai meningkat pada tahun 2023 karena ditopang oleh peningkatan dari sektor Pajak Daerah, potensi Pajak Daerah di Kabupaten Badung khususnya dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebelum adanya Pandemi *Covid-19*. Pajak Daerah dirancang akan mengalami peningkatan, seiring dengan optimisme kondisi pengendalian Pandemi *Covid-19* akan semakin membaik 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan cara sebagai berikut :

1. Intensifikasi

- a. Melakukan upaya perluasan digitalisasi pembayaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan telah dibentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati

Nomor 27/054/HK/2021, diharapkan Tim ini dapat mempercepat upaya digitalisasi terhadap seluruh transaksi belanja dan pendapatan daerah di Kabupaten Badung.

- b. Melakukan kerjasama dengan instansi pusat dan daerah untuk memperkuat basis data perpajakan daerah diantaranya :
 - 1) Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak khususnya mengenai pertukaran data dan informasi perpajakan dan melakukan Kegiatan Pengawasan Bersama Wajib Pajak,
 - 2) Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengintegrasikan data kependudukan dan data pajak daerah,
 - 3) Kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pemanfaatan data perijinan dan perpajakan daerah,
 - 4) Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka integrasi data perpajakan daerah dengan data pertanahan.
 - c. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dengan berbasis *online* seperti pelayanan pelaporan pajak daerah melalui SPTPD *Online*, pelayanan pendaftaran dan verifikasi BPHTB melalui aplikasi BPHTB *Online*, pelayanan pembayaran pajak daerah dan penyampaian dokumen perpajakan kepada wajib pajak daerah secara *online*.
 - d. Melakukan perluasan akses pembayaran pajak daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan mitra kerjasama seperti toko berjaringan (Indomaret) dan aplikasi *E-commerce* (Gopay dan Tokopedia).
 - e. Melakukan penagihan piutang pajak daerah secara aktif dan melalui upaya paksa (pemasangan spanduk) serta penagihan piutang pajak terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
 - f. Melakukan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi secara elektronik.
 - g. Secara bertahap membangun aplikasi pengelolaan Retribusi Daerah di masing-masing perangkat daerah pengelola.
2. Ekstensifikasi
- a. Melakukan pendataan Wajib Pajak baru.
 - b. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak untuk validitas data potensi.
 - c. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan tarif Retribusi Daerah.
 - d. Menggali potensi Retribusi Daerah seperti penetapan Objek Daya Tarik Wisata baru, optimalisasi pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2016-2020, serta memperhatikan perkembangan kondisi daerah dan indikator makro daerah, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2022-2026 tertuang pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Badung Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Pertumbuhan %	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	PENDAPATAN	20,18	2.900.345.173.496,00	4.385.927.613.561,50	4.725.925.851.377,44	5.541.661.642.764,28	5.821.133.695.507,80
4.1	Pendapatan Asli Daerah	28,30	1.929.905.339.508,00	3.399.982.378.150,50	3.739.980.615.966,44	4.555.716.407.353,28	4.835.188.460.096,80
4.1.01	Pajak Daerah	33,51	1.480.276.630.930,53	2.855.942.613.745,50	3.156.601.343.070,44	3.872.911.783.138,22	4.217.319.393.186,18
4.1.02	Retribusi Daerah	70,89	36.422.651.565,00	136.623.341.628,00	148.968.116.998,00	135.908.889.529,65	148.048.411.276,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3,49	224.436.064.560,62	164.206.824.867,00	170.170.456.191,00	238.041.274.082,41	231.890.543.583,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	7,68	188.769.992.451,85	243.209.597.910,00	264.240.699.707,00	308.854.460.603,00	237.930.112.051,11
4.2	Pendapatan Transfer	0,44	890.156.233.988,00	905.661.635.411,00	905.661.635.411,00	905.661.635.411,00	905.661.635.411,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,96	727.133.211.000,00	755.107.978.000,00	755.107.978.000,00	755.107.978.000,00	755.107.978.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,24	564.478.880.000,00	592.453.647.000,00	592.453.647.000,00	592.453.647.000,00	592.453.647.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00	104.167.785.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	0,00	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00	58.486.546.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	(1,91)	163.023.022.988,00	150.553.657.411,00	150.553.657.411,00	150.553.657.411,00	150.553.657.411,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	(2,16)	159.933.022.988,00	146.130.159.595,00	146.130.159.595,00	146.130.159.595,00	146.130.159.595,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10,79	3.090.000.000,00	4.423.497.816,00	4.423.497.816,00	4.423.497.816,00	4.423.497.816,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)	0,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00
2	BELANJA	20,18	2.900.345.173.496,00	4.385.927.613.561,50	4.725.925.851.377,44	5.541.661.642.764,28	5.821.133.695.507,79
02.01	Belanja Operasi	19,45	2.496.345.173.496,00	3.701.722.905.845,91	3.988.681.418.562,56	4.677.162.426.493,05	4.913.036.839.008,58
02.02	Belanja Modal	24,82	93.000.000.000,00	157.893.394.088,21	170.133.330.649,59	199.499.819.139,51	209.560.813.038,28
02.03	Belanja Tidak Terduga	25,57	33.000.000.000,00	57.017.058.976,30	61.437.036.067,91	72.041.601.355,94	75.674.738.041,60
02.04	Belanja Transfer	24,58	278.000.000.000,00	469.294.254.651,08	505.674.066.097,39	592.957.795.775,78	622.861.305.419,34
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
03.01	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas riil keuangan Kabupaten Badung untuk mendanai pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022-2026, disajikan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2022–2026

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	Pendapatan	2.900.345.173.496,00	4.385.927.613.561,50	4.725.925.851.377,44	5.541.661.642.764,28	5.821.133.695.507,80
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	2.900.345.173.496,00	4.385.927.613.561,50	4.725.925.851.377,44	5.541.661.642.764,28	5.821.133.695.507,80
	dikurangi :					
4	Belanja Operasi	1.502.565.450.205,00	1.690.893.051.143,00	1.879.220.652.081,00	2.067.548.253.019,00	2.255.875.853.957,00
5	Belanja Tidak Terduga	33.000.000.000,00	57.017.058.976,30	61.437.036.067,91	72.041.601.355,94	75.674.738.041,60
6	Belanja Transfer	278.000.000.000,00	469.294.254.651,08	505.674.066.097,39	592.957.795.775,78	622.861.305.419,34
7	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		1.086.779.723.291,00	2.168.723.248.791,12	2.279.594.097.131,14	2.809.113.992.613,57	2.866.721.798.089,86

Sumber : 1. Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

B. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana

pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100 persen. total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2022–2026

(dalam jutaan rupiah)

JENIS DANA	PROYEKSI TA. 2022		PROYEKSI TA. 2023		PROYEKSI TA. 2024		PROYEKSI TA. 2025		PROYEKSI TA. 2026	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	97,12	2.816.815,23	75,14	3.295.778,28	76,09	3.595.777,76	73,23	4.058.298,49	75,27	4.381.720,11
PRIORITAS II	2,24	64.967,73	15,00	657.889,14	15,00	708.888,88	15,00	831.249,25	15,00	873.170,05
PRIORITAS III	0,64	18.562,21	9,86	432.260,19	8,91	421.259,22	11,77	652.113,90	9,73	566.243,53
JUMLAH	100	2.900.345,17	100	4.385.927,61	100	4.725.925,85	100	5.541.661,64	100	5.821.133,70

Sumber : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pencapaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung merupakan bentuk upaya mewujudkan arah Pembangunan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang terdiri dari bidang pangan, sandang dan papan, infrastruktur, kesehatan pendidikan, pariwisata, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, hingga agama dan budaya telah terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan daerah Kabupaten Badung. Dalam bidang kesehatan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Badung telah menjalankan program pengoperasian mobil ambulan desa yang didukung oleh tenaga ambulan desa, pengoperasian satu unit mobil layanan kesehatan perempuan (deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks). Sementara dalam sektor pendidikan, Pemerintah Daerah Badung telah memberikan sarana dan prasarana pendidikan kepada siswa SD Negeri di seluruh Kabupaten Badung. Dalam sektor pangan, sandang dan papan Pemerintah Daerah Badung telah memberikan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian yang diperuntukkan kepada para petani di wilayah Kabupaten Badung. Dalam aspek Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Badung telah menjalankan program jaminan sosial kematian dan kesehatan bagi penduduk di wilayah Kabupaten Badung serta pelayanan kepada penduduk yang memiliki keterbatasan/ penyandang disabilitas dan warga lanjut usia miskin.

Kapabilitas daerah Kabupaten Badung, dimanfaatkan dengan terukur agar pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Pembangunan yang berkembang di Kabupaten Badung dari aspek permasalahan pembangunan daerah salah satunya adalah transformasi ekonomi dan sosial masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam dimiliki yang perlu menjadi perhatian guna menyusun perencanaan lima tahun kedepan. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Badung telah dihadapkan pula dengan persoalan berkenaan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan khususnya terhadap pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Hal ini juga akibat dampak berkenaan dengan arus Urbanisasi adalah peningkatan jumlah penduduk yang perlu mendapat perhatian dimana pemerintah kabupaten terbebani dalam memberikan pelayanan yang memadai bagi warganya. Mencermati kondisi tersebut setiap daerah tanpa terkecuali secara maksimal menerapkan kerangka perencanaan maupun kebijakan pembangunan daerah yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dengan berbagai upaya melalui peran serta masyarakat dari pemerintah maupun pihak ketiga selaku pilar pembangunan yang secara bersama-sama untuk meningkatkan iklim investasi serta mendorong masyarakat untuk dapat mengambil peran yang maksimal.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Peran penting dari penetapan rencana strategi pembangunan daerah menjadi panduan dalam pencapaian tujuan – tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara berencana baik pada dokumen rencana pembangunan lima tahunan maupun dokumen perencanaan tahunan. Seperti yang disampaikan pada jurnal pembangunan daerah, edisi i, vol. 1, tahun 2013 Pembangunan berkelanjutan secara ideal harus melingkupi seluruh negara dengan sebuah rencana strategi untuk transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Penetapan rencana strategi merupakan suatu rangkuman dari rumusan – rumusan masalah daerah Kabupaten Badung yang menunjukkan suatu keadaan faktor–faktor penyebab ketidakberhasilan melakukan pencapaian tujuan rencana strategis pada perencanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Masalah pembangunan daerah merupakan suatu kesenjangan antara beberapa hal yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya dengan apa yang harus dihadapi saat ini hingga kurun waktu 5 tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah yang akan dipecahkan dalam suatu dokumen perencanaan merupakan kesepakatan hasil perumusan permasalahan dari suatu pendekatan teknokratik maupun partisipatif. Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan secara partisipatif yang diperoleh dari perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk kemudian dapat diarahkan pada kesesuaian program dan kegiatan beserta penganggaran yang berdampak dari kerangka acuan batasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga pemetaan permasalahan pembangunan harus disusun dalam agenda pemecahan masalah dalam bentuk program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun sesuai dengan tahun perencanaan penetapan pencapaian tujuan daerah.

Adapun Permasalahan pembangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Badung saat ini diantaranya :

1. Keberlanjutan sektor pelayanan dasar Pemerintah Daerah

Sejalan dengan program Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program peningkatan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berkomitmen menyediakan sarana prasarana layanan pendidikan mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan kebutuhan yang terjangkau tanpa adanya hambatan biaya dan lokasi bagi masyarakat Kabupaten Badung. Namun masih perlunya optimalisasi di bidang sarana prasarana pendidikan serta perlu peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam implemmentasi pemenuhan keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Badung masih memerlukan penguatan dan optimalisasi kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan

pendidikan non formal. Kualitas layanan pendidikan menyangkut kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Kabupaten Badung, optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, serta jumlah ketersediaan Sekolah baik jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Badung. Kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator dalam perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah, sehingga semakin baik kualitas pendidikan maka kualitas SDM di daerah tersebut pun akan semakin tinggi.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi tiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat tercermin dari meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) menjadi 75 Tahun, Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 85 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi 2.99 per 1000 kelahiran hidup, Persentase Prevalensi kekurangan gizi menjadi 10%, Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi 0,22%. Dalam mewujudkan hal tersebut telah dilakukan upaya berupa program dan kegiatan namun masih terdapat masalah-masalah seperti sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia, akses dan mutu pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat serta permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Termasuk masih ditemukan permasalahan terkait belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan belum optimalnya kualitas fasilitas kesehatan (FASKES) dan pelayanan kesehatan. Terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), masih rendahnya kesadaran konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO) masih menjadi permasalahan di Kabupaten Badung. Selain itu, terkait kualitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung, proporsi jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas) di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar yang mengacu pada luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dan masih terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas. Selain Fasilitas Kesehatan, Kuantitas tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Badung juga masih belum sesuai dengan standar tenaga kesehatan. Hal ini tentu harus mendapat perhatian agar kedepannya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung lebih optimal. Selain daripada itu, optimalisasi upaya dalam perlindungan perempuan dan anak, masih harus terus dilakukan serta sektor-sektor lain yang dapat mempengaruhi nilai dari kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung.

2. Trasformasi pelayanan Infrastruktur dasar pembangunan daerah

Penataan kembali secara bertahap Infrastruktur dasar dalam perencanaan pembangunan terhadap suatu kawasan merupakan sesuatu yang

tidak dapat terpisahkan satu sama lain, kawasan strategis dengan kompleksitas kegiatannya akan terus berkembang dari waktu ke waktu dan meliputi semua bidang pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur dasar sebagai piranti penunjang kebutuhan perkotaan maupun perumahan dalam proses mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Terhadap hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak persoalan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur. Pembangunan permukiman dan infrastruktur yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan pedesaan maupun perkotaan akan muncul persoalan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur, (b) ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, (c) perkembangan permukiman yang tidak terkendali pada daerah-daerah pengembangan non permukiman, dan (d) permukiman kumuh.

Sejalan dengan penyediaan dan pengelolaan jalan sebagai prasarana utama transportasi baik diperkotaan maupun pedesaan belum berjalan secara optimal, hal ini ditandai dengan munculnya masalah klasik seperti kemacetan dan belum optimalnya amenities perjalanan ditengah pertumbuhan pergerakan transportasi yang cukup pesat. Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Badung cukup signifikan dari 589.000 jiwa pada 2013 menjadi 633.500 jiwa pada tahun 2017 (Kabupaten Badung dalam angka 2014 dan 2019), bertumbuhnya jumlah penduduk dengan porsi mendekati 50% dalam lima tahun terakhir sudah tentu sebanding dengan pertumbuhan kegiatan transportasi yang pada akhirnya menuntut peningkatan daya dukung jalan, salah satunya dengan kegiatan pembangunan koridor jalan baru. Pelayanan infrastruktur dasar terhadap pemenuhan kelengkapan kebutuhan penunjang fasilitas permukiman, keberadaan sanitasi yang baik dan layak merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan masyarakat, akan tetapi belum seluruh *stakeholder* memberi perhatian yang memadai terhadap sanitasi, baik dari kalangan pemerintah sendiri, kalangan dunia usaha maupun masyarakat, akibatnya sektor sanitasi menjadi sektor yang tertinggal jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP dalam *Asia Pacific MDGs Reaport* 2014, disampaikan bahwa akses sanitasi layak (air bersih, persampahan dan limbah), di Indonesia masih menempati angka 8 dari 10 negara di Asia Tenggara dan termasuk kategori lambat. Sehingga kondisi ini merupakan sebagai langkah awal bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam melaksanakan program pembangunan sanitasi permukiman baik perkotaan maupun desa.

Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat maupun daerah bergandengan tangan dengan masyarakat dan pihak swasta melakukan berbagai upaya antara lain dengan mencanangkan percepatan penanganan sanitasi yang melibatkan berbagai sektor sejak tahun 2010 dan terus berlanjut

hingga saat ini. Diharapkan melalui implementasi program maupun kegiatan yang berbasis sanitasi dapat terwujud target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. Selanjutnya dalam upaya pencapaian target daerah perlu melakukan percepatan implementasi pembangunan dan layanan sanitasi baik masalah pengelolaan persampahan, pelayanan air bersih maupun pengelolaan limbah dengan memperhatikan target sasaran dan tahapan pengelolaan program.

Menyikapi kondisi di wilayah Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata dunia dan etalase pariwisata nasional harus mempersiapkan infrastruktur sanitasi lingkungan agar citra pariwisata Kabupaten Badung meningkat dan memilikidaya saing dengan destinasi pariwisata daerah lainnya. Sebagai tren kedepan untuk industri pariwisata adalah *green tourism*, yang didukung oleh *green community* dan *good sanitation*, sehingga merupakan kewajiban pemerintah daerah memprioritaskan program sanitasi agar terhindar dari penurunan kualitas lingkungan. Serta aspek daya saing daerah yang didukung dari beberapa sektor potensi pembangunan daya saing daerah di Kabupaten Badung.

3. Tantangan perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Badung

Sesuai dengan data yang diterbitkan BPS Kabupaten Badung, menyebutkan bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2019 masih terlihat positif di angka 5,83%. Sampai dengan datangnya pandemi yang secara signifikan menyebabkan pergeseran asumsi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Badung yang sangat mengandalkan sektor jasa dan sektor akomodasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi pengangguran di Kabupaten Badung yang naik menjadi 6,92 % dari Tahun 2019 sebesar 0,48% yang menjadikan Kabupaten Badung menduduki posisi tertinggi ketiga di Provinsi Bali. Serta kondisi kemiskinan di wilayah Kabupaten Badung di Tahun 2019 sebesar 1,78% menjadi berangsur angsur naik ke angka 2,02%, meskipun demikian kondisi ini masih paling rendah di masa pandemi di seluruh Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi asumsi pertumbuhan ekonomi maupun dampaknya harus di sikapi dengan rancangan strategi yang baik sesuai visi dan misi daerah Kabupaten Badung. Potensi IKM dan UMKM di Kabupaten Badung dapat dimanfaatkan dengan maksimal, melalui pertumbuhan sektor industry mikro yang dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi mikro yang menggunakan sumber daya lokal untuk ekspor diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja (job creation) dalam jangka Panjang. (Richardson, 1991:14) menjelaskan model struktur perekonomian suatu daerah dibedakan atas dua sektor; (1) Sektor basis, yaitu kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Daerah secara

tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengeksport barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor 11 ekonomi ke daerah lain, (2) Sektor non basis, yaitu kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.

Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah Kabupaten Badung dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam optimalisasi sasaran-sasaran ekonomi daerah Kabupaten Badung, selain juga sebagai fasilitator, pemerintah daerah Kabupaten Badung dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat). Hal ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan pergeseran terhadap aktivitas di sektor perekonomian. Tantangan berikutnya adalah tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dengan memberdayakan seluruh aspek pertumbuhan ekonomi mikro sebagai motor penggerak roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Berbagai badan keuangan dunia memperkirakan pandemi Covid-19 akan menyebabkan kontraksi perekonomian dunia sebesar -2,0% sampai 2,8% pada 2020, dari sebelumnya tumbuh sebesar rata-rata 2,9% pada 2019. Pada saat yang sama, pandemi Covid-19 diperkirakan juga akan mengurangi arus perdagangan dan investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas pasar keuangan dunia hingga 215%. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian global pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan tidak kurang 195 juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan dan antara 420 sampai 580 juta orang jatuh pada jurang kemiskinan

Begitu juga di bidang sosial, pandemi yang terjadi bukan hanya memperuncing pertentangan, namun juga terbukti bisa memicu konflik sosial di suatu daerah. Hal ini menjadi perhatian bagi komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk tetap bersinergi menggerakkan sumber daya dalam pengantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi pasca kondisi pandemi. Serta merencanakan kegiatan strategis dalam proses pemulihan pasca pandemi sesuai arah dan tujuan visi dan misi daerah Kabupaten Badung.

4. Pemenuhan kebahagiaan masyarakat dalam Pelayanan Publik dan pemerintahan umum

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya kependudukan dapat dilihat dari peran partisipatif aktif seluruh komponen pembangunan daerah, yang mampu menumbuhkan suatu daya saing daerah. Salah satunya hal ini dapat dilihat dari kualitas pemenuhan indikator Indeks

Pembangunan Manusia yaitu indikator Kesehatan, indikator tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pemerintah Kabupaten Badung sampai dengan capaian RPJMD Periode 2016 – 2021 telah membawa angka IPM Kabupaten Badung bergerak dari angka 79,80 sampai pada 81,60 di Tahun 2020. Data ini mencerminkan bahwa pergerakan indikator yang mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di Kabupaten Badung menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Badung.

Keberhasilan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Badung merupakan perwujudan konsep Good governance, yakni proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan public good and service. Agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang baik menuntut adanya "alignment" (koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas dan etos kerja dan moral yang tinggi). Dengan demikian penerapan konsep "good governance" dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tantangan tersendiri. Termasuk keterlibatan masyarakat Kabupaten Badung dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Paradigma The New Public Service (NPS) menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai customer tetapi sekaligus sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (birokrasi publik). Pelayanan administrasi publik harus dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan sumber-sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Perlunya penciptaan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang dominan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Badung. Secara substansial untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di perlukan produk-produk hukum daerah yang sesuai perkembangan lingkungan eksternal dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik berperan mulai dari merumuskan kriteria pelayanan, cara pemberian pelayanan, mengatur keterlibatan masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pemetaan komponen permasalahan yang dihadapi daerah Kabupaten Badung ke dalam seluruh program dan kegiatan prioritas daerah merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan daerah dicanangkan berdasarkan analisis permasalahan dasar dari fenomena pembangunan daerah

Kabupaten Badung. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan analisis data-data permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan perumusan tujuan dan sasaran sesuai prioritas daerah Kabupaten Badung.

Permasalahan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 meliputi :

1. Permasalahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih diperlukan aksesibilitas pembangunan gedung sekolah negeri khususnya pada daerah yg padat penduduk.
 - b. Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal lainnya.
 - c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik.
 - d. Menurunnya kondisi sarana prasarana pendidikan.
2. Permasalahan Bidang Kesehatan
 - a. Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan belum merata.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
 - c. Masih terdapatnya kasus stunting.
 - d. Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV AIDS dan COVID 19) serta kecenderungan meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - e. Masih perlunya peningkatan kemandirian masyarakat berperilaku hidup bersih dan Sehat
 - f. Belum optimalnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.
3. Permasalahan Pelayanan Infrastruktur Daerah
 - a. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
 - b. Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata dan akses antar wilayah.
 - c. Belum optimalnya penanganan timbulan sampah dan tempat pengelolaan sampah terpadu.
 - d. Pengembangan Kawasan permukiman tidak didukung dengan penyediaan drainase yang terintegrasi dan memadai.
 - e. Belum terlayannya kawasan perkotaan maupun kawasan permukiman padat secara memadai untuk penanganan air limbah dengan IPAL.
 - f. Menurunnya kualitas lingkungan akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk.
 - g. Belum optimalnya pelayanan penyediaan air bersih.
 - h. Menurunnya ruang tutupan lahan hijau.

- i. Masih Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau publik.
 - j. Terbatasnya ketersediaan bendung untuk menjaga suplai air saluran irigasi dan petak sawah.
 - k. Belum optimalnya lahan parkir di luar badan jalan pada kawasan padat aktifitas.
4. Permasalahan Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran.
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
 - d. Belum optimalnya upaya pencegahan dampak negatif informasi internasional yang dapat mempengaruhi Ideologi masyarakat.
 - e. Adanya paham radikal yang berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama.
 - f. Masih perlunya penguatan demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan Pancasila.
 - g. Masih tingginya penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika.
5. Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan
- a. Menurunnya kualitas sumber daya pertanian yang dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing.
 - b. Bertambahnya alih fungsi lahan pertanian.
 - c. Belum optimalnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
 - d. Belum optimalnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian.
 - e. Belum optimalnya adopsi inovasi dan pemanfaatan teknologi pertanian.
 - f. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
6. Permasalahan Bidang Kependudukan, KB, Perlindungan Anak Dan Perempuan
- a. Belum optimalnya angka kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) untuk pasangan usia subur dan masih adanya kejadian pernikahan remaja
 - b. Belum optimalnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan kegunaan administrasi kependudukan.
 - c. Masih adanya tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Trafficking.
 - d. Belum maksimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
7. Permasalahan Pengelolaan Iklim Investasi dan Potensi Ekonomi
- a. Belum optimalnya fungsi digitalisasi daya saing produk, mutu dan packaging untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.

- b. Belum optimalnya akses permodalan dan promosi produk sektor UMKM.
 - c. Belum optimalnya kepemilikan legalitas kegiatan UMKM.
 - d. Meningkatnya potensi pengangguran terbuka.
- 8. Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum
 - a. Masih rendahnya indeks profesional Aparatur Sipil Negara
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya penguatan lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa
 - d. Belum optimalnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang didukung oleh teknologi informasi
- 9. Permasalahan Pemantapan Potensi Daya Saing Daerah
 - a. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi destinasi Daya Tarik Wisata (DTW).
 - b. Perlunya pemasaran dan promosi pariwisata berkelanjutan yang didasarkan hasil kajian dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan industri pariwisata perlu ditingkatkan.
 - d. Belum optimalnya sinergi pertanian, perikanan, kelautan, UMKM dengan pariwisata.
 - e. Belum optimalnya peran lembaga adat dan tradisional sebagai wadah pelestarian adat, seni dan budaya.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu – isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Badung menggambarkan kondisi / perkembangan / peristiwa / *trend* yang berkenaan dengan lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung dan berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Isu Strategis itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan / bernuansa negatif.

Terhadap isu – isu strategis berupa kondisi, perkembangan, peristiwa, dan *trend* yang berkenaan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung merupakan skala prioritas penanganan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber meliputi , (1) isu strategis yang menyangkut dinamika nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Badung. (2) Isu strategis sesuai kebijakan Pembangunan Daerah sekitarnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Badung, (3) Isu strategis sesuai kebijakan pembangunan daerah yang menyangkut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung 2005-2025, isu strategis sesuai analisa situasi dan kondisi ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana ,dan pemerintahan umum maupun sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Sehingga berkenaan dengan hal tersebut kiranya isu strategis yang dapat dijadikan prioritas dalam penyusunan RPJMD didasari atas kriteria-kriteria mendasar diantaranya : (1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (2) menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; (3) Memberikan dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat; (4) Mempunyai daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (5) Merupakan skala prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis daerah Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 meliputi :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Dalam dokumen SDGs, terdapat 4 pilar keberlanjutan menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola yang saling berhubungan. Setelah dikembangkan dalam 17 goals dan berbagai penjabaran pada tingkat aksi, substansi SDGs lalu diintegrasikan ke dalam dokumen resmi pemerintah RI melalui RPJP dan RPJMN 2020-2024. Upaya integrasi sangat penting sebagai basis penganggaran, program/kegiatan hingga monev dan pengendalian pembangunan nasional maupun daerah. Dasar konsepsi dan regulasi tersebut menjadi acuan dan kerangka dalam membangun indeks daya saing daerah berkelanjutan (Indeks DSDB)

Dalam laporan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) Tahun 2020 menyebutkan bahwa Kabupaten Badung merupakan kabupaten berdaya saing paling tinggi dengan skor 68.30. Sebagian besar pilar menunjukkan derajat kinerja optimal (ekonomi tangguh 79.22, sosial inklusif 69.12, dan tata kelola 76.39), kecuali pilar lingkungan lestari yang berada pada level sedang (52.04). Keunggulan Badung pada pilar ekonomi merupakan sumbangan dari kinerja keuangan daerah, ekosistem investasi, dan infrastruktur ekonomi. Sementara pada pilar sosial terlihat dukungan yang baik dari variabel penyerapan tenaga kerja dan kondusivitas keamanan, serta layanan publik dan kebijakan ramah lingkungan pada pilar tata kelola pemerintahan. Sementara pada pilar lingkungan, meski memiliki kualitas lingkungan hidup tinggi (70.44) dan pengelolaan SDA yang tinggi pula (82.24),

Badung perlu memperhatikan aspek resiliensi lingkungan yang didukung alokasi anggaran untuk mitigasi bencana.

Sesuai tatanan kondisi saat ini isu lingkungan menempati posisi yang sangat strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi permintaan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Satu factor penting untuk mencapai keberlanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan factor lingkungan. Terhadap penanganan yang tepat mengenai permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari proses pembangunan seutuhnya menjadi tugas dan kewenangan pemerintah. Tingginya intensitas kegiatan masyarakat di Kabupaten Badung berdampak pada antara lain bertambahnya luas lahan terbangun dan meningkatnya produksi polusi, kondisi ini menggambarkan kemampuan daya tampung Kabupaten semakin menurun sebagai dampak dari seluruh rangkaian kegiatan. Terhadap kondisi tersebut, diperlukan konsep perencanaan pembenahan dan penambahan daya dukung kabupaten pada titik – titik lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka kota hijau walaupun luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kabupaten Badung cenderung mengalami Peningkatan dan masih jauh dari target nasional sebesar 30% dari luas kota secara keseluruhan. Selain daripada hal tersebut potensi permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian di Kabupaten Badung adalah masalah sampah. Jumlah volume sampah dan produksi sampah di kabupaten Badung semakin meningkat dengan produksi sampah per hari nya sudah mencapai 5.525,0 m³ dan ini baru bisa ditangani hanya 1.239,3 m³ per hari di Tahun 2020, sehingga penyediaan sarana prasarana persampahan perlu di dukung dan di lengkapi secara lebih memadai. Melalui pengelolaan sampah dengan pola 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) yang terus di tingkatkan dan lokasinya menyebar di masing-masing desa/kelurahan, dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

2. Potensi Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung

Pilar ekonomi Kabupaten Badung Badung menempati peringkat satu dengan capaian skor 79.22 sesuai dengan laporan IDSDB Tahun 2020. Nilai indeks ini berada di atas rerata ketangguhan ekonomi secara nasional. Keunggulan tersebut semakin menegaskan Badung sebagai salah satu kabupaten dengan kinerja ekonomi yang baik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi tangguh merupakan penopang daya saing daerah berkelanjutan Kabupaten Badung. Kabupaten Badung memiliki potensi ekonomi dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Badung memiliki enam sektor basis yang mencerminkan variasi sumber pertumbuhan yang beragam. Badung Selatan memiliki kekuatan di sektor pariwisata, sementara Badung Utara dan Tengah memiliki keunggulan sektor pertanian dalam menopang perekonomiannya.

Dari sisi daya dukung, dengan nilai 99.87, Kabupaten Badung memiliki sumber-sumber ekonomi sebagai penopang utama dalam pembangunan. Kabupaten Badung juga memiliki kapasitas fiskal besar yang didukung penerimaan PAD yang tinggi dari sektor Pariwisata (85 persen). Namun, melihat situasi terkini, ketergantungan Kabupaten Badung secara kuat kepada sektor Pariwisata memicu terjadinya declining ketika terjadi pandemi. Pandemi COVID-19 yang merebak di Badung memicu kelumpuhan total pada sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Badung memiliki kerentanan yang mudah terguncang. Pertumbuhan ekonomi berkontraksi ke zona pertumbuhan negatif (-10.98). Penciptaan sumber-sumber ekonomi baru merupakan solusi yang dibutuhkan Kabupaten Badung untuk menciptakan ketahanan ekonomi.

Dengan menetapkan sasaran pembangunan daerah di harapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan termasuk didalamnya sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah, namun untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena secara umum pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki daerah Kabupaten Badung.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Badung dipengaruhi oleh keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang tersedia. Sehingga pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/ masyarakat / daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Kabupaten Badung memiliki potensi unggulan andalan khususnya industri pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kabupaten Badung yang terlihat dari besarnya kontribusi industri pariwisata terhadap pembentukan pendapatan asli daerah dan PDRB serta besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri pariwisata, sektor pariwisata sesungguhnya sangat labil dan rentan dengan isu keamanan, wabah penyakit, musibah alam dan perekonomian . Namun demikian Kabupaten Badung masih memiliki potensi unggulan lainnya yaitu usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah / industri kerajinan rakyat serta pertanian dalam arti luas.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dikatakan ideal apabila antara sektor primer, sekunder dan tersier berada dalam komposisi yang pas atau seimbang sehingga antara satu sektor dengan sektor lainnya dapat saling mendukung. Apabila suatu sektor mengalami kemunduran maka ekonomi wilayah tersebut masih dapat berjalan karena masih ditopang oleh sektor lainnya. Perekonomian Kabupaten Badung secara garis besar ditunjang oleh

tiga sektor ekonomi utama yaitu pertanian dalam arti luas, industri kerajinan serta industri jasa pariwisata. Dari ketiga sektor utama perekonomian utama tersebut pariwisata memberikan kontribusi terbesar dan menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang perlu diarahkan agar dampaknya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin, sehingga daya beli mereka tetap terjaga dan tidak tergerus inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten tergantung salah satunya pada kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Badung, hal ini harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat agar faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain :

- a. Kebangkitan Pembangunan Desa, jika desa maju, masyarakat desa akan banyak belanja ke Kota, sehingga arus ekonomi diperkotaan semakin kencang.
- b. Ekonomi di perkotaan/kabupaten sangat dipengaruhi faktor arus uang yang beredar dari perdagangan dan industri, salah satu faktor pendorong utamanya adalah investasi.
- c. Bergesernya pola bisnis konvensional menjadi digital, sehingga pertumbuhan pengusaha mikro dan kecil melalui media digital tumbuh sangat cepat dengan jumlah yang sangat besar, hal ini mengakibatkan pedagang tradisional – konvensional mengalami penurunan transaksi baik jumlah produk maupun perputaran uang.
- d. Munculnya pembisnis baru yang kreatif dan inovatif yang tumbuh pesat penambah pemain di dalam pasar dimana laju pertumbuhan konsumen tidak secepat pertumbuhan usaha sejenis.
- e. Proyek-proyek besar yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat menambah jumlah transaksi bisnis dan uang yang beredar di suatu daerah karena aktivitas belanja barang dan jasa, hal ini berperan besar menggerakkan laju roda perekonomian
- f. Kurangnya program/kebijakan sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan sentra industri kecil dan menengah untuk memproduksi produk-produk turunan maupun hasil pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan membantu putaran transaksi dan uang hanya beredar pada korporasi– korporasi besar yang cenderung membawa arus uang tadi ke daerah lain bahkan ke luar negeri, sehingga dampak aktifitas Industri-

industri besar di suatu daerah tidak membawa perubahan ekonomi secara signifikan pada daerah tempatan.

Banyak faktor tersebut di atas yang mempengaruhi arus ekonomi suatu daerah, dan pada akhirnya arus ekonomi akan optimal jika rata-rata SDM kita mampu mengimbangi kuantitas dan kualitas keahlian/skill pada pasar global. Dalam jangka menengah dan jangka panjang,antisipasi yang perlu dilakukan adalah berupaya melakukan diversifikasi atau pengembangan sektor ekonomi lainnya agar perekonomian daerah Kabupaten Badung tidak terlampaui tergantung dengan industri pariwisata, yang pada dasarnya amat rentan. Dalam jangka pendek, upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui terobosan yang dapat mendorong peningkatan investasi yang padat modal maupun padat karya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2014 mencapai 6,98%. Berikutnya pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,27%. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami peningkatan menjadi 6,79% pada tahun 2017 kembali turun menjadi 6,11% dan tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 6,75% sehingga secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2014 hingga 2018 bergerak turun.

Badung sudah memasuki bonus demografi sebesar 72,43% usia produktif; menanggung lebih sedikit dari penduduk yang usia non produktif ; jika bisa dimanfaatkan akan mengerakkan ekonomi secara masif akan dapat mendongkrak kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan; karena pandemi, menjadi tantangan baru dan bonus ini biasanya muncul 30 tahun berikutnya; peluang yg cukup besar.

3. Tantangan infrastruktur dalam arti luas

Ketersediaan Infrastruktur dasar daerah merupakan sistem yang mendukung kegiatan masyarakat, dan merupakan komponen dasar pembangkit perekonomian maupun aspek utama di dalam pemerataan pembangunan serta menopang kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan talenta ekonomi masyarakat sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh pemangku kebijakan, didalamnya meliputi jaringan telekomunikasi, transportasi, listrik, sumberdaya air, sanitasi dan teknologi informasi. Bagi masyarakat perkotaan, keberadaan infrastruktur yang modern sangat dibutuhkan sehingga merupakan tantangan tersendiri ke depan karena penyediaannya akan terbentur pada kapasitas keuangan daerah. Pengembangan infrastruktur kota harus memenuhi prinsip fungsionalitas terutama dalam mendorong peran kota sebagai penggerak ekonomi wilayah terutama sebagai elemen yang mendorong efek aglomerasi. Pertambahan penduduk kota yang semakin cepat akan berujung pada tingkat intensitas

aktivitas warga kota yang semakin intensif, sehingga memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ruang dan pemenuhan kebutuhan berbagai macam infrastruktur dan fasilitas perkotaan.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian, kebutuhan akan sarana dan prasarana jalan semakin meningkat, apalagi dengan tumbuhnya kawasan wisata baru maupun pembangunan perumahan yang menuntut adanya akses jalan yang memadai. Keberadaan kondisi infrastruktur jalan kabupaten sampai tahun 2021 masih dalam katagori mantap dengan kuantitas 98,91% kondisi baik atau sepanjang 676.487 kilometer. Namun sejalan dengan usia konstruksi keberadaan kondisi jalan diprediksi terus mengalami penurunan dari tahun 2021, dari total panjang jalan 683.902 kilometer dengan katagori jalan kabupaten, sekitar 0,885% dalam kondisi rusak ringan, atau sepanjang 6,055 kilometer dan katagori rusak berat hanya 0,199%, atau sepanjang 1,360 kilometer. Sehubungan dengan hal tersebut sehingga dalam implementasinya perlu peningkatan pemeliharaan kondisi jalan untuk tetap mempertahankan kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Badung. Disisi lain buruknya kualitas infrastuktur berimbas pada permasalahan yang di rasakan semakin meningkat belakangan ini menyangkut kemacetan lalu lintas yang mehambat aktivitas perokonomian masyarakat serta menyebabkan kerugian berdampak pada materi, banjir, belum lagi permasalahan polusi yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Penyediaan transformasi masal yang representatif, serta pembangunan jalan bawah tanah (*underpass*) kedepan masih tetap diperlukan untuk mengurangi kemacetan. Konsep pengembangan moda trasformasi modern *Mass Rapid Transit* (MRT) dengan jenis monorel sudah di inisiasi oleh pemerintah Kabupaten Badung. Mengurangi masalah transportasi di antara nya dapat di lakukan dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai dan menggunakan teknologi modern agar dapat meminimasi kebutuhan ruang, utama nya di pusat perkotaan. Disisi lain diperlukan satu langkah terobosan berkenaan dengan regulasi terkait angkutan umum, kendaraan pribadi maupun perpikiran yang dapat mengurai permasalahan transportasi. Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara komprehenshif mengatur aspek - aspek tersebut.

Kendala yang cukup berat dalam pemenuhan infrastruktur dasar kota adalah drainase serta penataan sungai dan irigasi. Keberadaan drainase masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar pelayanan kota, sehingga harus ada upaya menempatkannya sebagai salah satu prioritas karena vital perannya sebagai sarana pengendali banjir kota. Demikian halnya dengan penataan sungai beserta sempadannya. Aspek lain dari sungai adalah perlunya perlindungan dari pencemaran oleh limbah dan sampah yang merupakan ancaman serius di Kabupaten Badung. Masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya fungsi jaringan irigasi dan bercampurnya saluran irigasi dengan

drainase. Tantangan lain dalam bidang sumberdaya air adalah pengendalian penurunan muka air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik, dan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan, memperhatikan penggunaan sumber daya, dan meminimalisasi dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Persoalan yang muncul pada kawasan cepat tumbuh adalah seringkali mendorong semakin membesarnya emisi karbon di kota yang dampaknya akan mengganggu lingkungan melalui perubahan cuaca yang ekstrem. Pertumbuhan kota yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meluasnya lahan-lahan yang digunakan untuk menampung pertumbuhan kota, sehingga memicu semakin terbatasnya ruang-ruang terbuka hijau, polusi udara, air dan pengelolaan lahan. Berkurangnya lahan pertanian untuk kegiatan sektor lain (khususnya perumahan, penunjang pariwisata), menyebabkan berkurangnya potensi Ruang Terbuka Hijau publik. Pertumbuhan kota yang diiringi pertumbuhan penduduk yang besar juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan hidup perkotaan. Padahal semakin berkembang dan maju suatu kota, seharusnya tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas Kabupaten Badung di masa depan, menjadi kota yang berkembang & maju diiringi tingkat livability yang tinggi. Tantangan paling konkret dalam aspek lingkungan hidup di Kabupaten Badung adalah potensi pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri. Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, dan lahan kosong di masyarakat. Perlu upaya lebih akseleratif dalam meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah ini khususnya dalam rangka mengejar standar pelayanan minimal perkotaan. Tantangan lainnya dalam bidang lingkungan hidup adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, dan peningkatan mitigasi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana.

Sejalan perkembangan perilaku sosial masyarakat dengan tuntutan hidup modern sudah tentu perlu didukung dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya terkait dengan teknologi informasi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Saat ini Kabupaten Badung masih perlu penataan dalam implementasi pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengelola tatanan pemerintahan daerah secara optimal melalui *e government*. Khususnya penerapan teknologi informasi pada tatanan pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreatifitas, serta meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

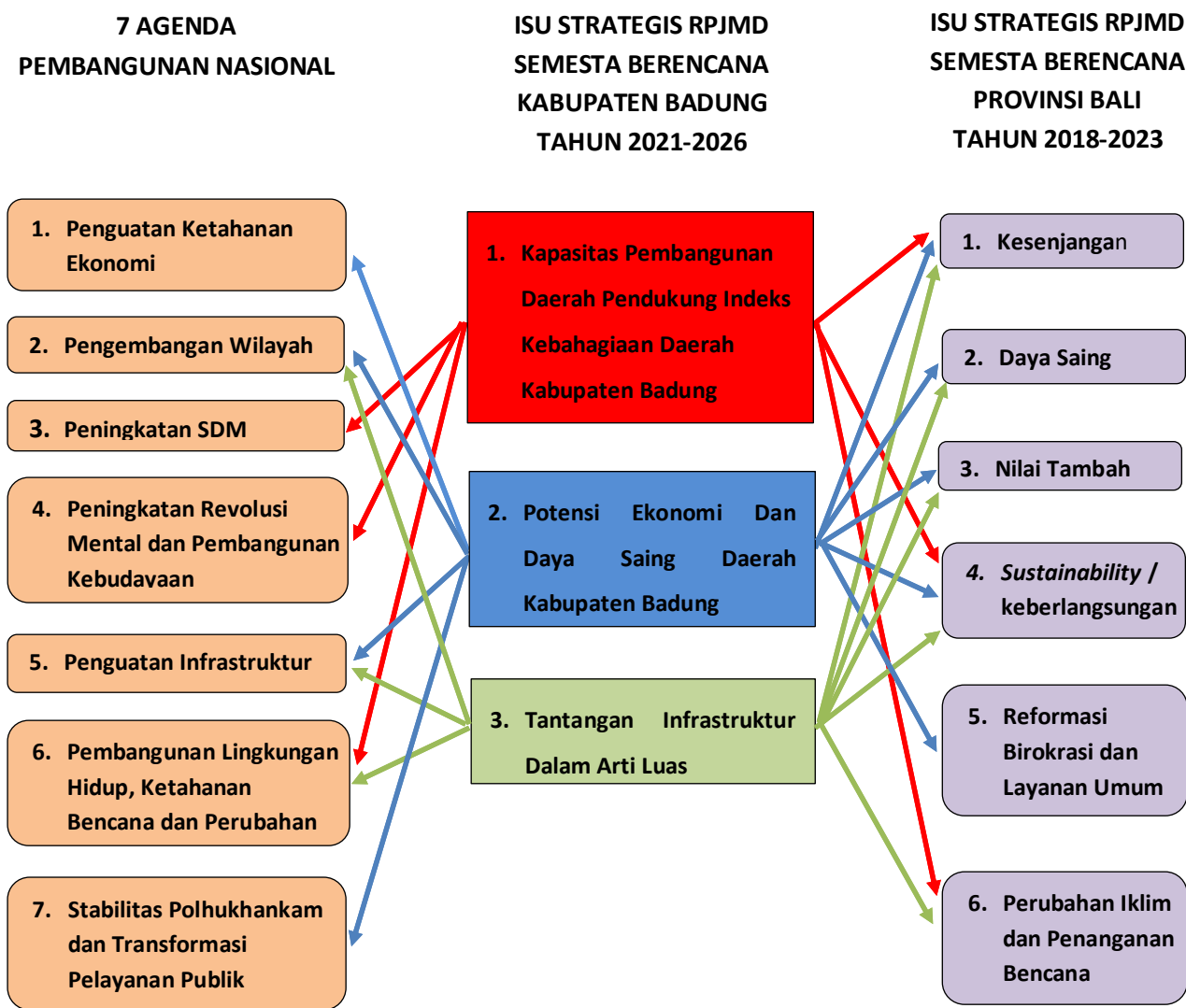
Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi , serta membentuk jaringan sistem management dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi kesemua informasi dan layanan public yang harus di sediakan oleh pemerintah. Disisi lain masyarakat pengguna teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar yang jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Pada sisi pemerintah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah terutama dalam pengelolaan keuangan. Namun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik hingga saat ini masih dirasakan belum optimal.

Keselarasan dan keterkaitan isu-isu strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 dengan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan isu-isu strategis RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 ditampilkan pada Gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1

Keselarasan Dan Keterkaitan Isu-Isu Strategis RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 Dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Dan
RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023



4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi salah satu dasar pedoman perencanaan dan nantinya terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip semesta berencana dan berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan, kewajaran, dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.

KLHS terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Badung.
4. Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Badung.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016

hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

ITPB Kabupaten Badung pada dasarnya mengacu pada ITPB berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 yang dioverlay dengan target capaian kinerja Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No.13 tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021. Permendagri No.7 tahun 2018 memiliki 352 Indikator, yang 220 diantaranya merupakan wewenang Kabupaten / Kota, sementara itu RPJMD Kabupaten Badung memuat lebih dari 200 indikator kinerja daerah. Dari keduanya kemudian ada sebanyak 154 indikator TPB yang bersesuaian, dan akan dianalisis terhadap kondisi pencapaian kerjanya.

Indikator hasil overlay selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB). Jumlah ITPB ini ada sebanyak 154 indikator, yang selanjutnya dianalisis capaian kerjanya. Analisis capaian ITPB ini bertujuan untuk mengetahui apakah selama periode RPJMD sebelumnya (2016 - 2021) Pemerintah Kabupaten Badung sudah berhasil mencapai target nasional untuk masing-masing indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil/capaian ITPB ini sekaligus menjadi dasar dalam penentuan isu strategis serta dalam memberikan rekomendasi dan menyusun skenario di dalam RPJMD periode selanjutnya (2021 - 2026) dalam upaya pencapaian target nasional indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Berdasarkan Indikator pencapaian yang tidak tercapai seperti pada tabel diatas serta berdasarkan hasil konsultasi public dalam penyusunan KLHS RPJMD, maka daftar isu strategis yang berhasil dirumuskan adalah sebagai berikut;

1. Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Mitigasi Bencana.
5. Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Transportasi.
8. Pengembangan Potensi Ekonomi sebagai antisipasi kejadian Pandemi/ Re-Pandemi.

Penghitungan atas analisis Kondisi Pencapaian Indikator TPB berdasarkan Perangkat Daerah pada tahun 2030, kemudian dilakukan proyeksi pencapaian ke tahun 2030 sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis kondisi pencapaian TPB di masing – masing Perangkat Daerah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Analisis Pencapaian Indikator TPB di Tiap Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Indikator				
	Total Data Indikator yang dibutuhkan	Tercapai	Tidak Tercapai Tanpa Upaya Tambahan	Tidak Tercapai Harus dengan Upaya Tambahan	Tidak Ada Data
TDUT (Tidak Tercapai, Dengan Upaya Tambahan), TTUT (Tidak Tercapai, Tanpa Upaya Tambahan), NA (Tidak ada data)					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	5	1		
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	3	3			
Bagian Hukum dan HAM Setda	1	1			
Bagian Organisasi Setda	1			1	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	8		3	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5			
Dinas Kesehatan	30	27		2	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	4	3		1	
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1				1
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1	1			
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	4	1	2	
Dinas Pariwisata	3	2	1		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	5	1		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung /BP DAS Unda Anyar	1	1			
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	11	10	1		
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	13	2	1	1

Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jumlah Indikator				
	Total Data Indikator yang dibutuhkan	Tercapai	Tidak Tercapai Tanpa Upaya Tambahan	Tidak Tercapai Harus dengan Upaya Tambahan	Tidak Ada Data
TDUT (Tidak Tercapai, Dengan Upaya Tambahan), TTUT (Tidak Tercapai, Tanpa Upaya Tambahan), NA (Tidak ada data)					
Dinas Perhubungan	5	4		1	
Dinas Perikanan	4	3	1		
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13	8		5	
Dinas Pertanian dan Pangan	3	3			
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	4	1		
Dinas Sosial	15	9		3	3
Sekretariat DPRD Kabupaten Badung / Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1			1	
Total Data	154	119	9	20	6

Untuk alternatif skenario dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan hanya yang tidak tercapai pada tahun 2030 dan memerlukan upaya tambahan, serta disesuaikan dengan isu strategis yang telah dirumuskan.

Berikut merupakan alternatif skenario berdasarkan pengelompokan isu strategis :

1. Isu Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat atau Desa agar dapat mengelola dan memanfaatkan lahan yang dimiliki sebagai lahan pertanian dan perkebunan produktif namun juga dapat menjadi salah satu tujuan wisata / desa wisata. Dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (Peran pihak luar Perangkat Daerah)
- Mendorong bangkit dan kembangnya UMKM di bidang industry pengolahan, terutama industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

Masih terdapat gap atau kesenjangan antara beberapa penyedia jasa ekosistem dengan indeks kualitas rata-rata jasa penyediaan di Kabupaten Badung. Jasa air bersih, energi dan sumberdaya genetik merupakan jenis jasa lingkungan yang perlu ditingkatkan kualitas dan/atau kuantitasnya apabila isu ketenagakerjaan ini banyak memanfaatkan ketiga jenis jasa ini. Sementara itu,

agar dukungan dalam pengentasan isu ketenagakerjaan (diluar sektor pariwisata) ini dapat dijalankan tanpa membutuhkan biaya yang tinggi, maka alternatif yang dapat ditempuh adalah penyediaan lapangan kerja pada industri pengolahan yang berkaitan erat dengan jasa ekosistem pangan dan serat. Seperti pencaanangan agropolitan pada beberapa wilayah, mendorong dan/atau memberikan dukungan untuk kemajuan UMKM dibidang industri pengolahan kayu, atau mengintegrasikan antara wisata – agropolitan – agroindustri.

Isu ini sangat penting untuk menjadi perhatian dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung, karena berdasarkan proyeksi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator kemiskinan dan tenaga kerja, angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung pada tahun 2030 diproyeksikan meningkat. Proyeksi ini telah memasukkan kondisi pandemi covid19 dan dampaknya pada tahun berakhirnya SDG's.

2. Isu Kesehatan

- Penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan. Dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Sangat penting untuk disediakan penampungan atau sistem pengelolaan limbah berbahaya hasil dari produk Kesehatan.

Pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan bidang Kesehatan tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungan hidup yang menyertainya. Terdapat beberapa jenis jasa ekosistem dengan nilai indeks berada dibawah nilai batas yang dipersyaratkan. Artinya, pada jenis jasa ekosistem dengan nilai dibawah batas yang dipersyaratkan, maka harus dilakukan upaya tambahan dalam meningkatkan kualitas jenis jasanya jika di wilayah tersebut akan direncanakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kesehatan atau sebagai salah satu tempat pengolahan/ penampungan sementara limbah hasil dari produk kesehatan. Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta merupakan wilayah yang memiliki 3 jenis jasa ekosistem dibawah ambang batas rata-rata, sementara dua wilayah ini merupakan pusat aktifitas sektor wisata yang sangat padat. Penyediaan sarana kesehatan yang sangat memadai mutlak perlu dilakukan pada kedua wilayah ini mengingat wilayah ini sebagai salah satu pusat kegiatan, namun limbah–limbah berbahaya tidak boleh ditampung pada kedua wilayah ini, khususnya pada Kecamatan Kuta Selatan. Hal ini mengingat pada kedua wilayah ini, khususnya pada Kecamatan Kuta Selatan nilai indeks jasa ekosistem dalam pemurnian air dari limbah dan pemurnian tanah dari limbah berada dibawah batas rata-rata yang dipersyaratkan.

3. Isu Pendidikan

- Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan / pendidikan keterampilan luar sekolah

Skenario ini perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lahan, karena pelaksanaan skenario ini dapat memicu menurunnya daya dukung dan daya tampung lahan jika terjadi *urban sprawl* pada wilayah-wilayah pusat pengembangan pendidikan.

4. Isu Mitigasi Bencana

- Pembangunan sarana dan prasarana peringatan dini dan evakuasi bencana
- Memasukkan kurikulum kebencanaan pada sekolah dasar

Pelaksanaan skenario ini harus disesuaikan dengan potensi resiko dan dampak terhadap lingkungan hidup yang menyertainya.

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Penguatan sumber daya perempuan melalui serangkaian kegiatan pelatihan yang bersifat massif dan terstruktur
- Pendampingan pada korban kekerasan baik perempuan dan anak

Pelaksanaan skenario ini tidak berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup.

6. Kualitas Lingkungan Hidup

- Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Memprioritaskan perlindungan ketahanan air dan tanah dalam pengembangan sektor pariwisata, pertanian / perkebunan dan manufaktur.
- Memprioritaskan sistem pemilahan, pengolahan/pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menekan timbulan sampah.

Pelaksanaan skenario ini dapat meningkatkan daya tampung air terhadap beban pencemar. Fungsi jasa ekosistem merupakan kondisi alamiah suatu bentang lahan dalam mendukung aktifitas diatasnya. Misalnya pada jasa kualitas udara pada Kecamatan Abiansemal berada dibawah ambang batas, artinya secara alami bentang lahan di Kecamatan ini tidak mampu membendung polutan dari aktifitas manusia, dengan kata lain diperlukan upaya tambahan dalam mengatasi polutan yang akan timbul. Dari 5 jenis jasa ekosistem, jasa penyediaan air bersih merupakan salah satu isu yang indeks jasanya berada dibawah batas yang dipersyaratkan. Penyediaan air bersih dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada kualitas namun juga kuantitas. Air bersih dalam konteks kualitas, kondisinya buruk pada Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Sementara itu dalam konteks kuantitas, penyediaan air bersih buruk pada Kecamatan Kuta Selatan. Pada Kecamatan Petang dan Abiansemal, meskipun jasa penyediaan air bersih memiliki indeks jasa dibawah batas yang dipersyaratkan, air pada dua kecamatan ini lebih banyak menjadi air larian permukaan serta terjadi kompetisi penggunaan air antara kebutuhan domestik dan pertanian. Kondisi koefisien aliran permukaan serta kompetisi penggunaan air ini yang menyebabkan indeks jasa penyediaan air bersih pada

Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang berada dibawah batas. Dalam pada itu, sistem subak di Kabupaten Badung perlu dipertahankan eksistensinya sehingga dapat mengatasi kompetisi penggunaan air antara domestik dan pertanian. Sementara itu, upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung dapat dilakukan pada Kecamatan dengan indeks penguraian limbah diatas batas, seperti pada Kecamatan Abiansemal, Kuta Utara dan Mengwi.

7. Transportasi

- Pengendalian pengembangan permukiman maupun perdagangan dan jasa di sepanjang jalur pembangunan/pemeliharaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan akibat rencana pembangunan jalan baru

Skenario ini sangat membutuhkan perhatian khusus dalam kaintannya dengan daya dukung air serta potensi resiko lingkungan hidup terutama erosi lahan yang dapat timbul akibat pelaksanaan kebijakan untuk pengentasan isu transportasi ini.

8. Pengembangan potensi ekonomi sebagai antisipasi kejadian pandemi/ re-pandemi

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat atau Desa agar dapat mengelola dan mengolah hasil pertanian & perkebunan menjadi sebuah produk dengan nilai guna & jual yang lebih besar
- Menyiapkan jaring pengaman sosial jika terjadi pandemi / re-pandemi atau bencana sosial/alam

Pelaksanaan skenario ini secara langsung pada dasarnya tidak terkait dengan kondisi lingkungan hidup manapun. Namun, jika isu pandemi ini telah menyebabkan efek domino pada setiap sendi kehidupan masyarakat, maka semua parameter kondisi lingkungan hidup akan terpengaruh bahkan dapat berdampak buruk.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Badung, diberikan rekomendasi kesimpulan dan saran yang dirumuskan dari 17 TPB yang diidentifikasi ada 6 TPB yang jumlah perlu diprioritaskan dalam pencapaiannya di masa yang akan datang yaitu;

- a. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan.
- b. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan.
- c. Tujuan 5 : Kesenjangan Gender.
- d. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
- e. Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
- f. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2016-2021;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan *Tri Hita Karana*”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Kebahagiaan** Adalah Suatu Keadaan Pikiran Yang Ditandai Dengan Kecukupan Hingga Kesenangan, Kepuasan Terhadap 10 (Sepuluh) Aspek Kehidupan Yang Eksensial Yang Meliputi Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan Rumah Tangga, Keharmonisan Keluarga, Ketersediaan Waktu Luang, Hubungan Sosial, Kondisi Rumah Sehat, Keadaanlingkungan, Kondisi Keamanan.
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 diwujudkan dalam bentuk :

a) Berdaulat dalam Bidang Politik

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) Berdikari dalam Bidang Ekonomi

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) Berkepribadian dalam Bidang Budaya

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;

- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
 - Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.
- 2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.
- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :
- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
 - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai “*dresta*”, yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **5 (Lima) Arahan Presiden.**
- 5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang terdiri atas :
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 - b) Pembangunan Infrastruktur;
 - c) Penyederhanaan Regulasi;
 - d) Penyederhanaan Birokrasi;
 - e) Transformasi Ekonomi.
- 5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.
- Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :
- a. Pro-Budaya/*Pro-Culture*
 - b. Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*
 - c. Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*
 - d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
 - e. Pro-Lingkungan/*Pro-Environment*

- f. Pro-Penegakan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan/*Pro Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Badung

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana														
NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,00 (Sangat Tinggi)	Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,45 (Tinggi)	82,00 (Sangat Tinggi)	82,00 (Sangat Tinggi)	83,00 (Sangat Tinggi)	83,50 (Sangat Tinggi)	84,00 (Sangat Tinggi)	84,00 (Sangat Tinggi)	Bakesbangpol
2	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> Dan <i>Clean Government</i> Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80,10	1 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel 2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1 Nilai Sakip 2 Opini BPK 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	77,90 (BB) WTP Data Tidak Tersedia 47,82 (Sangat Rendah)	78,75 (BB) WTP 3,10 (Baik) 52,70 (Sangat Rendah)	79,00 (BB) WTP 3,20 (Baik) 57,65 (Sangat Rendah)	79,50 (BB) WTP 3,30 (Baik) 62,57 (Rendah)	79,75 (BB) WTP 3,40 (Baik) 67,55 (Rendah)	80,10 (A) WTP 3,50 (Sangat Baik) 72,40 (Sedang)	80,10 (A) WTP 3,50 (Sangat Baik) 72,40 (Sedang)	Setda (Bag. Organisasi) Bappeda Inspektorat BPKAD Setda (Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan) Inspektorat Diskominfo Setda (Bag. PBJ) BKPSDM Diskerpus Diskes BKPSDM

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima Dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Tidak Tersedia	84,50 (Baik)	85,50 (Baik)	86,50 (Baik)	87,50 (Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)	Balitbang Setda (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kerjasama, Bag. Umum, Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Bag. Kesejahteraan Rakyat) BPBD Diskarmat Setwan Disdukcapil DPMPTSP Dishub DPMD Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang
3	Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat 2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM	Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban Kabupaten Peduli HAM	90,00 75.00 (Peduli HAM)	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada Terwujudnya Pemenuhan HAM	Persentase Penegakan Perda Dan Perkada Capaian Atas Kepedulian HAM	90,00% 81.29 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	90,00% 75.00 (Peduli HAM)	Satpol PP Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Setda (Bag. Hukum) Diskes DP2KBP3A DLHK Disperinaker

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
4	Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal	Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	85,00	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya	62,00%	67,00%	71,00%	76,00%	80,00%	85,00%	85,00%	Disbud Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang
5	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	81,67 (Sangat Tinggi)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,59 (Sangat Tinggi)	81,60 (Sangat Tinggi)	81,61 (Sangat Tinggi)	81,63 (Sangat Tinggi)	81,65 (Sangat Tinggi)	81,67 (Sangat Tinggi)	81,67 (Sangat Tinggi)	Disdikpora Setda (Bag. Perekonomian) Diskes
6	Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat	Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat 2. Persentase Pertumbuhan UMKM Menjadi Wirausaha 3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,00% 35,00% 12,30%	1. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat 2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha 3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	30,84% 5,00% 7,78%	6,00% 15,00% 8,78%	7,00% 20,00% 9,54%	8,00% 25,00% 10,48%	9,00% 30,00% 11,39%	10,00% 35,00% 12,30%	10,00% 35,00% 12,30%	Diskop UKMP Diskop UKMP Diskop UKMP
7	Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan	Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan	77,39	1. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Data Tidak Tersedia	76,39	76,64	76,89	77,14	77,39	77,39	Diskes DP2KBP3A Disperinnaker

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Sosial Yang Komprehensif		2. Tingkat Kemiskinan	1,65%	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%	2,00%	1,95%	1,80%	1,78%	1,65%	1,65%	Dinsos
8	Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	Persentase Pengembangan Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri	12,82%	1. Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	2,56%	2,56%	5,12%	7,69%	10,25%	12,82%	12,82%	Dispar Setda (Bag. SDA)
					2. Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,13%	31,37%	31,67%	31,83%	31,98%	32,27%	32,27%	Disperinaker DLHK
		2. Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	5,85%	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Data Tidak Tersedia	92,73 (Defisit)	94,73 (Defisit)	100,00 (Impas)	101,00 (Surplus)	101,50 (Surplus)	101,50 (Surplus)	Disperpa
						2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Data Tidak Tersedia	100,30	100,40	100,50	100,60	100,70	100,70	Diskan
			2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	29,00%	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	24,61%	24,50%	25,00%	26,50%	27,50%	29,00%	29,00%	Dispar
					2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,85 (Baik)	61,55 (Sedang)	61,64 (Sedang)	61,72 (Sedang)	61,81 (Sedang)	61,89 (Sedang)	61,89 (Sedang)	DLHK
9	Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi	Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan	3,7855 (Sangat Tinggi)	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,6945 (Tinggi)	3,7491 (Tinggi)	3,7582 (Tinggi)	3,7673 (Sangat Tinggi)	3,7764 (Sangat Tinggi)	3,7855 (Sangat Tinggi)	3,7855 (Sangat Tinggi)	Balitbang Bapenda DPUPR DPKP Diskes DPMPSTSP Disdukcapil

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Badung saat ini sebagai dampak Pandemi *Covid-19*, maka Kabupaten Badung akan menempuh strategi diversifikasi ekonomi, dimana perekonomian Badung tidak lagi bertumpu pada 1 (satu) sektor prioritas saja namun akan bertumpu pada 5 (lima) sektor yaitu (1) sektor pariwisata; (2) sektor pertanian dalam arti luas; (3) sektor sumber daya kelautan dan perikanan; (4) sektor industri dan *branding* Bali; dan (5) sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Secara komprehensif, strategi yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Untuk mendukung strategi pembangunan jangka menengah daerah, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai Tahun 2021-2026. Arah kebijakan Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 6.2.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan arahan yang lebih jelas dan nyata dari setiap strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung.

Program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi
Kabupaten Badung

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>		
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	1 Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan umat beragama oleh masyarakat 2 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama 3 Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama 4 Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama 5 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Umat Beragama dalam Menciptakan Toleransi Hidup Beragama
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance Dan Clean Government</i> Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	1 Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja 3 Meningkatkan Kualitas koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi Perencanaan pembangunan daerah 4 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 5 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi 6 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 7 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 8 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus Barang di Masing-masing Perangkat Daerah 9 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah 10 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah 11 Pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang berlaku 12 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi 13 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 14 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> 15 Meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 16 Melaksanakan Penatausahaan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur
	2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1 Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi 2 Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 3 Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi 4 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa 6 Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan yang baik 7 Meningkatkan layanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi (TI) 8 Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara (ASN) 9 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) 10 Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 11 Mempertahankan Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
	3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	1 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Berkeadilan 2 Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan di Bidang Pelayanan Publik 3 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 4 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk 5 Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik 6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan 7 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal yang baik dan bersih 8 Mensosialisasikan Layanan <i>Online</i> Perijinan dan Non Perijinan kepada masyarakat 9 Meningkatkan standar dan mutu pelayanan 10 Menyediakan Layanan Publik berbasis teknologi informasi 11 Meningkatkan kualitas pelayanan Set.DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi
		12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 13 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui Teknologi Informasi (TI) 14 Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 15 Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Bencana 16 Peningkatan sumber daya aparatur personil kebakaran dan non kebakaran yang melaksanakan pelayanan publik 17 Pencegahan bahaya kebakaran, gas beracun dan penyelamatan 18 Penanggulangan dan penyelamatan kejadian kebakaran dan non kebakaran 19 Peningkatan sarana prasarana penunjang penanganan kebakaran dan non kebakaran. 20 Mewujudkan pelayanan publik prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik , pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan <i>survey</i> kepuasan masyarakat secara berkala 21 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Permohonan Bantuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat	1 Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada	1 Meningkatkan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada 2 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah 3 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa 4 Mensosialisasikan Perda dan Perkada yang berlaku kepada masyarakat secara berkala baik melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i> 5 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke instansi terkait 6 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM)	2 Terwujudnya Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)	1 Implementasi Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) 2 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3 Meningkatkan perlindungan hak hak pekerja 4 Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan & penanggulangannya 5 Meningkatkan Kesadaran, Partisipasi, dan Ketaatan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	1 Mengoptimalkan Peran Lembaga Seni Sebagai Wadah Pelestarian Seni dan Budaya 2 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya 3 Memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya 4 Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kreativitas seni dan budaya 5 Memperkuat pemberdayaan komunitas seni dan budaya melalui pemerintahan desa dan kelurahan dalam koordinasi dan pembinaan camat 6 Mengembangkan budaya lokal sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata 7 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Pelestarian Seni dan Budaya
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang berkualitas	1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal 2 Pemerataan pendidikan yang berkualitas 3 Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyrakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik 4 Meningkatkan pendapatan perkapita 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing	1 Meningkatnya Persentase Koperasi sehat 2 Meningkatnya Jumlah Wirausaha 3 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1 Memberikan pendampingan dalam pengurusan perijinan 2 Memberikan pendampingan dan pengawasan kepada koperasi 1 Memberikan pendampingan dalam mengakses pemasaran digital melalui ekosistem digital 2 Memberikan pendampingan akses permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 1 Memfasilitasi/melaksanakan promosi utk pelaku usaha dalam memasarkan hasil produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2 Meningkatkan pengetahuan/kemampuan Sumber Daya Manusia untuk para pelaku usaha 3 Melaksanakan monitoring harga 4 Meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP) yang terstandarisasi
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat	1 Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat 2 Menurunnya Angka Kemiskinan	1 <i>Universal Heart Coverage</i> (UHC) 2 Meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya 3 Meningkatkan keluarga yang terencana 1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial 3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri 2 Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan	1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian 2 Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam 3 Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian 4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	1 Penataan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang berorientasi pada pertanian 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Menetapkan kelembagaan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) 4 Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata 1 Meningkatkan Jumlah pelaku dan produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam 2 Peningkatan Pengendalian Sumber - Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup 1 Meningkatkan Intesifikasi Pertanian 2 Melaksanakan Diversifikasi pertanian dan pangan 3 Melaksanakan Rehabilitasi pertanian 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian 5 Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pertanian 6 Penguatan jaringan pasar produk pertanian 7 Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 8 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan 9 Meningkatkan produksi perikanan 10 Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar hasil perikanan 11 Melestarikan sumber daya perikanan Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang Tinggi	1 Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	1 Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah 2 Peningkatan daya saing daerah berdasarkan riset dan teknologi 3 Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparansi dan akuntabel dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) 4 Mengembangkan ekosistem dan iklim penanaman modal yang kondusif 5 Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal

Tujuan	Sasaran	Strategi
		6 Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal 7 Inovasi Pelayanan di Bidang Kesehatan 8 Memanfaatkan pemanfaatan sistem Teknologi Informasi dalam penerbitan dokumen kependudukan 9 Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan Adminduk 10 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu 11 Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang 12 Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air 13 Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman 14 Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara 15 Meningkatkan proses perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing 16 Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 17 Peningkatan Kualitas Rumah Sehat 18 Mewujudkan Prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan memadai di Kabupaten Badung 19 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Badung

Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana						
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan umat beragama oleh masyarakat	Meningkatkan harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat	√	√	√	√	√
2 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama	Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan	√	√	√	√	√
3 Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan	√	√	√	√	√
4 Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan	√	√	√	√	√
5 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Umat Beragama dalam Menciptakan Toleransi Hidup Beragama	1 Melaksanakan pembinaan umat beragama dalam menciptakan toleransi hidup beragama	√	√	√	√	√
	2 Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	√	√	√	√	√
	3 Melaksanakan movev. kepada umat beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	√	√	√	√	√
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Penguatan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
	2 Penguatan Managemen Kinerja Perangkat daerah	√	√	√	√	√
2 Peningkatan Penerapan Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja	1 Penguatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)	√	√	√	√	√
	2 Penguatan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja	√	√	√	√	√
	3 Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi Program Kegiatan	√	√	√	√	√
3 Meningkatkan Kualitas koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi Perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√
	2 Melakukan pembinaan dan penilaian internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	√	√	√	√	√
	3 Meningkatkan Maturitas SPIP	√	√	√	√	√
5 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi	1 Melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√
	2 Melaksanakan pemeriksaan investigatif	√	√	√	√	√
	3 Melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN	√	√	√	√	√
6 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	√	√	√	√	√
7 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD sesuai dengan Peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√
8 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing PD	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	√	√	√	√	√
9 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	√	√	√	√	√
10 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah	1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah	√	√	√	√	√
	2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
11 Pelaksanaan program pembangunan sesuai regulasi yang berlaku	Pemantauan program pelaksanaan pembangunan pembangunan	√	√	√	√	√
12 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi	Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD	√	√	√	√	√
13 Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
14 Meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai assurance dan consulting	1 Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan diklat teknis pengawasan maupun ilmu pendukung	√	√	√	√	√
	2 Mengoptimalkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	√	√	√	√	√
15 Meningkatkan level kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah (APIP)	1 Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara mandiri (<i>self assesment</i>)	√	√	√	√	√
	2 Penjaminan kualitas (<i>Quality Assurance</i>) oleh BPK terhadap proses pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√	√
	3 Pengembangan secara mandiri (<i>Self Improvement</i>) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√	√
16 Melaksanakan Penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah tepat waktu dan sesuai dengan prosedur	Memanfaatkan teknologi untuk memperlancar penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
17 Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi	1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
18 Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Persandian serta Operasional Pengamanan Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	√
19 Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektora melalui Kerjasama dengan Instansi Terkait	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi	√	√	√	√	√
20 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Memberikan bimbingan teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada aparatur dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
21 Optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa	Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√
22 Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan yang baik	Melakukan pengawasan internal	√	√	√	√	√
23 Meningkatkan layanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi (TI)	Mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kearsipan	√	√	√	√	√
24 Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara (ASN)	Mendorong dan Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melanjutkan Pendidikan Formal	√	√	√	√	√
25 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	Memfasilitasi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural	√	√	√	√	√
26 Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	Memberikan Reward sesuai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	√	√	√	√	√
27 Mempertahankan Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)	Memberikan Punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan	√	√	√	√	√
28 Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkeadilan	1 Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	√	√	√	√	√
	2 Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	√	√	√	√	√
	3 Peningkatan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara, pelaksana pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	√	√	√	√	√
	4 Penyederhanaan prosedur perizinan terkait kemudahan berusaha	√	√	√	√	√
29 Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan di Bidang Pelayanan Publik	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
30 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
31 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk	Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√
32 Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik	Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√
33 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	√	√	√	√	√
34 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal yang baik dan bersih	1 Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal	√	√	√	√	√
	2 Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi	√	√	√	√	√
	3 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	√	√	√	√	√
35 Mensosialisasikan Layanan <i>Online</i> Perijinan dan Non Perijinan kepada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan	√	√	√	√	√
36 Meningkatkan standar dan mutu pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan	√	√	√	√	√
37 Menyediakan Layanan Publik berbasis teknologi informasi	Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media	√	√	√	√	√
38 Meningkatkan kualitas pelayanan Set.DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD	1 Meningkatkan kualitas SDM Set.DPRD	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan Set.DPRD serta koordinasi antar staf Set.DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan	√	√	√	√	√
39 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	√	√	√	√	√
	2 Meningkatnya pelayanan publik yang mudah cepat dan aman	√	√	√	√	√
40 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui Teknologi Informasi (TI)	Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui Teknologi Informasi (TI)	√	√	√	√	√
41 Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Interpretasi hasil rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah	√	√	√	√	√
42 Peningkatan Mutu Pelayanan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kearifan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih	√	√	√	√	√
43 Peningkatan sumber daya aparatur personil kebakaran dan non kebakaran yang melaksanakan pelayanan publik	Mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan non kebakaran	√	√	√	√	√
44 Pencegahan bahaya kebakaran, gas beracun dan penyelamatan	Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, gas beracun dan penyelamatan pada seluruh elemen masyarakat	√	√	√	√	√
45 Penanggulangan dan penyelamatan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan ≤ 15 menit	√	√	√	√	√
46 Peningkatan sarana prasarana penunjang penanganan kebakaran dan non kebakaran	Sarana dan prasarana pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian, pencegahan kebakaran	√	√	√	√	√
47 Mewujudkan pelayanan publik prima berbasis teknologi informasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik , pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, dan melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala	1 Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang handal dan profesional	√	√	√	√	√
48 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Permohonan Bantuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku	Memfasilitasi pelayanan administrasi permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku	√	√	√	√	√

Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)							
Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada		Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
2 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah		Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
3 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa		Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)	√	√	√	√	√
4 Mensosialisasikan Perda dan Perkada yang berlaku kepada masyarakat secara berkala baik melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i>		Mengupayakan pembinaan yang intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku		√	√	√	√
5 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat ke instansi terkait		Mengintensifkan Patroli wilayah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	√	√	√	√	√
6 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada		1 Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada 2 Melaksanakan Pembinaan kepada lembaga masyarakat dalam mentaati Perda dan Perka 3 Monev. ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
7 Implementasi Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)		Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	√	√	√	√	√
8 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Cakupan <i>continum of care</i> dengan melibatkan peran serta masyarakat	√	√	√	√	√
9 Meningkatkan perlindungan hak hak pekerja		Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	√	√	√	√	√
10 Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan & penanggulangannya		Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	√	√	√	√	√
11 Meningkatkan Kesadaran, Partisipasi, dan Ketaatan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal							
Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1 Mengoptimalkan Peran Lembaga Seni Sebagai Wadah Pelestarian Seni dan Budaya		Mengaktifkan dan Membina Lembaga Seni	√	√	√	√	√
2 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya		1 Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
3 Memperkuat keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya		Meningkatkan informasi kepada masyarakat atentang lomba yang dilaksanakan	√	√	√	√	√
4 Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kreativitas seni dan budaya		Memantapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kreatifitas seni dan budaya daerah yang terdapaat di masing-masing desa/ kelurahan	√	√	√	√	√
5 Memperkuat pemberdayaan komunitas seni dan budaya melalui pemerintahan desa dan kelurahan dalam koordinasi dan pembinaan camat		Memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan majelis alit, widyasabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat, seni dan budaya	√	√	√	√	√
6 Mengembangkan budaya lokal sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan pariwisata		Mendorong sektor-sektor pariwisata untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal	√	√	√	√	√
7 Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Pelestarian Seni dan Budaya		1 Melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya 2 Penyelenggarakan Diklat di bidang seni dan budaya 3 Penyelenggarakan lomba di bidang seni dan budaya 4 Mendata warisan seni dan budaya	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √

Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat							
Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal		Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mendorong program wajib belajar 12 tahun	√	√	√	√	√
2 Pemerataan pendidikan yang berkualitas		1 Pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan profesionalisme/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	√	√	√	√	√
		3 Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran	√	√	√	√	√
3 Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik		Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat yang berprestasi	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan pendapatan perkapita		1 Meningkatkan kesempatan kerja	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan produksi perindustrian	√	√	√	√	√
		3 Peningkatan produksi pertanian	√	√	√	√	√
		4 Peningkatan produksi perternakan	√	√	√	√	√
		5 Peningkatan produksi perikanan	√	√	√	√	√
		6 Penguatan permodalan UMKM	√	√	√	√	√
5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat		1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas),bayi,remaja dan lanjut usia (<i>continum of care</i>) dengan melibatkan peran serta masyarakat	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi	√	√	√	√	√
		3 Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	√	√	√	√	√
		4 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular	√	√	√	√	√
		5 Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan	√	√	√	√	√
		6 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√
		7 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
		8 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile</i>), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√
		9 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	√	√	√	√	√
		10 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis	√	√	√	√	√
		11 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (<i>evidence based</i>)	√	√	√	√	√
		12 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa KLB)/wabah	√	√	√	√	√
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat							
Strategi		Arah Kebijakan	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1 Memberikan pendampingan dalam pengurusan perijinan		Memfasilitasi perijinan usaha	√	√	√	√	√
2 Memberikan pendampingan dan pengawasan kepada koperasi		1 Meningkatkan pemberdayaan usaha koperasi	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kualitas koperasi	√	√	√	√	√
		3 Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan koperasi	√	√	√	√	√
3 Memberikan pendampingan dalam mengakses pemasaran digital melalui ekosistem digital		Meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM	√	√	√	√	√
4 Memberikan pendampingan akses permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)		Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan monev KUR	√	√	√	√	√
5 Memfasilitasi / melaksanakan promosi untuk pelaku usaha dalam memasarkan hasil produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)		Mengadakan promosi baik yang berskala lokal maupun nasional	√	√	√	√	√
6 Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk para pelaku usaha		1 Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk pelaku usaha	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
7 Melaksanakan monitoring harga	Melaksanakan monitoring harga	√	√	√	√	√
8 Meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP) yang terstandarisasi	Melaksanakan Tera/tera Ulang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UTTP)	√	√	√	√	√

Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 <i>Universal Heart Coverage</i> (UHC)	Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan	√	√	√	√	√
2 Meningkatkan keluarga yang terencana	Menurunkan angka usia pernikahan dini	√	√	√	√	√
3 Meningkatkan kualitas kompetensi pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya	Meningkatnya jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya	√	√	√	√	√
4 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
5 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial	Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	√	√	√	√	√
6 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√

Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang berorientasi pada pertanian	1 Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbasis Agrowisata	√	√	√	√	√
	2 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√
2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
3 Menetapkan kelembagaan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW)	1 Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola	√	√	√	√	√
	2 Menetapkan kelembagaan pengelola	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata	1 Penyusunan data kunjungan wisatawan	√	√	√	√	√
	2 Melaksanakan Analisa pasar pariwisata	√	√	√	√	√
	3 Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri	√	√	√	√	√
	4 Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media	√	√	√	√	√
	5 Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata	√	√	√	√	√
5 Meningkatkan Jumlah pelaku dan produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Meningkatkan kapasitas pelaku dan kualitas produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	√	√	√	√	√
6 Peningkatan Pengendalian Sumber - Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan	√	√	√	√	√
7 Meningkatkan Intesifikasi Pertanian	1 Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan	√	√	√	√	√
	2 Penerapan teknologi tepat guna	√	√	√	√	√
	3 Meningkatkan perlindungan lahan pertanian	√	√	√	√	√
8 Melaksanakan Diversifikasi pertanian dan pangan	1 Meningkatkan keanekaragaman produk komoditi pertanian	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	√	√	√	√	√
9 Melaksanakan Rehabilitasi pertanian	Peremajaan tanaman, ternak yang sudah tua dan rusak/mati	√	√	√	√	√
10 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan, peningkatan dan pemelihara sarana dan prasarana pertanian	√	√	√	√	√
11 Penguatan kelembagaan dan SDM pertanian	1 Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani	√	√	√	√	√
	2 Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian	√	√	√	√	√
12 Penguatan jaringan pasar produk pertanian	Meningkatkan perluasan akses pasar produk pertanian yang berbasis agroindustri	√	√	√	√	√
13 Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan kualitas dan validitas data base pertanian	√	√	√	√	√
14 Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan	Mengidentifikasi daerah rawan pangan	√	√	√	√	√
15 Meningkatkan produksi perikanan	Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
16 Meningkatkan produksi olahan dan akses pasar hasil perikanan	Meningkatkan nilai tambah produk perikanan	√	√	√	√	√
17 Melestarikan sumber daya perikanan	Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan	√	√	√	√	√
18 Meningkatkan kualitas Industri Pariwisata	1 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pariwisata	√	√	√	√	√
	2 Penyusunan database industri pariwisata	√	√	√	√	√
	3 Peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
	4 Verifikasi kesiapan tata kelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19	√	√	√	√	√
19 Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup	√	√	√	√	√

Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 Pengembangan Ekosistem Inovasi Daerah	1 Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun personal	√	√	√	√	√
2 Peningkatan daya saing daerah berdasarkan riset dan teknologi	2 Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
3 Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparansi dan akuntabel dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah	√	√	√	√	√
4 Mengembangkan ekosistem dan iklim penanaman modal yang kondusif	Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi	√	√	√	√	√
5 Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal	Mengembangkan akses promosi dan kerjasama penanaman modal	√	√	√	√	√
6 Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal	√	√	√	√	√
7 Inovasi Pelayanan di Bidang Kesehatan	Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan	√	√	√	√	√
8 Memanfaatkan pemanfaatan sistem TI dalam penerbitan dokumen kependudukan	Meningkatkan kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan	√	√	√	√	√
9 Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan Adminduk	Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk	√	√	√	√	√
10 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketingkat Desa/Kel dan Banjar	√	√	√	√	√
11 Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat	√	√	√	√	√
12 Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumberdaya air serta pengendalian daya rusak air	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air, Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya air dan Irigasi	√	√	√	√	√
13 Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum, Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Peningkatan cakupan layanan persampahan,	√	√	√	√	√
14 Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara	√	√	√	√	√
15 Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengedalian ruang, peningkatan kinerja pemanfaatan ruang, peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
16 Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Peningkatan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	√	√	√	√	√
17 Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	1 Peningkatan pembinaan dan pengembangan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
18 Mewujudkan Prasarana, sarana dan utilitas yang layak dan memadai di Kabupaten Badung	rumah/hunian yang layak					
	2 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	√	√	√	√	√
	3 Pengendalian titik permukiman kumuh	√	√	√	√	√
	1 Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan	√	√	√	√	√
	2 Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik	√	√	√	√	√
	3 Pembangunan sarana prasarana persampahan di kawasan	√	√	√	√	√
	4 Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan	√	√	√	√	√
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu	√	√	√	√	√
	2 Pelaksanaan Verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang/jasa dan verifikasi terhadap PSU perumahan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan	√	√	√	√	√
	3 Capaian realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target	√	√	√	√	√
19 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel						

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Badung

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	MISI 1 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT DALAM BINGKAI KERAGAMAN ADAT, BUDAYA DAN AGAMA		-	-	208,13	-	218,54	-	207,83	-	228,61	-	251,47	-	1.114,58	
	TUJUAN : TERWUJUDNYA KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	-	-	208,13	-	218,54	-	207,83	-	228,61	84,00 (Sangat Tinggi)	251,47	84,00 (Sangat Tinggi)	1.114,58	
	SASARAN : MENINGKATNYA TOLERANSI HIDUP BERAGAMA	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	78,45 (Tinggi)	82,00 (Sangat Tinggi)	208,13	82,00 (Sangat Tinggi)	218,54	83,00 (Sangat Tinggi)	207,83	83,50 (Sangat Tinggi)	228,61	84,00 (Sangat Tinggi)	251,47	84,00 (Sangat Tinggi)	1.114,58	
01	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100 %	100 %	208,13	100 %	218,54	100 %	207,83	100 %	228,61	100 %	251,47	100 %	1.114,58	Bakesbanqpol
	MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>CLEAN GOVERNMENT</i> YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		-	-	780.177,01	-	1.268.322,06	-	1.259.489,89	-	1.384.791,26	-	1.445.936,30	-	6.138.716,52	
	TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	-	-	780.177,01	-	1.268.322,06	-	1.259.489,89	-	1.384.791,26	80,10	1.445.936,30	80,10	6.138.716,52	
	1. SASARAN : MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		-	-	381.339,28	-	753.451,48	-	696.059,74	-	769.071,67	-	775.183,45	-	3.375.105,62	
		1. NILAI SAKIP	77,90 (BB)	78,75 (BB)	3.447,23	79,00 (BB)	6.951,16	79,50 (BB)	7.733,49	79,75 (BB)	7.985,97	80,10 (A)	8.350,92	80,10 (A)	34.468,77	
01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori Baik	28,95 %	47 %	368,24	60 %	1.904,81	70 %	2.095,29	80 %	2.304,82	100 %	2.535,31	100 %	9.208,47	Setda (Bag. Organisasi)
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah	99,04 %	100 %	1.847,76	100 %	3.113,00	100 %	3.657,12	100 %	3.544,35	100 %	3.519,38	100 %	15.681,61	Bappeda
02	PROGRAM : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan kabupaten	100 %	100 %	686,63	100 %	1.399,00	100 %	1.420,01	100 %	1.547,68	100 %	1.677,66	100 %	6.730,97	Bappeda
02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan kegiatan yang bersifat <i>assurance</i> (penjaminan)	100 %	100 %	288,51	100 %	420,58	100 %	441,60	100 %	463,68	100 %	486,87	100 %	2.101,24	Inspektorat
03	PROGRAM : PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan yang bersifat <i>consulting</i> (konsultasi)	100 %	100 %	256,08	100 %	113,78	100 %	119,47	100 %	125,44	100 %	131,71	100 %	746,48	Inspektorat
		2. OPINI BPK	WTP	WTP	377.892,05	WTP	746.500,32	WTP	688.326,25	WTP	761.085,69	WTP	766.832,53	WTP	3.340.636,84	
02	PROGRAM: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	311.600,59	100 %	659.498,64	100 %	592.112,89	100 %	658.115,13	100 %	657.036,21	100 %	2.878.363,46	BPKAD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2		3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03	PROGRAM: PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	3.753,20	100 %	4.427,93	100 %	4.870,61	100 %	5.357,68	100 %	5.859,85	100 %	24.269,27	BPKAD
		01	PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu Dan Tepat Guna	100 %	751,22	100 %	796,84	100 %	844,44	100 %	896,80	100 %	954,39	100 %	4.243,69	Setda (Bag. Administrasi Pembangunan)
		01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	61.498,53	100 %	81.356,33	100 %	90.056,70	100 %	96.252,41	100 %	102.495,22	100 %	431.659,18	Setda (Bag.Perencanaan dan Keuangan)
		02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100 %	288,51	100 %	420,58	100 %	441,60	100 %	463,68	100 %	486,87	100 %	2.101,24	Inspektorat
			2. SASARAN : MENINGKATNYA BIROKRASI YANG KAPABEL			171.463,45		249.154,36		277.335,05		305.762,92		337.120,62		1.340.836,41	
			1. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Data tidak tersedia	3,10 (Baik)	165.845,33	3,20 (Baik)	242.107,39	3,30 (Baik)	269.546,63	3,40 (Baik)	296.742,91	3,50 (Sangat Baik)	327.084,88	3,50 (Sangat Baik)	1.301.327,14	
		02	PROGRAM : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	64,29 %	906,68	100 %	2.399,11	100 %	2.950,84	100 %	3.544,93	100 %	4.168,52	100 %	13.970,09	Diskominfo
		03	PROGRAM : APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	94,29 %	44.191,30	100 %	51.409,07	100 %	59.255,94	100 %	65.587,53	100 %	72.513,68	100 %	292.957,52	Diskominfo
		01	PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	66,67 %	13,03	100 %	287,81	100 %	388,72	100 %	457,59	100 %	530,35	100 %	1.677,49	Diskominfo
		02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	18,75 %	22,82	100 %	301,69	100 %	497,44	100 %	577,19	100 %	661,91	100 %	2.061,04	Diskominfo
		01	PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Data tidak tersedia	292,11	100 %	3.456,50	100 %	3.611,29	100 %	3.611,29	100 %	3.611,29	100 %	14.582,49	Setda (Bag.PBJ)
		01	PROGRAM : KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengelolaan administrasi Kepegawaian	Data tidak tersedia	68,33	100 %	94,25	100 %	89,29	100 %	98,22	100 %	95,74	100 %	445,84	BKPSDM
		02	PROGRAM : PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang kearsipannya baik	22 %	583,60	28 %	1.017,44	30 %	1.017,44	32 %	1.158,93	34 %	1.300,44	34 %	5.077,85	Diskerpus

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2		3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	119.767,46	100 %	183.141,51	100 %	201.735,66	100 %	221.707,23	100 %	244.202,95	100 %	970.554,82	Diskes
			2. INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	47,82 (Sangat Rendah)	52,70 (Sangat Rendah)	5.618,12	57,65 (Sangat Rendah)	7.046,97	62,57 (Rendah)	7.788,42	67,55 (Rendah)	9.020,01	72,40 (Sedang)	10.035,74	72,40 (Sedang)	39.509,27	
	01	PROGRAM : KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengelolaan administrasi Kepegawaian	Data tidak tersedia	100 %	791,16	100 %	1.371,88	100 %	1.545,82	100 %	2.153,15	100 %	2.482,20	100 %	8.344,22	BKPSDM
	01	PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Data tidak tersedia	100 %	4.826,96	100 %	5.675,09	100 %	6.242,60	100 %	6.866,86	100 %	7.553,54	100 %	31.165,05	BKPSDM
		3. SASARAN : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK MENUJU PELAYANAN YANG PRIMA DAN BERINTEGRITAS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Data tidak tersedia	84,50 (Baik)	227.374,28	85,50 (Baik)	265.716,23	86,50 (Baik)	286.095,09	87,50 (Baik)	309.956,67	88,50 (Sangat Baik)	333.632,22	88,50 (Sangat Baik)	1.422.774,50	
	02	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	83,66 %	100 %	7.621,76	100 %	8.896,12	100 %	9.574,56	100 %	10.864,63	100 %	11.402,04	100 %	48.359,10	Balitbang
	02	PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data tidak tersedia	100 %	1.734,53	100 %	2.762,94	100 %	2.762,94	100 %	2.779,21	100 %	2.939,65	100 %	12.979,27	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)
	04	PROGRAM : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tidak tersedia	100 %	16,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	933,36	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)
	08	PROGRAM : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong	Data tidak tersedia	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	138,24	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)
	05	PROGRAM : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data tidak tersedia	100 %	123,05	100 %	420,96	100 %	420,96	100 %	436,31	100 %	505,15	100 %	1.906,43	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)
	06	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penetapan Dan Penegakan Batas Desa	Data tidak tersedia	100 %	372,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	1.884,24	Setda (Bag. Tata Pemerintahan)
	02	PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data tidak tersedia	100 %	127,47	100 %	418,30	100 %	429,35	100 %	452,06	100 %	524,96	100 %	1.952,13	Setda (Bag. Kerjasama)
	01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Data tidak tersedia	100 %	99.493,65	100 %	114.003,54	100 %	125.403,90	100 %	137.994,29	100 %	151.793,72	100 %	628.689,10	Setda (Bag. Umum)

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2		3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		01	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data tidak tersedia	100 %	11.318,98	100 %	12.450,88	100 %	13.695,97	100 %	15.065,57	100 %	16.572,12	100 %	69.103,52	Setda (Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan)
		01	PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data tidak tersedia	100 %	758,75	100 %	957,25	100 %	984,79	100 %	1.215,02	100 %	1.346,68	100 %	5.262,49	Setda (Baq. Kesra)
		03	PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penangqulangan Bencana	90 %	100 %	7.972,79	100 %	9.926,78	100 %	9.563,16	100 %	11.392,29	100 %	11.565,64	100 %	50.420,66	BPBD
		04	PROGRAM : PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	95 %	10.098,51	96 %	13.218,22	97 %	13.218,00	98 %	14.344,28	99 %	16.303,97	100 %	67.182,97	Diskarmat
		02	PROGRAM : DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80 %	82,00 %	46.129,11	82,50 %	55.112,13	83,00 %	55.816,22	83,50 %	57.589,22	84,50 %	58.897,97	84,50 %	273.544,65	Sekretariat DPRD
		02	PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	100 %	1.361,04	100 %	1.649,11	100 %	1.649,11	100 %	1.978,93	100 %	2.308,75	100 %	8.946,93	Disdukcapil
		03	PROGRAM : PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	98 %	1.527,46	98 %	1.767,70	98 %	1.767,70	98 %	2.042,46	98 %	2.317,22	98 %	9.422,54	Disdukcapil
		04	PROGRAM ; PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Data tidak tersedia	42 %	38,91	50 %	38,91	58 %	36,86	67 %	40,55	83 %	39,52	83 %	194,74	Disdukcapil
		04	PROGRAM: PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Data tidak tersedia	100 %	1.285,32	100 %	1.897,98	100 %	2.155,85	100 %	2.073,64	100 %	2.312,22	100 %	9.725,01	DPMPTSP
		06	PROGRAM: PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Data tidak tersedia	100 %	1.232,78	100 %	1.342,80	100 %	1.598,58	100 %	1.534,63	100 %	1.342,57	100 %	7.051,36	DPMPTSP
		01	PROGRAM : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terwujudnya penyelengqaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Data tidak tersedia	100 %	16.677,71	100 %	14.900,41	100 %	19.784,26	100 %	20.635,69	100 %	21.496,83	100 %	93.494,90	Dishub
		02	PROGRAM : PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	4,45	100 %	11,73	100 %	12,91	100 %	14,20	100 %	15,62	100 %	58,90	DPMD
04	PROGRAM : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2.047,72	100 %	2.878,89	100 %	2.952,44	100 %	3.152,81	100 %	3.370,11	100 %	14.401,97	DPMD		
05	PROGRAM : PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	929,59	100 %	1.515,74	100 %	1.667,32	100 %	1.834,05	100 %	2.017,45	100 %	7.964,15	DPMD		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2			3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	2.980,45	100 %	3.531,28	100 %	3.531,28	100 %	3.637,38	100 %	3.743,48	100 %	17.423,88	Kecamatan Kuta
	01	PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	252,15	100 %	277,36	100 %	305,10	100 %	335,61	100 %	369,17	100 %	1.539,39	Kecamatan Kuta
	02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	3.823,44	100 %	5.213,58	100 %	5.672,06	100 %	6.286,84	100 %	6.952,05	100 %	27.947,98	Kecamatan Kuta Utara
	05	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	153,07	100 %	208,38	100 %	229,22	100 %	252,14	100 %	277,35	100 %	1.120,17	Kecamatan Kuta Utara
	02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	3.848,35	100 %	4.806,19	100 %	4.806,19	100 %	5.173,61	100 %	5.551,75	100 %	24.186,10	Kecamatan Kuta Selatan
	05	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	173,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	1.045,63	Kecamatan Kuta Selatan
	02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	3.988,98	100 %	5.069,22	100 %	5.576,14	100 %	6.133,75	100 %	6.747,13	100 %	27.515,21	Kecamatan Mengwi
	05	PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	75,01	100 %	129,34	100 %	142,28	100 %	156,50	100 %	172,15	100 %	675,29	Kecamatan Mengwi
	02	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Abiansema	100 %	100 %	471,09	100 %	637,99	100 %	640,07	100 %	704,91	100 %	769,99	100 %	3.224,04	Kecamatan Abiansema
	05	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Abiansema	100 %	100 %	122,71	100 %	122,71	100 %	134,98	100 %	148,48	100 %	163,33	100 %	692,20	Kecamatan Abiansema
	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Petang	100 %	100 %	480,50	100 %	582,39	100 %	584,09	100 %	696,14	100 %	808,29	100 %	3.151,41	Kecamatan Petang
	05	PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Petang	100 %	100 %	104,26	100 %	114,69	100 %	126,16	100 %	138,77	100 %	152,65	100 %	636,53	Kecamatan Petang

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			MISI 3 : MEWUJUDKAN TATANAN MASYARAKAT YANG TERTIB, TAAT AZAS SERTA MENJUNJUNG TINGGI PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)		-	-	12.497,17	-	15.533,46	-	16.947,08	-	18.521,27	-	20.830,18	-	84.329,16	
			1. TUJUAN : TERWUJUDNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	5.205,42	-	6.560,61	-	6.583,67	-	7.585,57	90,00	8.590,01	90,00	34.525,29	
			SASARAN : MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MENTAATI PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	90,00 %	90,00 %	5.205,42	90,00 %	6.560,61	90,00 %	6.583,67	90,00 %	7.585,57	90,00 %	8.590,01	90,00 %	34.525,29	
		01	PROGRAM: PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan dan ketentraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	4.256,03	90 %	6.038,41	90 %	6.038,41	90 %	7.014,95	90 %	7.991,48	90 %	31.339,28	Satpol PP
		01	PROGRAM: KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	350,00	100 %	66,74	100 %	73,42	100 %	80,76	100 %	88,84	100 %	659,76	Kecamatan Kuta
		04	PROGRAM: KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta utara	100 %	-	-	100 %	88,82	100 %	97,70	100 %	107,47	100 %	118,22	100 %	412,20	Kecamatan Kuta Utara
		01	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	-	-	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	1.166,52	Kecamatan Kuta Selatan
		04	PROGRAM : KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	100,00	100 %	15,13	100 %	16,65	100 %	18,31	100 %	20,14	100 %	170,24	Kecamatan Abiansemal
		04	PROGRAM : KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	349,84	100 %	28,94	100 %	31,83	100 %	35,02	100 %	38,52	100 %	484,15	Kecamatan Mengwi
		04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	100 %	100 %	149,55	100 %	30,94	100 %	34,03	100 %	37,44	100 %	41,18	100 %	293,14	Kecamatan Petang
			2. TUJUAN : TERWUJUDNYA PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, PEMENUHAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM	KABUPATEN PEDULI HAM	-	-	7.291,75	-	8.972,85	-	10.363,41	-	10.935,70	75,00 (Peduli HAM)	12.240,17	75,00 (Peduli HAM)	49.803,88	
			SASARAN : TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAM	CAPAIAN ATAS KEPEDULIAN HAM	81,29 (Peduli HAM)	75,00 (Peduli HAM)	7.291,75	75,00 (Peduli HAM)	8.972,85	75,00 (Peduli HAM)	10.363,41	75,00 (Peduli HAM)	10.935,70	75,00 (Peduli HAM)	12.240,17	75,00 (Peduli HAM)	49.803,88	
		01	PROGRAM : PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	100 %	100 %	5.403,04	100 %	5.943,34	100 %	6.537,67	100 %	7.191,44	100 %	7.910,58	100 %	32.986,07	Setda (Baq. Hukum)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2		3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	PROGRAM : PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan	100 %	100 %	270,81	100 %	614,04	100 %	675,44	100 %	742,99	100 %	817,28	100 %	3.120,56	Diskes
	01	PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	471,46	100 %	500,98	100 %	1.120,86	100 %	533,87	100 %	586,98	100 %	3.214,16	DP2KBP3A
	02	PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	100 %	236,74	100 %	247,60	100 %	249,57	100 %	290,60	100 %	332,63	100 %	1.357,14	DP2KBP3A
	03	PROGRAM : PEMENUHAN HAK ANAK	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	Kategori Nindya	227,69	Kategori Nindya	297,25	Kategori Nindya	311,33	Kategori Nindya	315,35	Kategori Nindya	325,89	Kategori Nindya	1.477,50	DP2KBP3A
	06	PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	264,60	100 %	500,57	100 %	550,63	100 %	723,02	100 %	924,39	100 %	2.963,21	DLHK
	10	PROGRAM: PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	259,03	100 %	494,00	100 %	543,40	100 %	692,38	100 %	865,74	100 %	2.854,54	DLHK
	01	PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	58,00 %	21,03 %	158,39	21,03 %	375,08	21,03 %	374,51	21,03 %	446,04	21,03 %	476,67	21,03 %	1.830,71	Disperinaker
		MISI 4 : MEMANTAPKAN KREATIVITAS SENI DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG BERORIENTASI PADA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL		-	-	88.964,47	-	158.020,46	-	167.340,22	-	176.334,61	-	185.856,34	-	776.516,10	
		TUJUAN : TERWUJUDNYA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA LOKAL	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	-	-	88.964,47	-	158.020,46	-	167.340,22	-	176.334,61	85,00	185.856,34	85,00	776.516,10	
		SASARAN : MENINGKATNYA KREATIVITAS SERTA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA	PERSENTASE PERTUMBUHAN SENI DAN BUDAYA	62,00%	67,00%	88.964,47	71,00%	158.020,46	76,00%	167.340,22	80,00%	176.334,61	85,00%	185.856,34	85,00%	776.516,10	
	02	PROGRAM: PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara Adat	100 %	100 %	83.891,63	100 %	99.658,44	100 %	104.641,36	100 %	109.873,43	100 %	115.367,10	100 %	513.431,96	Disbud
	03	PROGRAM: PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	140,22	36 %	10.718,36	36 %	11.254,28	36 %	11.817,00	36 %	12.407,85	36 %	46.337,71	Disbud
	04	PROGRAM: PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	Data tidak tersedia	-	-	25 %	3.462,96	25 %	3.636	25 %	3.818	25 %	4.009	25 %	14.925,77	Disbud

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	05	PROGRAM: PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi	15 unit	202.27	10 unit	24.827.06	10 unit	26.068.41	10 unit	27.371.83	10 unit	28.740.42	50 unit	107.210,00	Disbud
			Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Data tidak tersedia	-	3 unit	744.86	3 unit	782.10	3 unit	821.21	3 unit	862.27	12 unit	3.210,44	
	06	PROGRAM: PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Data tidak tersedia	857.33	1 unit	908.51	1 unit	908.03	1 unit	969.33	1 unit	1.030.64	1 unit	4.673.83	Disbud
	01	PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta	100 %	3.712,63	100 %	3.898,26	100 %	5.258,74	100 %	5.784,62	100 %	6.363,08	100 %	25.017,32	Kec. Kuta
	03	PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	49,02	100 %	4.146,64	100 %	4.561,30	100 %	5.017,43	100 %	5.519,17	100 %	19.293,56	Kec. Kuta Utara
	01	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	46,094	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	15.687,12	Kec. Kuta Selatan
	02	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Abiansemai	100 %	17,68	100 %	19,45	100 %	21,39	100 %	23,53	100 %	25,88	100 %	107,92	Kec. Abiansemai
	03	PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Menqwi	100 %	26,09	100 %	5.702,01	100 %	6.272,22	100 %	6.899,44	100 %	7.589,38	100 %	26.489,14	Kec. Menqwi
	03	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Petang	100 %	21,51	100 %	23,66	100 %	26,03	100 %	28,63	100 %	31,50	100 %	131,34	Kec. Petang
		MISI 5 :MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN PADA PENGUATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT		-	637.396,85	-	1.038.123,31	-	1.015.947,84	-	1.435.045,75	-	1.348.716,06	-	5.475.229,80	
		TUJUAN : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	-	637.396,85	-	1.038.123,31	-	1.015.947,84	-	1.435.045,75	81,67 (Sangat Tinggi)	1.348.716,06	81,67 (Sangat Tinggi)	5.475.229,80	
		SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	81,59 (Sangat Tinggi)	637.396,85	81,61 (Sangat Tinggi)	1.038.123,31	81,63 (Sangat Tinggi)	1.015.947,84	81,65 (Sangat Tinggi)	1.435.045,75	81,67 (Sangat Tinggi)	1.348.716,06	81,67 (Sangat Tinggi)	5.475.229,80	
	02	PROGRAM: PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100 %	256.816,26	100 %	459.625,62	100 %	489.958,18	100 %	854.842,49	100 %	731.818,25	100 %	2.793.060,78	Disdikpora

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	02	PROGRAM: PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	-	100 %	709,68	100 %	780,65	100 %	858,71	100 %	944,58	100 %	3.293,62	Disdikpora
	03	PROGRAM: PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	8.974,39	100 %	29.026,86	100 %	32.812,30	100 %	36.735,42	100 %	41.115,05	100 %	148.664,02	Disdikpora
	04	PROGRAM: PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	528,06	100 %	484,50	100 %	651,84	100 %	717,03	100 %	1.104,22	100 %	3.485,65	Disdikpora
	01	PROGRAM : PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat waktu	Data tidak tersedia	160,88	100 %	808,03	100 %	836,71	100 %	838,41	100 %	872,19	100 %	3.516,21	Setda (Bag.Perekonomian)
	02	PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	187.491,19	100 %	244.552,73	100 %	268.051,05	100 %	302.323,40	100 %	324.551,77	100 %	1.326.970,15	Diskes
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	183.426,08	100 %	302.915,89	100 %	222.857,12	100 %	238.730,29	100 %	248.310,00	100 %	1.196.239,37	Diskes
		MISI 6 : PEMBERDAYAN EKONOMI KREATIF DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN POTENSI WILAYAH DAN MASYARAKAT		-	13.751,47	-	17.592,38	-	21.558,24	-	22.798,34	-	24.266,04	-	99.966,48	
		TUJUAN : TERWUJUDNYA UMKM SEBAGAI POTENSI EKONOMI RAKYAT, KREATIF DAN BERDAYA SAING			13.751,47		17.592,38		21.558,24		22.798,34		24.266,04		99.966,48	
			1. PERSENTASE JUMLAH KOPERASI SEHAT	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	10,00%	-	
			2. PERSENTASE PERTUMBUHAN UMKM MENJADI WIRUSAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00%	-	35,00%	-	
			3. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	-	-	-	-	-	-	-	-	12,30%	-	12,30%	-	
		1. SASARAN : MENINGKATNYA PERSENTASE KOPERASI SEHAT	PERSENTASE JUMLAH KOPERASI SEHAT	30,84%	6,00%	721,67	7,00%	807,94	8,00%	872,69	9,00%	976,00	10,00%	1.086,44	10,00%	4.464,74
	02	PROGRAM: PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Data tidak tersedia	12,03	100 %	13,23	100 %	14,55	100 %	16,01	100 %	17,61	100 %	73,43	Diskop UKMP
	03	PROGRAM: PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Data tidak tersedia	124,27	100 %	136,69	100 %	150,36	100 %	165,40	100 %	181,94	100 %	758,66	Diskop UKMP

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2				3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04	PROGRAM: PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Data tidak tersedia	100 %	133,01	100 %	160,42	100 %	160,42	100 %	192,51	100 %	224,59	100 %	870,96	Diskop UKMP	
		05	PROGRAM: PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan pemahaman terhadap perkoperasian	Data tidak tersedia	100 %	157,27	100 %	173,00	100 %	190,29	100 %	209,32	100 %	230,26	100 %	960,14	Diskop UKMP	
		06	PROGRAM: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Data tidak tersedia	100 %	295,09	100 %	324,60	100 %	357,06	100 %	392,76	100 %	432,04	100 %	1.801,55	Diskop UKMP	
			2. SASARAN : MENINGKATNYA JUMLAH WIRUSAHA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WIRUSAHA	5,00%	15,00%	11.855,03	20,00%	12.661,95	25,00%	16.194,49	30,00%	16.838,49	35,00%	17.662,43	35,00%	75.212,40		
		07	PROGRAM: PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	Data tidak tersedia	100 %	311,54	100 %	342,69	100 %	376,96	100 %	414,66	100 %	456,12	100 %	1.901,97	Diskop UKMP	
		08	PROGRAM: PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Data tidak tersedia	100 %	303,20	100 %	236,33	100 %	236,33	100 %	283,59	100 %	330,86	100 %	1.390,30	Diskop UKMP	
		01	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Data tidak tersedia	100 %	11.240,30	100 %	12.082,94	100 %	15.581,21	100 %	16.140,24	100 %	16.875,45	100 %	71.920,13	Diskop UKMP	
			3. SASARAN : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	7,78%	8,78%	1.174,77	9,54%	4.122,49	10,48%	4.491,06	11,39%	4.983,84	12,30%	5.517,18	12,30%	20.289,33		
		03	PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Data tidak tersedia	100 %	678,92	100 %	3.005,35	100 %	3.305,89	100 %	3.636,48	100 %	4.000,13	100 %	14.626,76	Diskop UKMP	
		04	PROGRAM: STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan harga barang komoditi terhadap pedagang pasar	Data tidak tersedia	100 %	54,61	100 %	60,07	100 %	66,08	100 %	72,69	100 %	79,96	100 %	333,42	Diskop UKMP	
		05	PROGRAM: PENGEMBANGAN EKPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab.Badung	Data tidak tersedia	100 %	53,58	100 %	58,93	100 %	64,83	100 %	71,31	100 %	78,44	100 %	327,08	Diskop UKMP	
		06	PROGRAM: STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Data tidak tersedia	100 %	387,66	100 %	473,04	100 %	476,66	100 %	568,01	100 %	659,75	100 %	2.565,12	Diskop UKMP	
		07	PROGRAM: PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	Data tidak tersedia	-	-	100 %	525,09	100 %	577,60	100 %	635,36	100 %	698,90	100 %	2.436,95	Diskop UKMP	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			MISI 7 : MENINGKATKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF	-	-	34.904,28	-	37.726,97	-	63.241,01	-	63.962,15	-	64.633,99	-	264.468,40	-	264.468,40	
			TUJUAN : TERWUJUDNYA KEBAHAGIAAN MASYARAKAT			34.904,28		37.726,97		63.241,01		63.962,15		64.633,99		264.468,40		264.468,40	
				1. INDEKS KEBAHAGIAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	77,39	-	77,39	-	77,39	-	
				2.TINGKAT KEMISKINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,65%	-	1,65%	-	1,65%	-	
			1. SASARAN : MENINGKATNYA KEBAHAGIAAN MASYARAKAT	INDEKS KEBAHAGIAAN	Data tidak tersedia	76,39	6.710,96	76,64	7.279,96	76,89	6.721,61	77,14	7.322,32	77,39	7.877,42	77,39	35.912,27		
		05	PROGRAM: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	1.111,19	100 %	1.456,45	100 %	1.602,09	100 %	1.815,50	100 %	1.997,05	100 %	7.982,28		Diskes
		01	PROGRAM: PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	138,94	2,10 %	172,61	2,10 %	127,67	2,10 %	134,70	2,10 %	142,69	2,10 %	716,61		DP2KBP3A
		02	PROGRAM: PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	79 %	4.695,99	79 %	4887,16	79 %	4.326,92	79 %	4.620,13	79 %	4.913,33	79 %	23.443,52		DP2KBP3A
		03	PROGRAM: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	98 %	100 %	396,25	100 %	341,50	100 %	242,11	100 %	249,47	100 %	256,84	100 %	1.486,17		DP2KBP3A
		02	PROGRAM: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	1 %	2,5 %	77,41	5 %	86,02	7,5 %	86,02	10 %	101,49	12,5 %	116,97	12,5%	467,91		Disperinaker
		03	PROGRAM: PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	26 %	26 %	291,17	27 %	336,23	28 %	336,80	29 %	401,03	30 %	450,54	30 %	1.815,77		Disperinaker
			2 SASARAN : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	1,78%	2,00%	28.193,32	1,95%	30.447,01	1,80%	56.519,40	1,78%	56.639,83	1,65%	56.756,58	1,65%	228.556,13		
		02	PROGRAM: PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100 %	100 %	672,92	100 %	2.375	100 %	2.159	100 %	2.189	100 %	2.218	100 %	9.614,04		Dinsos
		04	PROGRAM: REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	559,38	100 %	1.109,43	100 %	1.006,69	100 %	1.037,24	100 %	1.067,80	100 %	4.780,54		Dinsos
		05	PROGRAM: PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	26.933,47	100 %	26.933,47	100 %	53.323,33	100 %	53.377,68	100 %	53.432,03	100 %	213.999,96		Dinsos
		06	PROGRAM: PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %	27,55	100 %	28,79	100 %	30,01	100 %	36,31	100 %	38,93	100 %	161,59		Dinsos

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			MISI 8 : MEMPERKUAT SINERGI PARIWISATA DENGAN PERTANIAN YANG BERORIENTASI KEPADA AGROINDUSTRI DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM		-	-	79.546,09	-	202.615,45	-	223.891,07	-	243.860,65	-	282.522,33	-	1.032.435,59	
			1. TUJUAN : TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN BERORIENTASI PERTANIAN DAN AGROINDUSTRI	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN BERORIENTASI PERTANIAN DAN AGROINDUSTRI	-	-	16.662,68	-	84.335,06	-	81.785,66	-	89.056,43	12,82%	96.766,23	12,82%	368.606,06	
			1. SASARAN : MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA BERORIENTASI PERTANIAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA BERORIENTASI PERTANIAN	2,56%	2,56%	6.714,22	5,12%	71.396,53	7,69%	67.605,74	10,25%	70.479,20	12,82%	73.068,03	12,82%	289.263,72	
		02	PROGRAM: PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	72%	72%	6.407,76	74,35%	70.638,15	76,92%	65.604,14	79,48%	68.360,05	82,05%	70.845,02	82,05%	281.855,12	Dispar
		04	PROGRAM: PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	Data tidak tersedia	20% (50 usaha)	213,79	20% (50 usaha)	224,71	20% (50 usaha)	224,71	20% (50 usaha)	277,75	20% (50 usaha)	314,60	100% (250 usaha)	1.255,56	Dispar
		05	PROGRAM: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	80% (640 org)	-	-	-	-	33,33% (160 org)	1.216,53	33,33% (160 org)	1.253,03	33,33% (160 org)	1.290,62	100% (480 org)	3.760,18	Dispar
		01	PROGRAM: PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	Data tidak tersedia	3 produk	92,67	3 produk	533,67	3 produk	560,35	3 produk	588,37	3 produk	617,79	100 %	2.392,85	Setda (Bag. SDA)
			2.SASARAN : MENINGKATNYA PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI YANG BERORIENTASI PADA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM	PERSENTASE PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI YANG BERORIENTASI PADA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM	31,13%	31,37%	9.948,46	31,67%	12.938,53	31,83%	14.179,92	31,98%	18.577,23	32,27%	23.698,20	32,27%	79.342,34	
		05	PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Produknya berkualitas dan berdaya saing	Data tidak tersedia	20 %	383,98	20 %	589,18	20 %	595,63	20 %	677,12	20 %	754,93	20 %	3.000,84	Disperinaker
		06	PROGRAM : PEGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	Data tidak tersedia	100 %	63,15	100 %	34,73	100 %	38,20	100 %	42,02	100 %	46,23	100 %	224,33	Disperinaker
		07	PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SiINas	Data tidak tersedia	100 %	187,92	100 %	93,96	100 %	103,36	100 %	113,69	100 %	125,06	100 %	624,00	Disperinaker
		04	PROGRAM: PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100 %	100 %	9.313,41	100 %	12.220,66	100 %	13.442,73	100 %	17.744,40	100 %	22.771,98	100 %	75.493,18	DLHK

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2. TUJUAN : TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN SINERGI DENGAN SEKTOR PARIWISATA BERKELANJUTAN	1. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 2. KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB	- -	- -	62.883,41	- -	118.280,39	- -	142.105,41	- -	154.804,23	5,85% 29,00%	185.756,10	5,85% 29,00%	663.829,53	
			1. SASARAN : MENINGKATNYA KUANTITAS, KUALITAS DAN KONTINUITAS PRODUK PERTANIAN			-	13.335,35	-	49.718,03	-	66.414,63	-	56.118,44	-	60.073,78	-	245.660,22	
				1. NILAI TUKAR USAHA PETANI (NTUP)	Data tidak tersedia	92,73 (Defisit)	12.028,31	94,73 (Defisit)	46.294,08	100,00 (Impas)	48.902,20	101,00 (Surplus)	52.218,28	101,50 (Surplus)	55.288,62	101,50 (Surplus)	214.731,49	
		02	PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan lumbung pangan	Data tidak tersedia	-	-	100 %	556,05	100 %	562,17	100 %	568,35	100 %	574,60	100 %	2.261,17	Diperpa
		03	PROGRAM : PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	100 %	128,91	100 %	5.134,22	100 %	5.375,15	100 %	5.637,17	100 %	5.922,36	100 %	22.197,81	Diperpa
		04	PROGRAM : PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pemetaan Desa Rawan Pangan	Data tidak tersedia	-	-	-	-	100 %	50,00	100 %	50,55	100 %	51,11	100 %	151,66	Diperpa
		05	PROGRAM : PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan keamanan pangan	100 %	-	-	100 %	46,00	100 %	46,51	100 %	47,02	100 %	47,53	100 %	187,06	Diperpa
		02	PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	100 %	4.206,43	100 %	27.884,47	100 %	28.500,99	100 %	29.494,10	100 %	30.526,11	100 %	120.612,09	Diperpa
		03	PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	56 %	65 %	4.790,47	67 %	6.553,92	70 %	7.901,13	72 %	9.539,15	75 %	10.808,41	75 %	39.593,09	Diperpa
		04	PROGRAM : PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesakitan ternak atau hewan	1,40 %	5 %	1.476,01	5 %	3.131,50	5 %	3.429,55	5 %	3.740,25	5 %	4.103,50	5 %	15.880,81	Diperpa
		05	PROGRAM : PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 %	100 %	108,98	100 %	779,78	100 %	804,28	100 %	884,71	100 %	973,18	100 %	3.550,93	Diperpa
		07	PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %	100 %	1.317,50	100 %	2.208,14	100 %	2.232,43	100 %	2.256,99	100 %	2.281,81	100 %	10.296,88	Diperpa
				2. NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)	Data tidak tersedia	100,30	1.307,04	100,40	3.423,95	100,50	17.512,43	100,60	3.900,15	100,70	4.785,16	100,70	30.928,73	
		02	PROGRAM: PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	7.922,3 Ton	7.437 Ton	1.052,10	7.986 Ton	839,42	8.146 Ton	918,86	8.309 Ton	2.606,77	8.475 Ton	2.863,13	40.353 Ton	8.280,28	Diskan
		03	PROGRAM: PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	730,2 Ton	637 Ton	254,94	650 Ton	1.748,57	663 Ton	16.132,73	676 Ton	771,49	690 Ton	1.347,95	3.316 Ton	20.255,69	Diskan

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1		2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	04	PROGRAM: PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	Data tidak tersedia	-	-	1 Kawasan.	575,66	1 Kawasan.	161,50	1 Kawasan.	177,65	1 Kawasan.	195,41	5 Kawasan.	1.110,21	Diskan
	05	PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Peikanan	6.519 Ton	-	-	6.742 Ton	260,29	6.877 Ton	299,34	7.014 Ton	344,24	7.154 Ton	378,66	34.397 Ton	1.282,54	Diskan
		2. SASARAN : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB	24,61%	24,50%	4.291,43	25,00%	4.411,76	26,50%	4.969,71	27,50%	5.612,95	29,00%	6.341,28	29,00%	25.627,13	
	03	PROGRAM: PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	-82,71% (1.071.227 orang)	30% (455 orang)	4.291,43	40% (637 orang)	4.411,76	50% (956 orang)	4.969,71	60% (1530 orang)	5.612,95	70% (2601 orang)	6.341,28	70% (2601 orang)	25.627,13	Dispar
		3. SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	70,85 (Baik)	61,55 (Sedang)	45.256,63	61,64 (Sedang)	64.150,60	61,72 (Sedang)	70.721,07	61,81 (Sedang)	93.072,84	61,89 (Sedang)	119.341,04	61,89 (Sedang)	392.542,17	
	02	PROGRAM: PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	-	-	-	-	100 %	186,77	-	-	-	-	100 %	186,77	DLHK
	03	PROGRAM: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	765,00	100 %	1.258,94	100 %	1.354,37	100 %	1.787,77	100 %	2.294,31	100 %	7.460,40	DLHK
	05	PROGRAM: PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Data tidak tersedia	-	-	100 %	25,64	100 %	28,21	100 %	31,03	100 %	34,13	100 %	119,01	DLHK
	07	PROGRAM: PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100 %	100 %	48,71	100 %	190,41	100 %	209,45	100 %	276,47	100 %	390,29	100 %	1.115,33	DLHK
	08	PROGRAM: PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	100 %	136,28	100 %	211,79	100 %	232,07	100 %	302,48	100 %	276,47	100 %	1.159,09	DLHK
	09	PROGRAM: PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data tidak tersedia	-	-	100 %	92,48	100 %	101,73	100 %	111,90	100 %	123,09	100 %	429,20	DLHK
	11	PROGRAM: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	100 %	44.306,63	100 %	62.371,34	100 %	68.608,47	100 %	90.563,18	100 %	116.222,75	100 %	382.072,37	DLHK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	MISI 9 : MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH YANG BERBASIS KREATIVITAS DAN INOVASI		-	-	132.294,89	-	219.470,44	-	401.019,19	-	567.339,48	-	732.912,67	-	2.053.036,66	
	TUJUAN : TERWUJUDNYA DAYA SAING DAERAH YANG TINGGI	INDEKS DAYA SAING DAERAH BERKELANJUTAN	-	-	132.294,89	-	219.470,44	-	401.019,19	-	567.339,48	3.7855 (sangat tinggi)	732.912,67	3.7855 (sangat tinggi)	2.053.036,66	
	SASARAN : MENINGKATNYA INOVASI DAN KEMANDIRIAN DAERAH	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)	3.6945 (tinggi)	3.7491 (tinggi)	132.294,89	3.7582 (tinggi)	219.470,44	3.7673 (sangat tinggi)	401.019,19	3.7764 (sangat tinggi)	567.339,48	3.7855 (sangat tinggi)	732.912,67	3.7855 (sangat tinggi)	2.053.036,66	
01	PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	60 %	100 %	2.489,16	100 %	7.377,14	100 %	6.604,80	100 %	7.850,11	100 %	6.967,25	100 %	31.288,46	Balitbang
02	PROGRAM: PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 jenis pajak	10 jenis pajak	7.434,13	10 jenis pajak	9.550,44	10 jenis pajak	9.899,99	10 jenis pajak	10.236,32	10 jenis pajak	10.244,78	10 jenis pajak	47.365,67	Bapenda
02	PROGRAM: PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	95,95 %	96,25 %	18.092,93	96,55 %	21.711,52	97,25 %	28.396,56	98,25 %	34.816,39	100 %	44.557,21	6.736 ha	147.574,61	DPUPR
03	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,99 %	96,00 %	4.303,38	96,10 %	9.280,25	96,50 %	9.744,26	96,80 %	10.231,47	97,20 %	10.743,04	97,20 %	44.302,40	DPUPR
04	PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	73,00 %	-	-	74,00 %	750,00	75,00 %	800,00	76,00 %	850,00	77,00 %	900,00	77,00 %	3.300,00	DPUPR
05	PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,04 %	-	-	97,40 %	350,00	97,75 %	3.000,00	97,85 %	6.000,00	98,20 %	7.500,00	98,20 %	16.850,00	DPUPR
07	PROGRAM: PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	100 %	100 %	7.227,42	100 %	7.950,16	100 %	8.745,17	100 %	9.619,69	100 %	10.581,66	100 %	44.124,10	DPUPR
08	PROGRAM: PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	100 %	2.196,22	100 %	66.224,06	100 %	226.853,33	100 %	352.290,87	100 %	241.355,42	100 %	888.919,90	DPUPR
09	PROGRAM: PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %	37.611,21	100 %	39.491,77	100 %	41.466,35	100 %	43.539,67	100 %	45.716,66	100 %	207.825,65	DPUPR
10	PROGRAM: PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,93 %	98,94 %	34.834,94	98,95 %	38.318,44	99,00 %	42.150,28	99,5 %	66.986,76	100 %	328.107,16	100 %	510.397,58	DPUPR
11	PROGRAM: PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	990,61	100 %	1.089,67	100 %	1.198,64	100 %	1.318,50	100 %	1.450,35	100 %	6.047,77	DPUPR
12	PROGRAM: PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.998,66	100 %	2.198,52	100 %	2.418,37	100 %	2.660,21	100 %	2.926,23	100 %	12.201,99	DPUPR

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			02 PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksannya Pengembangan Perumahan	Data tidak tersedia	100 %	8,94	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	110,32	DPKP
			03 PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN	Terwuiudnya Permukiman tanpa Kumuh	Data tidak tersedia	100 %	241,97	100 %	63,20	100 %	241,97	100 %	252,28	100 %	263,61	100 %	1.063,03	DPKP
			04 PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Data tidak tersedia	100 %	218,29	100 %	245,95	100 %	268,19	100 %	297,84	100 %	327,49	100 %	1.357,77	DPKP
			05 PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	100 %	1.436,18	100 %	1.300,00	100 %	1.867,34	100 %	2.082,66	100 %	2.297,97	100 %	8.984,16	DPKP
			01 PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	719,80	100 %	513,79	100 %	565,16	100 %	621,68	100 %	683,85	100 %	3.104,28	Diskes
			02 PROGRAM: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase penqembangan kebijakan iklim penanaman modal	Data tidak tersedia	-	-	100 %	221,31	100 %	243,44	100 %	267,79	100 %	294,56	100 %	1.027,10	DPMPTSP
			03 PROGRAM: PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	Data tidak tersedia	-	-	100 %	211,72	100 %	232,89	100 %	256,18	100 %	268,99	100 %	969,77	DPMPTSP
			05 PROGRAM: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	Data tidak tersedia	-	-	100 %	102,67	100 %	112,94	100 %	124,23	100 %	136,66	100 %	476,50	DPMPTSP
			01 PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	100 %	12.491,04	100 %	12.494,49	100 %	16.184,13	100 %	17.011,48	100 %	17.564,44	100 %	75.745,59	Disdukcapil

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Tahun 2022-2026 yang dijabarkan kedalam indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung, dibutuhkan dana pembangunan yang memadai sesuai kapasitas keuangan daerah. Berikut ini disajikan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022-2026 pada Tabel 7.1.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel 7.2 dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh Perangkat Daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2022-2026) yang dikelompokkan atas : (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pemerintahan Pilihan, (4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 7) Unsur Kewilayahan, Serta 8) Unsur Pemerintahan Umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026

Kabupaten Badung

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	2.900.345.173.496	4.385.927.613.562	4.725.925.851.377	5.541.661.642.764	5.821.133.695.508
5	BELANJA	2.900.345.173.496	4.385.927.613.562	4.725.925.851.377	5.541.661.642.764	5.821.133.695.508
5.1	BELANJA OPERASI	2.496.345.173.496	3.701.722.905.846	3.988.681.418.563	4.677.162.426.493	4.913.036.839.009
5.2	BELANJA MODAL	93.000.000.000	157.893.394.088	170.133.330.650	199.499.819.140	209.560.813.038
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.000.000.000	57.017.058.976	61.437.036.068	72.041.601.356	75.674.738.042
5.4	BELANJA TRANSFER	278.000.000.000	469.294.254.651	505.674.066.097	592.957.795.776	622.861.305.419

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 - 2026
Kabupaten Badung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2			3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.511.347,88		2.154.414,87		2.392.062,68		3.023.463,54		3.158.190,43		12.239.479,39	
	01		URUSAN PENDIDIKAN				623.886,16		901.888,07		945.676,92		1.322.035,98		1.209.418,40		5.002.905,52	
		01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				623.886,16		901.888,07		945.676,92		1.322.035,98		1.209.418,40		5.002.905,52	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	367.069,90	100 %	442.262,45	100 %	455.718,75	100 %	467.193,50	100 %	477.600,15	100 %	2.209.844,74	Disdikpora
		02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Anqka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	100 %	100 %	256.816,26	100 %	459.625,62	100 %	489.958,18	100 %	854.842,49	100 %	731.818,25	100 %	2.793.060,78	Disdikpora
	02		URUSAN KESEHATAN				622.407,36		873.539,76		857.097,20		936.347,83		1.006.900,32		4.296.292,48	
		01	DINAS KESEHATAN				327.334,82		450.050,30		494.378,37		551.134,66		598.569,15		2.421.467,31	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	119.767,46	100 %	183.141,51	100 %	201.735,66	100 %	221.707,23	100 %	244.202,95	100 %	970.554,82	Diskes
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan strandar	100 %	100 %	187.491,19	100 %	244.552,73	100 %	268.051,05	100 %	302.323,40	100 %	324.551,77	100 %	1.326.970,15	Diskes
		03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	100 %	719,80	100 %	513,79	100 %	565,16	100 %	621,68	100 %	683,85	100 %	3.104,28	Diskes
		04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	100 %	270,81	100 %	614,04	100 %	675,44	100 %	742,99	100 %	817,28	100 %	3.120,56	Diskes
		05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	100 %	1.111,19	100 %	1.456,45	100 %	1.602,09	100 %	1.815,50	100 %	1.997,05	100 %	7.982,28	Diskes
			UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I															
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Lavanan Kesehatan	100 %	100 %	1.895,66	100 %	2.085,22	100 %	2.293,75	100 %	2.523,12	100 %	2.775,43	100 %	11.573,19	Diskes
			UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II															
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Lavanan Kesehatan	100 %	100 %	943,13	100 %	1.037,44	100 %	1.141,19	100 %	1.255,31	100 %	1.380,84	100 %	5.757,90	Diskes

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.008,71	100 %	1.109,59	100 %	1.220,54	100 %	1.342,60	100 %	1.476,86	100 %	6.158,30	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.353,68	100 %	1.489,04	100 %	1.637,95	100 %	1.801,74	100 %	1.981,92	100 %	8.264,33	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS KUTA I																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.679,79	100 %	1.847,77	100 %	2.032,55	100 %	2.235,80	100 %	2.459,38	100 %	10.255,28	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS KUTA II																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	513,81	100 %	565,19	100 %	621,71	100 %	683,88	100 %	752,27	100 %	3.136,88	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.920,69	100 %	2.112,76	100 %	2.324,03	100 %	2.556,44	100 %	2.812,08	100 %	11.725,99	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS MENGWI I																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	2.440,66	100 %	2.684,73	100 %	2.953,20	100 %	3.248,52	100 %	3.573,38	100 %	14.900,50	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS MENGWI II																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.343,18	100 %	1.477,50	100 %	1.625,24	100 %	1.787,77	100 %	1.966,55	100 %	8.200,23	Diskes	
			UPTD. PUSKESMAS MENGWI III																
		02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.239,08	100 %	1.362,98	100 %	1.499,28	100 %	1.649,21	100 %	1.814,13	100 %	7.564,68	Diskes	
	UPTD. PUSKESMAS PETANG I																		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	992,06	100 %	1.091,27	100 %	1.200,40	100 %	1.320,44	100 %	1.452,48	100 %	6.056,65	Diskes			
	UPTD. PUSKESMAS PETANG II																		
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	809,56	100 %	890,52	100 %	979,57	100 %	1.077,52	100 %	1.185,28	100 %	4.942,44	Diskes			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp. Juta
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			02	UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	1.834,34	100 %	2.017,78	100 %	2.219,56	100 %	2.441,51	100 %	2.685,66	100 %	11.198,85	Diskes
			02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANGUSADA				295.072,54		423.489,46		362.718,83		385.213,17		408.331,17		1.874.825,17	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	111.646,47	100 %	120.573,57	100 %	139.861,71	100 %	146.482,88	100 %	160.021,17	100 %	678.585,80	RSDM
			02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	100 %	183.426,08	100 %	302.915,89	100 %	222.857,12	100 %	238.730,29	100 %	248.310,00	100 %	1.196.239,37	RSDM
			03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				132.548,63		214.885,42		395.321,71		560.389,75		727.517,71		2.030.663,23	
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				132.548,63		214.885,42		395.321,71		560.389,75		727.517,71		2.030.663,23	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	25.293,27	100 %	27.521,05	100 %	30.548,74	100 %	32.076,18	100 %	33.679,99	100 %	149.119,22	Dinas PUPR
			02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	95,95 %	96,25 %	18.092,93	96,55 %	21.711,52	97,25 %	28.396,56	98,25 %	34.816,39	100,00 %	44.557,21	100 %	147.574,61	Dinas PUPR
			03	PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,99 %	96,00 %	4.303,38	96,10 %	9.280,25	96,50 %	9.744,26	96,80 %	10.231,47	97,20 %	10.743,04	97,20 %	44.302,40	Dinas PUPR
			04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	73,00 %	-	-	74,00 %	750,00	75,00 %	800,00	76,00 %	850,00	77,00 %	900,00	77 %	3.300,00	Dinas PUPR
			05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,04 %	-	-	97,40 %	350,00	97,75 %	3.000,00	97,85 %	6.000,00	98,20 %	7.500,00	98,20 %	16.850,00	Dinas PUPR
			07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	100 %	100 %	7.227,42	100 %	7.950,16	100 %	8.745,17	100 %	9.619,69	100 %	10.581,66	100 %	44.124,10	Dinas PUPR
			08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase banquan gedung berkondisi baik	100 %	100 %	2.196,22	100 %	66.224,06	100 %	226.853,33	100 %	352.290,87	100 %	241.355,42	100 %	888.919,90	Dinas PUPR
			09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	100 %	37.611,21	100 %	39.491,77	100 %	41.466,35	100 %	43.539,67	100 %	45.716,66	100 %	207.825,65	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp. Juta
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98,93 %	98,94 %	34.834,94	98,95 %	38.318,44	99,00 %	42.150,28	99,50 %	66.986,76	100 %	328.107,16	100 %	510.397,58	Dinas PUPR
			11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	990,61	100 %	1.089,67	100 %	1.198,64	100 %	1.318,50	100 %	1.450,35	100 %	6.047,77	Dinas PUPR
			12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.998,66	100 %	2.198,52	100 %	2.418,37	100 %	2.660,21	100 %	2.926,23	100 %	12.201,99	Dinas PUPR
		04		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.458,16		15.349,92		15.963,10		16.891,95		17.893,67		78.556,81	
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				12.458,16		15.349,92		15.963,10		16.891,95		17.893,67		78.556,81	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data tidak tersedia	100 %	10.552,77	100 %	13.715,42	100 %	13.560,25	100 %	14.233,83	100 %	14.979,26	100 %	67.041,53	DPKP
			02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksannya Pengembangan Perumahan	Data tidak tersedia	100 %	8,94	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	25,34	100 %	110,32	DPKP
			03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Data tidak tersedia	100 %	241,97	100 %	63,20	100 %	241,97	100 %	252,28	100 %	263,61	100 %	1.063,03	DPKP
			04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Data tidak tersedia	100 %	218,29	100 %	245,95	100 %	268,19	100 %	297,84	100 %	327,49	100 %	1.357,77	DPKP
			05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	100 %	1.436,18	100 %	1.300,00	100 %	1.867,34	100 %	2.082,66	100 %	2.297,97	100 %	8.984,16	DPKP
		05		URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				83.139,33		107.607,96		110.060,18		118.760,40		126.474,84		546.042,72	
			01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				29.108,05		38.188,64		38.744,73		42.815,18		46.692,19		195.548,78	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	24.852,02	100 %	32.150,23	100 %	32.706,32	100 %	35.800,23	100 %	38.700,70	100 %	164.209,50	Satpol PP
			02	PROGRAM PENINGKATAN DAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan dan ketentraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	4.256,03	90 %	6.038,41	90 %	6.038,41	90 %	7.014,95	90 %	7.991,48	90 %	31.339,28	Satpol PP
			03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				15.328,11		18.940,12		19.379,96		20.583,44		21.095,11		95.326,73	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	7.355,32	100 %	9.013,34	100 %	9.816,80	100 %	9.191,15	100 %	9.529,46	100 %	44.906,07	BPBD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)								Perangkat Daerah Penanggungjawab																				
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026																			
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta																		
1				2		3		4		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
			03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanqgulanqan Bencana	90 %	100 %	7.972,79	100 %	9.926,78	100 %	9.563,16	100 %	11.392,29	100 %	11.565,64	100 %	50.420,66	BPBD																
			04	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				38.703,17		50.479,21		51.935,50		55.361,78		58.687,55		255.167,20																	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	28.604,66	100 %	37.260,99	100 %	38.717,50	100 %	41.017,50	100 %	42.383,58	100 %	187.984,23	Diskarmat																
			02	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	95 %	10.098,51	96 %	13.218,22	97 %	13.218,00	98 %	14.344,28	99 %	16.303,97	100 %	67.182,97	Diskarmat																
			06	URUSAN SOSIAL				36.908,23		41.143,74		67.943,55		69.037,63		69.985,48		285.018,63																	
				DINAS SOSIAL				36.908,23		41.143,74		67.943,55		69.037,63		69.985,48		285.018,63																	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	8.714,91	100 %	10.696,73	100 %	11.424,16	100 %	12.397,81	100 %	13.228,90	100 %	56.462,50	Dinsos																
			02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100 %	100 %	672,92	100 %	2.375,32	100 %	2.159,38	100 %	2.188,60	100 %	2.217,82	100 %	9.614,04	Dinsos																
			04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	559,38	100 %	1.109,43	100 %	1.006,69	100 %	1.037,24	100 %	1.067,80	100 %	4.780,54	Dinsos																
			05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	26.933,47	100 %	26.933,47	100 %	53.323,33	100 %	53.377,68	100 %	53.432,03	100 %	213.999,96	Dinsos																
			06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %	27,55	100 %	28,79	100 %	30,01	100 %	36,31	100 %	38,93	100 %	161,59	Dinsos																
2				URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				414.720,97		569.886,17		653.449,76		714.935,92		791.875,26		3.144.868,07																	
			01	URUSAN TENAGA KERJA				659,37		1.112,34		1.112,34		1.329,58		1.457,81		5.671,45																	
				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				659,37		1.112,34		1.112,34		1.329,58		1.457,81		5.671,45																	
			02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	100 %	100 %	132,40	100 %	315,01	100 %	315,01	100 %	381,01	100 %	413,63	100 %	1.557,06	Disperinaker																

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				Target	Rp. Juta
1				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	1 %	2,5 %	77,41	5 %	86,02	7,5 %	86,02	10 %	101,49	12,5 %	116,97	12,5 %	467,91	Disperinaker	
		04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	26 %	26 %	291,17	27 %	336,23	28 %	336,80	29 %	401,03	30 %	450,54	30 %	1.815,77	Disperinaker	
		05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %	21,03 %	158,39	21,03 %	375,08	21,03 %	374,51	21,03 %	446,04	21,03 %	476,67	21,03 %	1.830,71	Disperinaker	
		02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.240,97		18.387,53		20.320,12		21.285,65		22.062,69		96.296,95		
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.240,97		18.387,53		20.320,12		21.285,65		22.062,69		96.296,95		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	12.877,94	100 %	16.908,39	100 %	18.853,33	100 %	19.726,70	100 %	20.398,06	100 %	88.764,42	Dinas P2KBP3A	
		02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	75 %	166,24	75 %	156,34	75 %	164,57	75 %	160,42	75 %	160,42	75 %	807,99	Dinas P2KBP3A	
		03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	471,46	100 %	500,98	100 %	481,04	100 %	533,87	100 %	586,98	100 %	2.574,34	Dinas P2KBP3A	
		04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Pemberdayaan Keluarga yg Aktif	100 %	100 %	236,74	100 %	247,60	100 %	249,57	100 %	290,60	100 %	332,63	100 %	1.357,14	Dinas P2KBP3A	
		05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	100 %	62,78	100 %	59,04	100 %	62,15	100 %	60,58	100 %	60,58	100 %	305,14	Dinas P2KBP3A	
		06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kateqori Nindya	Kateqori Nindya	227,69	Kateqori Nindya	297,25	Kateqori Nindya	311,33	Kateqori Nindya	315,35	Kateqori Nindya	325,89	Kateqori Nindya	1.477,50	Dinas P2KBP3A	
		07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	198,12	100 %	217,94	100 %	198,12	100 %	198,12	100 %	198,12	100 %	1.010,43	Dinas P2KBP3A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	03	URUSAN PANGAN			128,91		5736,27		6033,82		6303,09		6595,61		24.797,69		
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			128,91		5.736,27		6.033,82		6.303,09		6.595,61		24.797,69		
		2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemanfaatan Lumbung Pangan	Data tidak tersedia	-	-	100 %	556,05	100 %	562,17	100 %	568,35	100 %	574,60	100 %	2.261,17	Diperpa
		3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	100 %	128,91	100 %	5.134,22	100 %	5.375,15	100 %	5.637,17	100 %	5.922,36	100 %	22.197,81	Diperpa
		4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pemetaan Desa Rawan Pangan	Data tidak tersedia	-	-	-	-	100 %	50,00	100 %	50,55	100 %	51,11	100 %	151,66	Diperpa
		5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan keamanan pangan	100 %	-	-	100 %	46,00	100 %	46,51	100 %	47,02	100 %	47,53	100 %	187,06	Diperpa
	04	URUSAN PERTANAHAN			166,97		677,88		677,88		693,23		762,07		2978,04		
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			166,97		677,88		677,88		693,23		762,07		2978,04		
		04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tidak tersedia	100 %	16,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	229,27	100 %	933,36	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
		05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data tidak tersedia	100 %	123,05	100 %	420,96	100 %	420,96	100 %	436,31	100 %	505,15	100 %	1.906,43	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
		08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong	Data tidak tersedia	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	27,65	100 %	138,24	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
	05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			88.366,56		122.154,80		144.763,88		183.148,88		227.513,11		765.947,24		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			88.366,56		122.154,80		144.763,88		183.148,88		227.513,11		765.947,24		
		01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	33.272,90	100 %	44.788,97	100 %	59.506,07	100 %	70.916,24	100 %	83.609,97	100 %	292.094,14	DLHK
		02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	-	-	-	-	100 %	186,77	-	-	-	-	100 %	186,77	DLHK
		03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	765,00	100 %	1.258,94	100 %	1.354,37	100 %	1.787,77	100 %	2.294,31	100 %	7.460,40	DLHK

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100 %	100 %	9.313,41	100 %	12.220,66	100 %	13.442,73	100 %	17.744,40	100 %	22.771,98	100 %	75.493,18	DLHK
		05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Data tidak tersedia	-	-	100 %	25,64	100 %	28,21	100 %	31,03	100 %	34,13	100 %	119,01	DLHK
		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	264,60	100 %	500,57	100 %	550,63	100 %	723,02	100 %	924,39	100 %	2.963,21	DLHK
		07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100 %	100 %	48,71	100 %	190,41	100 %	209,45	100 %	276,47	100 %	390,29	100 %	1.115,33	DLHK
		08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	100 %	136,28	100 %	211,79	100 %	232,07	100 %	302,48	100 %	276,47	100 %	1.159,09	DLHK
		09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data tidak tersedia	-	-	100 %	92,48	100 %	101,73	100 %	111,90	100 %	123,09	100 %	429,20	DLHK
		10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	259,03	100 %	494,00	100 %	543,40	100 %	692,38	100 %	865,74	100 %	2.854,54	DLHK
		11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	100 %	44.306,63	100 %	62.371,34	100 %	68.608,47	100 %	90.563,18	100 %	116.222,75	100 %	382.072,37	DLHK
	06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					15.418,44		15.950,21		19.637,80		21.073,42		22.229,93		94.309,80	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					15.418,44		15.950,21		19.637,80		21.073,42		22.229,93		94.309,80	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	100 %	12.491,04	100 %	12.494,49	100 %	16.184,13	100 %	17.011,48	100 %	17.564,44	100 %	75.745,59	Disdukcapil
		02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	100 %	1.361,04	100 %	1.649,11	100 %	1.649,11	100 %	1.978,93	100 %	2.308,75	100 %	8.946,93	Disdukcapil

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	98 %	1.527,46	98 %	1.767,70	98 %	1.767,70	98 %	2.042,46	98 %	2.317,22	98 %	9.422,54	Disdukcapil
		04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Data tidak tersedia	42 %	38,91	50 %	38,91	58 %	36,86	67 %	40,55	83 %	39,52	83 %	194,74	Disdukcapil
		07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.483,49		15.628,53		16.056,34		17.019,20		17.897,02		78.084,58	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				11.483,49		15.628,53		16.056,34		17.019,20		17.897,02		78.084,58	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	8.501,73	100 %	11.222,16	100 %	11.423,67	100 %	12.018,14	100 %	12.493,85	100 %	55.659,56	DPMD
		02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	4,45	100 %	11,73	100 %	12,91	100 %	14,20	100 %	15,62	100 %	58,90	DPMD
		03	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2.047,72	100 %	2.878,89	100 %	2.952,44	100 %	3.152,81	100 %	3.370,11	100 %	14.401,97	DPMD
		04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	929,59	100 %	1.515,74	100 %	1.667,32	100 %	1.834,05	100 %	2.017,45	100 %	7.964,15	DPMD
		08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				5.231,18		4.941,92		4.696,70		5.004,30		5.312,86		25.186,95	
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.231,18		4.941,92		4.696,70		5.004,30		5.312,86		25.186,95	
		01	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	138,94	2,10 %	128,98	2,10 %	127,67	2,10 %	134,70	2,10 %	142,69	2,10 %	672,99	Dinas P2KBP3A
		02	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	79 %	4.695,99	79 %	4.565,35	79 %	4.326,92	79 %	4.620,13	79 %	4.913,33	79 %	23.121,71	Dinas P2KBP3A
		03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	98 %	100 %	396,25	100 %	247,58	100 %	242,11	100 %	249,47	100 %	256,84	100 %	1.392,26	Dinas P2KBP3A
		09	URUSAN PERHUBUNGAN				63.978,31		67.232,38		85.221,21		79.962,96		82.856,39		379.251,24	
			DINAS PERHUBUNGAN				63.978,31		67.232,38		85.221,21		79.962,96		82.856,39		379.251,24	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	47.300,60	100 %	52.331,97	100 %	65.436,95	100 %	59.327,27	100 %	61.359,55	100 %	285.756,34	Dishub
		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Data tidak tersedia	100 %	16.677,71	100 %	14.900,41	100 %	19.784,26	100 %	20.635,69	100 %	21.496,83	100 %	93.494,90	Dishub

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				55.870,65		70.760,53		82.588,66		92.241,63		102.076,09		403.537,57		
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				55.870,65		70.760,53		82.588,66		92.241,63		102.076,09		403.537,57		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	10.772,67	100 %	16.952,35	100 %	20.381,88	100 %	23.109,17	100 %	25.393,89	100 %	96.609,96	Diskominfo	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emplementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	64,29	100 %	906,68	100 %	2.399,11	100 %	2.950,84	100 %	3.544,93	100 %	4.168,52	100 %	13.970,09	Diskominfo	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	94,29 %	100 %	44.191,30	100 %	51.409,07	100 %	59.255,94	100 %	65.587,53	100 %	72.513,68	100 %	292.957,52	Diskominfo	
		11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				12.576,70		13.469,89		17.067,19		17.814,49		18.748,87		79.677,14		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				12.576,70		13.469,89		17.067,19		17.814,49		18.748,87		79.677,14		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Data tidak tersedia	100 %	11.240,30	100 %	12.082,94	100 %	15.581,21	100 %	16.140,24	100 %	16.875,45	100 %	71.920,13	Diskop UKMP	
			02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Data tidak tersedia	100 %	12,03	100 %	13,23	100 %	14,55	100 %	16,01	100 %	17,61	100 %	73,43	Diskop UKMP
			03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Data tidak tersedia	100 %	124,27	100 %	136,69	100 %	150,36	100 %	165,40	100 %	181,94	100 %	758,66	Diskop UKMP
			04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Data tidak tersedia	100 %	133,01	100 %	160,42	100 %	160,42	100 %	192,51	100 %	224,59	100 %	870,96	Diskop UKMP
			05	PROGRAM PENNDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan pemahaman terhadap perkoperasian	Data tidak tersedia	100 %	157,27	100 %	173,00	100 %	190,29	100 %	209,32	100 %	230,26	100 %	960,14	Diskop UKMP
			06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Data tidak tersedia	100 %	295,09	100 %	324,60	100 %	357,06	100 %	392,76	100 %	432,04	100 %	1.801,55	Diskop UKMP
			07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	Data tidak tersedia	100 %	311,54	100 %	342,69	100 %	376,96	100 %	414,66	100 %	456,12	100 %	1.901,97	Diskop UKMP
			08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Data tidak tersedia	100 %	303,20	100 %	236,33	100 %	236,33	100 %	283,59	100 %	330,86	100 %	1.390,30	Diskop UKMP

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	12		URUSAN PENANAMAN MODAL				24.012,64		27.309,22		33.375,80		33.745,48		34.937,66		153.380,79	
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				24.012,64		27.309,22		33.375,80		33.745,48		34.937,66		153.380,79	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	Data tidak tersedia	100 %	21.494,53	100 %	23.532,74	100 %	29.032,10	100 %	29.489,01	100 %	30.582,67	100 %	134.131,04	DPMPTSP
		02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	Data tidak tersedia	-	-	100 %	221,31	100 %	243,44	100 %	267,79	100 %	294,56	100 %	1.027,10	DPMPTSP
		03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	Data tidak tersedia	-	-	100 %	211,72	100 %	232,89	100 %	256,18	100 %	268,99	100 %	969,77	DPMPTSP
		04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	Data tidak tersedia	100 %	1.285,32	100 %	1.897,98	100 %	2.155,85	100 %	2.073,64	100 %	2.312,22	100 %	9.725,01	DPMPTSP
		05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	Data tidak tersedia	-	-	100 %	102,67	100	112,94	100 %	124,23	100 %	136,66	100 %	476,50	DPMPTSP
		06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Data tidak tersedia	100 %	1.232,78	100 %	1.342,80	100 %	1.598,58	100 %	1.534,63	100 %	1.342,57	100 %	7.051,36	DPMPTSP
	13		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.502,45		30.221,04		34.244,79		38.311,16		43.163,85		155443,29	
			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				9.502,45		30.221,04		34.244,79		38.311,16		43.163,85		155.443,29	
		02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	-	-	100 %	709,68	100 %	780,65	100 %	858,71	100 %	944,58	100 %	3.293,62	Disdikpora
		03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	100 %	8.974,39	100 %	29.026,86	100 %	32.812,30	100 %	36.735,42	100 %	41.115,05	100 %	148.664,02	Disdikpora
		04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	100 %	528,06	100 %	484,50	100 %	651,84	100 %	717,03	100 %	1.104,22	100 %	3.485,65	Disdikpora
	14		URUSAN STATISTIK				13,03		287,81		388,72		457,59		530,35		1.677,49	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13,03		287,81		388,72		457,59		530,35		1.677,49	
		01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	66,67 %	100 %	13,03	100 %	287,81	100 %	388,72	100 %	457,59	100 %	530,35	100 %	1.677,49	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	15	URUSAN PERSANDIAN			22,82		301,69		497,44		577,19		661,91		2061,04		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			22,82		301,69		497,44		577,19		661,91		2061,04		
		02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	18,75 %	100 %	22,82	100 %	301,69	100 %	497,44	100 %	577,19	100 %	661,91	100 %	2.061,04	Diskominfo
	16	URUSAN KEBUDAYAAN			98.838,89		156.226,61		166.416,47		174.546,55		182.644,15		778.672,66		
		DINAS KEBUDAYAAN			98.838,89		156.226,61		166.416,47		174.546,55		182.644,15		778.672,66		
		01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	13.747,44	100 %	15.906,42	100 %	19.126,18	100 %	19.875,84	100 %	20.227,07	100 %	88.882,96	Disbud
		02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara Adat	100 %	100 %	83.891,63	100 %	99.658,44	100 %	104.641,36	100 %	109.873,43	100 %	115.367,10	100 %	513.431,96	Disbud
		03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	140,22	36 %	10.718,36	36 %	11.254,28	36 %	11.817,00	36 %	12.407,85	36 %	46.337,71	Disbud
		04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Penduduk yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah	Data tidak tersedia	-	-	25 %	3.462,96	25 %	3.636	25 %	3.818	25 %	4.009	25 %	14.925,77	Disbud
		05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi	15 unit	10 unit	202,27	10 unit	24.827,06	10 unit	26.068,41	10 unit	27.371,83	10 unit	28.740,42	50 unit	107.210,00	Disbud
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	Data tidak tersedia	-	-	3 unit	744,86	3 unit	782,10	3 unit	821,21	3 unit	862,27	12 unit	3.210,44	
		06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Data tidak tersedia	1 unit	857,33	1 unit	908,51	1 unit	908,03	1 unit	969,33	1 unit	1.030,64	1 unit	4.673,83	Disbud
	17	URUSAN PERPUSTAKAAN			13.626,00		18.204,07		19.067,17		19.996,59		20.858,46		91.752,29		
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			13.626,00		18.204,07		19.067,17		19.996,59		20.858,46		91.752,29		
		01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	13.302,33	100 %	17.719,40	100 %	18.111,90	100 %	19.026,33	100 %	19.809,93	100 %	87.969,88	Diskerpus
		02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	6,69 Nilai Indek	8,13 Nilai Indek	323,67	8,13 Nilai Indek	323,67	8,85 Nilai Indek	794,27	9,57 Nilai Indek	809,27	10,29 Nilai Indek	887,53	11,01 Nilai Indek	3.138,41	Diskerpus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang lestarikan	Data tidak tersedia	-	-	25 %	161,00	25 %	161,00	25 %	161,00	25 %	161,00	100 %	644,00	Diskerpus
18	URUSAN KEARSIPAN				583,60		1.283,44		1.283,44		1.424,93		1.566,44		6.141,85	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				583,60		1.283,44		1.283,44		1.424,93		1.566,44		6.141,85	
	02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	22 %	26 %	583,60	28 %	1.017,44	30 %	1.017,44	32 %	1.158,93	34 %	1.300,44	34 %	5.077,85	Diskerpus
	03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	0,16 %	-	-	25 %	143,00	25 %	143,00	25 %	143,00	25 %	143,00	100 %	572,00	Diskerpus
	04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	15 Orang	-	-	30 Orang	123,00	30 Orang	123,00	30 Orang	123,00	30 Orang	123,00	120 Orang	492,00	Diskerpus
3	URUSAN PILIHAN				94.912,92		210.106,66		238.384,19		239.491,68		255.701,27		1.038.596,72	
01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.179,16		13.192,63		29.943,15		16.963,27		18.549,43		89.827,63	
	DINAS PERIKANAN				11.179,16		13.192,63		29.943,15		16.963,27		18.549,43		89.827,63	
	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	60 Bulan	12 Bulan	9.872,12	12 Bulan	9.768,68	12 Bulan	12.430,72	12 Bulan	13.063,12	12 Bulan	13.764,27	60 Bulan	58.898,91	Diskan
	02 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	7.922,3 Ton	7.437 Ton	1.052,10	7.986 Ton	839,42	8.146 Ton	918,86	8.309 Ton	2.606,77	8.475 Ton	2.863,13	40.353 Ton	8.280,28	Diskan
	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	730,2 Ton	637 Ton	254,94	650 Ton	1.748,57	663 Ton	16.132,73	676 Ton	771,49	690 Ton	1.347,95	3.316 Ton	20.255,69	Diskan
	04 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	Data tidak tersedia	-	-	1 Kawasan	575,66	1 Kawasan	161,50	1 Kawasan	177,65	1 Kawasan	195,41	5 Kawasan	1.110,21	Diskan
	05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6.519 Ton	-	-	6.742 Ton	260,29	6.877 Ton	299,34	7.014 Ton	344,24	7.154 Ton	378,66	34.397 Ton	1.282,54	Diskan
02	URUSAN PARIWISATA				25.130,67		92.816,73		95.634,99		100.198,51		104.205,40		417.986,29	
	DINAS PARIWISATA				25.130,67		92.816,73		95.634,99		100.198,51		104.205,40		417.986,29	
	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem	100 %	100 %	14.217,69	100 %	17.542,11	100 %	23.619,89	100 %	24.694,73	100 %	25.413,88	100 %	105.488,29	Dispar
	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	72 %	72 %	6.407,76	74,35 %	70.638,15	76,92 %	65.604,14	79,48 %	68.360,05	82,05 %	70.845,02	82,05 %	281.855,12	Dispar

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	-82,71 % (1.071.227 orang)	30 % (455 orang)	4.291,43	40 % (637 orang)	4.411,76	50 % (956 orang)	4.969,71	60 % (1530 orang)	5.612,95	70 % (2601 orang)	6.341,28	70 % (2601 orang)	25.627,13	Dispar
		04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	Data tidak tersedia	20 % (50 usaha)	213,79	20 % (50 usaha)	224,71	20 % (50 usaha)	224,71	20 % (50 usaha)	277,75	20 % (50 usaha)	314,60	100 % (250 usaha)	1.255,56	Dispar
		05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	80 % (640 org)	- -	-	- -	-	33,33 % (160 org)	1.216,53	33,33 % (160 org)	1.253,03	33,33 % (160 org)	1.290,62	100 % (480 org)	3.760,18	Dispar
		03	URUSAN PERTANIAN				46.215,17		86.602,98		93.605,21		101.724,48		110.082,01		438.229,84	
			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				46.215,17		86.602,98		93.605,21		101.724,48		110.082,01		438.229,84	
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	100 %	4.206,43	100 %	27.884,47	100 %	28.500,99	100 %	29.494,10	100 %	30.526,11	100 %	120.612,09	Diperpa
		3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	56 %	65 %	4.790,47	67 %	6.553,92	70 %	7.901,13	72 %	9.539,15	75 %	10.808,41	75 %	39.593,09	Diperpa
		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesakitan ternak atau hewan	1,40 %	5 %	1.476,01	5 %	3.131,50	5 %	3.429,55	5 %	3.740,25	5 %	4.103,50	5 %	15.880,81	Diperpa
		5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan pengendalian dan penanggulanqan bencana pertanian	100 %	100 %	108,98	100 %	779,78	100 %	804,28	100 %	884,71	100 %	973,18	100 %	3.550,93	Diperpa
		7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %	100 %	1.317,50	100 %	2.208,14	100 %	2.232,43	100 %	2.256,99	100 %	2.281,81	100 %	10.296,88	Diperpa
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKJIP	82,08	84,50	34.315,78	84,55	46.045,17	84,58	50.736,83	85	55.809,28	85,01	61.388,99	85,01	248.296,04	Diperpa
		04	URUSAN PERDAGANGAN				1.174,77		4.122,49		4.491,06		4.983,84		5.517,18		20.289,33	
			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				1.174,77		4.122,49		4.491,06		4.983,84		5.517,18		20.289,33	
		03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Data tidak tersedia	100 %	678,92	100 %	3.005,35	100 %	3.305,89	100 %	3.636,48	100 %	4.000,13	100 %	14.626,76	Diskop UKMP
		04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan harga barang komoditi terhadap pedagang pasar	Data tidak tersedia	100 %	54,61	100 %	60,07	100 %	66,08	100 %	72,69	100 %	79,96	100 %	333,42	Diskop UKMP
		05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab.Badung	Data tidak tersedia	100 %	53,58	100 %	58,93	100 %	64,83	100 %	71,31	100 %	78,44	100 %	327,08	Diskop UKMP

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Data tidak tersedia	100 %	387,66	100 %	473,04	100 %	476,66	100 %	568,01	100 %	659,75	100 %	2.565,12	Diskop UKMP
		07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	Data tidak tersedia	-	-	100 %	525,09	100 %	577,60	100 %	635,36	100 %	698,90	100 %	2.436,95	Diskop UKMP
		05	URUSAN PERINDUSTRIAN				11.213,15		13.371,84		14.709,78		15.621,58		17.347,26		72.263,61	
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA				11.213,15		13.371,84		14.709,78		15.621,58		17.347,26		72.263,61	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	Data tidak tersedia	100 %	10.578,10	100 %	12.653,96	100 %	13.972,59	100 %	14.788,75	100 %	16.421,04	100 %	68.414,45	Disperinaker
		02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	Data tidak tersedia	20 %	383,98	20 %	589,18	20 %	595,63	20 %	677,12	20 %	754,93	20 %	3.000,84	Disperinaker
		03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	Data tidak tersedia	100 %	63,15	100 %	34,73	100 %	38,20	100 %	42,02	100 %	46,23	100 %	224,33	Disperinaker
		04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIINas	Data tidak tersedia	100 %	187,92	100 %	93,96	100 %	103,36	100 %	113,69	100 %	125,06	100 %	624,00	Disperinaker
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				287.619,18		352.187,41		375.618,54		404.494,42		430.099,40		1.850.018,95	
		01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				287.619,18		352.187,41		375.618,54		404.494,42		430.099,40		1.850.018,95	
		3	SEKRETARIAT DAERAH				182.000,05		225.392,43		247.819,40		269.189,69		292.173,90		1.216.575,47	
		a.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				758,75		957,25		984,79		1.215,02		1.346,68		5.262,48	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Data tidak tersedia	100 %	758,75	100 %	957,25	100 %	984,79	100 %	1.215,02	100 %	1.346,68	100 %	5.262,48	Setda (Bagian Kesra)
		b.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				1.734,53		2.762,94		2.762,94		2.779,21		2.939,65		12.979,27	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data tidak tersedia	100 %	1.734,53	100 %	2.762,94	100 %	2.762,94	100 %	2.779,21	100 %	2.939,65	100 %	12.979,27	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
		c.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				11.318,98		12.450,88		13.695,97		15.065,57		16.572,12		69.103,52	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data tidak tersedia	100 %	11.318,98	100 %	12.450,88	100 %	13.695,97	100 %	15.065,57	100 %	16.572,12	100 %	69.103,52	Setda (Bagian Protokol dan Komunikasi)
		d.	BAGIAN HUKUM				5.403,04		5.943,34		6.537,67		7.191,44		7.910,58		32.986,07	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	5.403,04	100 %	5.943,34	100 %	6.537,67	100 %	7.191,44	100 %	7.910,58	100 %	32.986,07	Setda (Bagian Hukum)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
1	2	3	4	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	17	18	19
	e.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			92,67		533,67		560,35		588,37		617,79		2.392,85			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan	Data tidak tersedia	3 produk	92,67	3 produk	533,67	3 produk	560,35	3 produk	588,37	3 produk	617,79	15 produk	2.392,85	Setda (Bagian Sumber Daya Alam)	
	f.	BAGIAN PEREKONOMIAN			160,88		808,03		836,71		838,41		872,19		3.516,21			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terwujudnya pemban pembangunan yang tepat waktu	Data tidak tersedia	100 %	160,88	100 %	808,03	100 %	836,71	100 %	838,41	100 %	872,19	100 %	3.516,21	Setda (Bagian Perekonomian)	
	g	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			751,22		796,84		844,44		896,80		954,39		4.243,69			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	100 %	751,22	100 %	796,84	100 %	844,44	100 %	896,80	100 %	954,39	100 %	4.243,69	Setda (Bagian Administrasi Pembangunan)	
	h.	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			292,11		3.456,50		3.611,29		3.611,29		3.611,29		14.582,49			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan	Data tidak tersedia	100 %	292,11	100 %	3.456,50	100 %	3.611,29	100 %	3.611,29	100 %	3.611,29	100 %	14.582,49	Setda (Bagian PBJ)	
	i.	BAGIAN ORGANISASI			368,24		1.904,81		2.095,29		2.304,82		2.535,31		9.208,47			
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan nilai PMPRB kategori baik	28,95 %	47 %	368,24	60 %	1.904,81	70 %	2.095,29	80 %	2.304,82	100 %	2.535,31	100 %	9.208,47	Setda (Bagian Organisasi)	
	j.	BAGIAN UMUM			99.493,65		114.003,54		125.403,90		137.994,29		151.793,72		628.689,10			
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Data tidak tersedia	100 %	99.493,65	100 %	114.003,54	100 %	125.403,90	100 %	137.994,29	100 %	151.793,72	100 %	628.689,10	Setda (Bagian Umum)	
	k.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			61.498,53		81.356,33		90.056,70		96.252,41		102.495,22		431.659,18			
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	61.498,53	100 %	81.356,33	100 %	90.056,70	100 %	96.252,41	100 %	102.495,22	100 %	431.659,18	Setda (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	
	l.	BAGIAN KERJASAMA			127,47		418,30		429,35		452,06		524,96		1.952,13			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Data tidak tersedia	100 %	127,47	100 %	418,30	100 %	429,35	100 %	452,06	100 %	524,96	100 %	1.952,13	Setda (Bagian Kerjasama)	
	4	SEKRETARIAT DPRD			105.619,12		126.794,98		127.799,14		135.304,73		137.925,50		633.443,48			
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	59.490,02	100 %	71.682,85	100 %	71.982,92	100 %	77.715,51	100 %	79.027,52	100 %	359.898,83	Sekretariat DPRD	
	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80 %	82,00 %	46.129,11	82,50 %	55.112,13	83,00 %	55.816,22	83,50 %	57.589,22	84,50 %	58.897,97	84,50 %	273.544,65	Sekretariat DPRD	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				461.356,33		925.122,85		873.998,29		953.161,84		963.864,38		4.177.503,70	
	01		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				461.356,33		925.122,85		873.998,29		953.161,84		963.864,38		4.177.503,70	
	01		PERENCANAAN				17.065,43		20.419,52		24.082,74		25.297,86		26.384,98		113.250,54	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				17.065,43		20.419,52		24.082,74		25.297,86		26.384,98		113.250,54	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	14.076,74	100 %	15.392,71	100 %	18.464,15	100 %	19.588,06	100 %	20.490,93	100 %	88.012,57	Bappeda
		02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	99,04%	100 %	1.847,76	100 %	3.113,00	100 %	3.657,12	100 %	3.544,35	100 %	3.519,38	100 %	15.681,61	Bappeda
		02	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	1.140,93	100 %	1.913,82	100 %	1.961,48	100 %	2.165,45	100 %	2.374,68	100 %	9.556,36	Bappeda
	02		KEUANGAN				415.086,29		865.313,39		808.085,32		881.202,20		889.081,87		3.858.769,07	
		01	BADAN PENDAPATAN DAERAH/ PASEDAHAN AGUNG				80.745,14		177.505,50		184.140,41		189.705,66		195.096,73		827.193,45	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	73.311,01	100 %	167.955,06	100 %	174.240,42	100 %	179.469,34	100 %	184.851,95	100 %	779.827,78	Bapenda
		04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 jenis pajak	10 jenis pajak	7.434,13	10 jenis pajak	9.550,44	10 jenis pajak	9.899,99	10 jenis pajak	10.236,32	10 jenis pajak	10.244,78	10 jenis pajak	47.365,67	Bapenda
		02	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				334.341,15		687.807,89		623.944,91		691.496,54		693.985,14		3.031.575,62	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP	100 %	100 %	18.987,35	100 %	23.881,32	100 %	26.961,40	100 %	28.023,74	100 %	31.089,08	100 %	128.942,89	BPKAD
		02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	311.600,59	100 %	659.498,64	100 %	592.112,89	100 %	658.115,13	100 %	657.036,21	100 %	2.878.363,46	BPKAD
		03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	100 %	3.753,20	100 %	4.427,93	100 %	4.870,61	100 %	5.357,68	100 %	5.859,85	100 %	24.269,27	BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	KEPEGAWAIAN				14.252,46		17.425,88		19.391,00		21.061,17		22.453,79		94.584,31	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				14.252,46		17.425,88		19.391,00		21.061,17		22.453,79		94.584,31	
	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	12.595,10	100 %	13.545,83	100 %	15.192,97	100 %	15.986,24	100 %	16.830,92	100 %	74.151,05	BKPSDM
	02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	Data tidak tersedia	100 %	1.657,36	100 %	3.880,06	100 %	4.198,03	100 %	5.074,93	100 %	5.622,88	100 %	20.433,25	BKPSDM
04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.841,24		5.690,79		6.259,87		6.885,86		7.574,45		31.252,22	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.841,24		5.690,79		6.259,87		6.885,86		7.574,45		31.252,22	
	02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Data tidak tersedia	100 %	4.841,24	100 %	5.690,79	100 %	6.259,87	100 %	6.885,86	100 %	7.574,45	100 %	31.252,22	BKPSDM
05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.110,92		16.273,26		16.179,36		18.714,74		18.369,29		79.647,56	
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.110,92		16.273,26		16.179,36		18.714,74		18.369,29		79.647,56	
	01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	60 %	100 %	2.489,16	100 %	7.377,14	100 %	6.604,80	100 %	7.850,11	100 %	6.967,25	100 %	31.288,46	Balitbang
	02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	83,66 %	100 %	7.621,76	100 %	8.896,12	100 %	9.574,56	100 %	10.864,63	100 %	11.402,04	100 %	48.359,10	Balitbang
5	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				18.255,18		21.943,57		24.043,87		25.522,02		27.004,67		116.769,31	
01	PENGAWASAN				18.255,18		21.943,57		24.043,87		25.522,02		27.004,67		116.769,31	
	INSPEKTORAT				18.255,18		21.943,57		24.043,87		25.522,02		27.004,67		116.769,31	
	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	17.710,58	100 %	21.409,21	100 %	23.482,80	100 %	24.932,90	100 %	26.386,09	100 %	113.921,58	Inspektorat
	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100 %	100 %	288,51	100 %	420,58	100 %	441,60	100 %	463,68	100 %	486,87	100 %	2.101,24	Inspektorat
	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100 %	100 %	256,08	100 %	113,78	100 %	119,47	100 %	125,44	100 %	131,71	100 %	746,48	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
1	2			3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6			UNSUR KEWILAYAHAN				100.684,04		140.094,97		150.976,07		161.570,52		172.091,31		725.416,92	
	01		UNSUR KEWILAYAHAN				100.684,04		140.094,97		150.976,07		161.570,52		172.091,31		725.416,92	
			1 SEKRETARIAT DAERAH				372,85		377,85		377,85		377,85		377,85		1884,24	
		a.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				372,85		377,85		377,85		377,85		377,85		1884,24	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Fasilitas Penetapan Dan Peneqasan Batas Desa	Data tidak tersedia	100 %	372,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	377,85	100 %	1.884,24	Setda (Bagian Tata Pemerintahan)
		2	KECAMATAN KUTA				23.230,05		28.468,32		29.978,83		32.047,87		33.929,35		147.654,41	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	15.934,82	100 %	20.694,67	100 %	20.810,29	100 %	22.209,50	100 %	23.364,78	100 %	103.014,05	Kecamatan Kuta
		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	2.980,45	100 %	3.531,28	100 %	3.531,28	100 %	3.637,38	100 %	3.743,48	100 %	17.423,88	Kecamatan Kuta
		03	PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	3.712,63	100 %	3.898,26	100 %	5.258,74	100 %	5.784,62	100 %	6.363,08	100 %	25.017,32	Kecamatan Kuta
		04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	350,00	100 %	66,74	100 %	73,42	100 %	80,76	100 %	88,84	100 %	659,76	Kecamatan Kuta
		05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	252,15	100 %	277,36	100 %	305,10	100 %	335,61	100 %	369,17	100 %	1.539,39	Kecamatan Kuta
		3	KECAMATAN KUTA UTARA				17.674,41		26.695,81		28.681,59		30.605,61		32.289,53		135.946,94	
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	13.552,21	100 %	16.868,88	100 %	17.934,85	100 %	18.736,63	100 %	19.197,13	100 %	86.289,69	Kecamatan Kuta Utara
		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	3.823,44	100 %	5.213,58	100 %	5.672,06	100 %	6.286,84	100 %	6.952,05	100 %	27.947,98	Kecamatan Kuta Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta
1				2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	49,02	100 %	4.146,64	100 %	4.561,30	100 %	5.017,43	100 %	5.519,17	100 %	19.293,56	Kecamatan Kuta Utara
			04	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	-	-	100 %	88,82	100 %	97,70	100 %	107,47	100 %	118,22	100 %	412,20	Kecamatan Kuta Utara
			05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	153,07	100 %	208,38	100 %	229,22	100 %	252,14	100 %	277,35	100 %	1.120,17	Kecamatan Kuta Utara
			06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	96,66	100 %	169,51	100 %	186,46	100 %	205,11	100 %	225,62	100 %	883,35	Kecamatan Kuta Utara
			4	KECAMATAN KUTA SELATAN				15.328,98		24.046,06		24.803,33		25.917,85		26.916,39		117.012,61	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	11.234,00	100 %	14.752,86	100 %	15.510,12	100 %	16.257,23	100 %	16.873,25	100 %	74.627,45	Kecamatan Kuta Selatan
			02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta	100 %	100 %	3.848,35	100 %	4.806,19	100 %	4.806,19	100 %	5.173,61	100 %	5.551,75	100 %	24.186,10	Kecamatan Kuta Selatan
			03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	46,09	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	3.910,26	100 %	15.687,12	Kecamatan Kuta Selatan
			04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	173,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	217,93	100 %	1.045,63	Kecamatan Kuta Selatan
			05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	100 %	26,62	100 %	67,20	100 %	67,20	100 %	67,20	100 %	71,58	100 %	299,80	Kecamatan Kuta Selatan
			06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta selatan	100 %	-	-	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	291,63	100 %	1.166,52	Kecamatan Kuta Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	5	KECAMATAN MENGWI			24.814,90		37.082,08		40.790,29		44.869,31		49.356,24		196.912,82		
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjano Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	20.346,03	100 %	26.066,53	100 %	28.673,19	100 %	31.540,51	100 %	34.694,56	100 %	141.320,81	Kecamatan Mengwi
	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	3.988,98	100 %	5.069,22	100 %	5.576,14	100 %	6.133,75	100 %	6.747,13	100 %	27.515,21	Kecamatan Mengwi
	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	26,09	100 %	5.702,01	100 %	6.272,22	100 %	6.899,44	100 %	7.589,38	100 %	26.489,14	Kecamatan Mengwi
	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	349,84	100 %	28,94	100 %	31,83	100 %	35,02	100 %	38,52	100 %	484,15	Kecamatan Mengwi
	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	75,01	100 %	129,34	100 %	142,28	100 %	156,50	100 %	172,15	100 %	675,29	Kecamatan Mengwi
	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	28,95	100 %	86,03	100 %	94,64	100 %	104,10	100 %	114,51	100 %	428,23	Kecamatan Mengwi
	6	KECAMATAN ABIANSEMAL			10.096,20		11.793,88		14.444,13		15.249,08		15.939,08		67.522,37		
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjano urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	9.333,06	100 %	10.882,63	100 %	13.503,48	100 %	14.213,53	100 %	14.805,39	100 %	62.738,09	Kecamatan Abiansemal
	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	471,09	100 %	637,99	100 %	640,07	100 %	704,91	100 %	769,99	100 %	3.224,04	Kecamatan Abiansemal
	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	17,678	100 %	19,445	100 %	21,390	100 %	23,529	100 %	25,882	100 %	107,92	Kecamatan Abiansemal
	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	100,00	100 %	15,13	100 %	16,65	100 %	18,31	100 %	20,14	100 %	170,24	Kecamatan Abiansemal

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta		
1		2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	122,71	100 %	122,71	100 %	134,98	100 %	148,48	100 %	163,33	100 %	692,20	Kecamatan Abiansemal
		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Abiansemal	100 %	100 %	51,66	100 %	115,97	100 %	127,56	100 %	140,32	100 %	154,35	100 %	589,87	Kecamatan Abiansemal
		7	KECAMATAN PETANG			9.166,66		11.630,98		11.900,07		12.502,95		13.282,87		58.483,54		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Petang	100 %	100 %	8.390,45	100 %	10.804,18	100 %	11.047,13	100 %	11.511,07	100 %	12.149,26	100 %	53.902,10	Kecamatan Petang
		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Petang	100 %	100 %	480,50	100 %	582,39	100 %	584,09	100 %	696,14	100 %	808,29	100 %	3.151,41	Kecamatan Petang
		03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Petang	100 %	100 %	21,51	100 %	23,664	100 %	26,031	100 %	28,634	100 %	31,497	100 %	131,34	Kecamatan Petang
		04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	100 %	100 %	149,55	100 %	30,939	100 %	34,033	100 %	37,437	100 %	41,180	100 %	293,14	Kecamatan Petang
		05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Petang	100 %	100 %	104,26	100 %	114,688	100 %	126,157	100 %	138,773	100 %	152,650	100 %	636,53	Kecamatan Petang
		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Petang	100 %	100 %	20,39	100 %	75,120	100 %	82,632	100 %	90,895	100 %	99,985	100 %	369,02	Kecamatan Petang
7			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			11.448,68		12.171,11		17.392,46		19.021,70		22.306,98		82.340,93		
	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11.448,68		12.171,11		17.392,46		19.021,70		22.306,98		82.340,93		
		01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11.448,68		12.171,11		17.392,46		19.021,70		22.306,98		82.340,93		
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	7.842,14	100 %	8.234,24	100 %	13.126,90	100 %	14.439,59	100 %	17.266,66	100 %	60.909,53	Bakesbangpol
		02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	13,19	100 %	13,85	100 %	15,23	100 %	16,75	100 %	18,43	100 %	77,44	Bakesbangpol

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1		2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kegiatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	3.047,02	100 %	3.349,38	100 %	3.619,31	100 %	3.871,24	100 %	4.258,37	100 %	18.145,33	Bakesbanqpol
		04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	-	-	-	-	100 %	32,57	100 %	35,82	100 %	39,40	100 %	107,79	Bakesbangpol
		05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100 %	100 %	208,13	100 %	218,54	100 %	207,83	100 %	228,61	100 %	251,47	100 %	1.114,58	Bakesbangpol
		06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %	338,20	100 %	355,11	100 %	390,62	100 %	429,68	100 %	472,65	100 %	1.986,25	Bakesbanqpol
JUMLAH						2.900.345,17		4.385.927,61		4.725.925,85		5.541.661,64		5.821.133,70				

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Badung, Sedangkan Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung dalam aspek pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kabupaten Badung dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) untuk menilai kinerja organisasi, mesti memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021–2026.

Pada Tabel 8.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Tabel 8.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Tabel 8.3 Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 8.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Kabupaten Badung

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,45 (Tinggi)	82,00 (Sangat Tinggi)	82,00 (Sangat Tinggi)	83,00 (Sangat Tinggi)	83,50 (Sangat Tinggi)	84,00 (Sangat Tinggi)	84,00 (Sangat Tinggi)
2	Nilai Sakip	77,90 (BB)	78,75 (BB)	79,00 (BB)	79,50 (BB)	79,75 (BB)	80,10 (A)	80,10 (A)
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Data Tidak Tersedia	3,10 (Baik)	3,20 (Baik)	3,30 (Baik)	3,40 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)	3,50 (Sangat Baik)
5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	47,82 (Sangat Rendah)	52,70 (Sangat Rendah)	57,65 (Sangat Rendah)	62,57 (Rendah)	67,55 (Rendah)	72,40 (Sedang)	72,40 (Sedang)
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data Tidak Tersedia	84,50 (Baik)	85,50 (Baik)	86,50 (Baik)	87,50 (Baik)	88,50 (Sangat Baik)	88,50 (Sangat Baik)
7	Persentase Penegakan Perda Dan Perkada	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
8	Capaian Atas Kepedulian HAM	81.29 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)	75.00 (Peduli HAM)
9	Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya	62,00%	67,00%	71,00%	76,00%	80,00%	85,00%	85,00%
10	Indeks Pembangunan Manusia	81,59 (Sangat Tinggi)	81,60 (Sangat Tinggi)	81,61 (Sangat Tinggi)	81,63 (Sangat Tinggi)	81,65 (Sangat Tinggi)	81,67 (Sangat Tinggi)	81,67 (Sangat Tinggi)
11	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	30,84%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	10,00%
12	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	5,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%
13	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,78%	8,78%	9,54%	10,48%	11,39%	12,30%	12,30%
14	Indeks Kebahagiaan	Data Tidak Tersedia	76,39	76,64	76,89	77,14	77,39	77,39
15	Persentase Penduduk Miskin	1,78%	2,00%	1,95%	1,80%	1,78%	1,65%	1,65%
16	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	2,56%	2,56%	5,12%	7,69%	10,25%	12,82%	12,82%

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Tahun 2026)
			Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
17	Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,13%	31,37%	31,67%	31,83%	31,98%	32,27%	32,27%
18	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Data Tidak Tersedia	92,73 (Defisit)	94,73 (Defisit)	100,00 (Impas)	101,00 (Surplus)	101,50 (Surplus)	101,50 (Surplus)
19	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Data Tidak Tersedia	100,30	100,40	100,50	100,60	100,70	100,70
20	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	24,61%	24,50%	25,00%	26,50%	27,50%	29,00%	29,00%
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,85 (Baik)	61,55 (Sedang)	61,64 (Sedang)	61,72 (Sedang)	61,81 (Sedang)	61,89 (Sedang)	61,89 (Sedang)
22	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,6945 (Tinggi)	3,7491 (Tinggi)	3,7582 (Tinggi)	3,7673 (Sangat Tinggi)	3,7764 (Sangat Tinggi)	3,7855 (Sangat Tinggi)	3,7855 (Sangat Tinggi)

Tabel 8.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15-7,15	6,15-7,20	2,50-3,00	3,00-4,50	4,50-5,50	5,50-6,20	6,20-7,10	6,20-7,10
2	Laju inflasi (%)	0,55	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%	3,5 ± 1%
3	PDRB Perkapita ADHK (Dalam Juta Rp.)	31.159.948,00	31.471.547,48	32.415.693,90	34.036.478,60	36.759.396,89	37.698.580,98	40.337.481,65	40.337.481,65
4	PDRB Perkapita ADHB (Dalam Juta Rp.)	49.215.255,30	50.199.560,41	50.691.712,96	53.226.298,61	57.484.402,50	63.350.592,99	67.785.134,50	67.785.134,50
5	Indeks Gini	0,317	0,309	0,301	0,300	0,299	0,291	0,282	0,282
6	Tingkat Kemiskinan (%)	1,78	0,60	2,00	1,95	1,80	1,78	1,65	1,65
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,37	81,57	81,60	81,61	81,63	81,65	81,67	81,67
8	Tingkat pengangguran terbuka (%)	0,32	0,31	1,20-3,00	1,00-2,00	0,90-1,50	0,60- 0,90	0,30- 0,60	0,30- 0,60
9	Presentase balita gizi buruk	0,8	1,59	1,58	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53
10	Persentase Balita gizi kurang (%)	2,2	3,23	3,22	3,21	3,2	3,19	3,18	3,18
11	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,95	95,95	95,95	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
12	Penguatan Cadangan Pangan (%)	Data tidak tersedia	277	282	287	292	297	302	302
13	Penanganan daerah rawan pangan	Data tidak tersedia	6	6	6	6	6	6	6
14	Produksi kakao	95,93	95,93	97,85	99,81	101,80	103,84	105,92	105,92
15	Produksi kelapa	2.122,63	2.122,63	2.165,08	2.208,38	2.252,55	2.292,60	2343,56	2343,56
16	Produksi Kopi	689,55	703,34	717,41	731,76	746,39	761,32	776,55	776,55
17	Produksi Vanilli	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,31	0,32	0,32
18	Produksi Kapuk	40,00	41,20	42,44	43,71	45,02	46,37	47,76	47,76
19	Produksi Jambu Mette	6,40	6,59	6,79	6,99	7,20	7,42	7,64	7,64
20	Produksi cengkeh	41,60	43,37	44,24	45,12	46,03	46,95	47,88	47,88
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka kriminalitas	1096	1096	984	902	837	781	738	738
2	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1.	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.	Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Angka partisipasi sekolah								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	Data tidak tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Data tidak tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Angka Kelulusan :								
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM) :								
1.8.1	Angka Melanjutkan Ke SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	Fasilitas Pendidikan :								
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	5,066	5,016	4,966	4,917	4,868	4,820	4,820	4,820
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1:15	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah	1:15	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1:15	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:15	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
1.15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Kesehatan :								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	2.29 per 1000 KH	2.29 per 1000 KH	2.27 per 1000 KH	2.25 per 1000 KH	2.23 per 1000 KH	2.21 per 1000 KH	2.19 per 1000 KH	2.19 per 1000 KH
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	1-2.29/1000 KH	1-2.29/1000 KH	1-2,24/1000 KH	1-2,19/1000 KH	1-2,14/1000 KH	1-2,09/1000 KH	1-2,04/1000 KH	1-2,04/1000 KH
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2.77 per 1000 KH	2.77 per 1000 KH	2.76 per 1000 KH	2.75 per 1000 KH	2.74 per 1000 KH	2.73per 1000 KH	2.72 per 1000 KH	2.72 per 1000 KH
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1.91 per 1000 KH	1.91 per 1000 KH	1.9 per 1000 KH	1.89 per 1000 KH	1.88 per 1000 KH	1.87 per 1000 KH	1.86 per 1000 KH	1.86 per 1000 KH
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	114.45 per 100.000 KH	114.45 per 100.000 KH	113.45 per 100.000 KH	112.45 per 100.000 KH	111.45 per 100.000 KH	110.45 per 100.000 KH	109.45 per 100.000 KH	109.45 per 100.000 KH
2.6	Rasio Posyandu per 1.000 balita	25	25	25	25	25	25	25	25
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	184,87 /100,000	185 /100,000	186 /100,000	187 /100,000	188 /100,000	189 /100,000	190 /100,000	190/100,000
2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2.10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94.70%	95%	97%	99%	100%	100%	100%	100%
2.11	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.13	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,55%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
2.14	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
2.17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93	90	90	90	90	90	90	90
2.18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100
2.19	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Angka kejadian Malaria	0,08/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil	< 1/mil
2.21	Tingkat kematian akibat malaria	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0
2.22	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,5	0,21	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2.23	Cakupan kunjungan bayi	116.76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92.10%	92.10%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
2.25	Cakupan pelayanan nifas	93.80%	93.80%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
2.26	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	74.20%	74.20%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2.27	Cakupan pelayanan anak balita	51.60%	67%	72%	77%	82%	85%	85%	85%
2.28	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.29	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99.9	99.9	100	100	100	100	100	100
2.30	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
3.1	Rasio rumah layak huni	98,60%	98,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Rasio permukiman layak huni	Data tidak tersedia	98,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	98,43%	98,43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
4.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61	39,61
4.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4.3	Persentase Penegakan PERDA	90%	95%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Sosial								
5.1	Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Data tidak tersedia	-	1 KUBE	2 KUBE	3 KUBE	4 KUBE	5 KUBE	15 KUBE
5.2	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	246	150	150	150	150	150	150	750 orang
5.3	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Data tidak tersedia	-	6	7	8	9	10	40 orang
5.4	Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Data tidak tersedia	4.391 orang	4.770 orang	5.149 orang	5.528 orang	5.907 orang	6.286 orang	6.286 orang

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
5.5	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	51 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1.500 orang
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30,80%	30,80%	31,00%	32,00%	33,00%	34,00%	35,00%	35,00%
1.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%	25%	25%	25%
1.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Rasio KDRT	0,02%	0,016%	0,016%	0,015%	0,015%	0,015%	0,014%	0,014%
1.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	54,05%	54,5%	55%	55,1%	55,5%	55,7%	56%	56%
1.8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	54,05%	54,5%	55%	55,1%	55,5%	55,7%	56%	56%
1.10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.11	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	99,75%	99,76%	99,77%	99,78%	99,80%	99,85%	99,90%	99,90%
1.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	84,48%	84,50%	84,75%	85,00%	85,25%	85,50%	85,75%	85,75%
1.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	80,15%	80,17%	80,19%	80,21%	80,23%	80,25%	80,27%	80,27%
1.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Data tidak tersedia	33,05%	33,35%	33,65%	33,95%	34,25%	34,55%	34,55%
1.16	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pangan								
2.1	Ketersediaan pangan utama	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Data tidak tersedia	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2	110,5/117,2
2.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	226 sample	0	450 sample	450 sample	550 sample	600 sample	600 sample	600 sample
3.	Pertanahan								
3.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Data tidak tersedia	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek
3.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Data tidak tersedia	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek	5 obyek
3.3	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data tidak tersedia	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
3.4	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data tidak tersedia	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang	25 bidang
4.	Lingkungan Hidup								
4.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air	14.90	15.00	18.88	18.91	18.95	18.99	19.025	19.025
4.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	29.80	29.80	36.77	36.82	36.86	36.91	36.952	36.952
4.3	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.60	24.60	5.90	5.91	5.91	5.91	5.917	5.917
4.4	Jumlah limbah B3 yang dikelola	80.451,25 kg	85.334 kg	87.685 kg	89.842 kg	92.122 kg	96.146 kg	98.137 kg	98.137 kg
4.5	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	1	1	0	0	0	0	0	1
4.6	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Data tidak tersedia	0	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa	10 desa
4.7	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Data tidak tersedia	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	105 lokasi	200 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi
4.9	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Data tidak tersedia	-	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan	100 perusahaan/kegiatan
4.10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	6 kasus	55 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	11 kasus
4.11	Timbulan sampah yang ditangani	57.143,52 ton	75.947,54 ton	75.219,01 ton	74.525,07 ton	73.865,09 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton	75.275,30 ton
4.12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,1118	0,26	0,27	0,28	0,3	0,32	0,32	0,32
4.13	Persentase cakupan area pelayanan	0,5	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	0,56
4.14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	66.85	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,72	0,72
4.15	Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air		4,50	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	4,00
5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98%	98%	98%	98,40%	98,6%	98,8%	99%	99%
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	0,99	0,99
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,65	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,70
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	99,34%	99,50%	99,52%	99,55%	99,60%	99,65%	99,70%	99,75%
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	98%	98%	98%	98,40%	98,6%	98,8%	99%	99%
5.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,98	0,98	0,98	0,984	0,986	0,988	0,99	0,99
5.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,96	0,90	0,968	0,97	0,976	0,978	0,98	0,98
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	68 TP PKK Kec., Kel., Desa	
6.4	Persentase LPM Berprestasi	1 kelompok	68 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	69 kelompok	
6.5	PKK aktif	606 kelompok	606 kelompok	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	69 TP PKK Kab., Kec., Kel., Desa	
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,25	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,10	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	34,21%	
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	34,21%	1	1	1	1	1	1	1	
7.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	
7.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	1	0	0	0	0	0	0	0	
7.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Data tidak tersedia	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,04	
7.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,07	79,74%	79,76%	79,80%	79,80%	79,80%	79,80%	79,80%	
7.9	Ratio Akseptor KB	79,74%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
7.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
7.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,03	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%	
7.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,13%	3,26%	3,25%	3,24%	3,24%	3,23%	3,22%	3,22%	
7.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,47%	3,26%	3,25%	3,24%	3,24%	3,23%	3,22%	3,22%	
7.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	3,47%	77%	77%	77%	77%	79%	79%	80%	
7.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76%	85%	87%	88%	90%	93%	95%	95%	
7.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	91,83%	97,52%	97,54%	97,55%	97,56%	97,57%	97,58%	97,58%	
7.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	97,52%	84,13%	84,15%	84,17%	84,19%	84,21%	84,23%	84,23%	
7.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,13%	84,13%	84,15%	84,17%	84,19%	84,21%	84,23%	84,23%	
7.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,13%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
7.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	90%	83,83%	83,85%	83,87%	83,89%	83,91%	89,93%	83,93%
7.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,83%	83,83%	83,85%	83,87%	83,89%	83,91%	89,93%	83,93%
7.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	47,91%	47,91%	47,92%	47,93%	47,94%	47,95%	47,95%
7.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	47,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	53%	54%	54%	54%	58%	60%	60%
7.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	51%	53%	54%	54%	54%	58%	60%	60%
7.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	51%	21	21	21	21	21	21	21
7.29	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	69%	61,70%	62%	62,50%	63%	63,50%	63,50%
8.	Perhubungan								
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	19.077	93.360
8.2	Rasio ijin trayek	0,727%	0,727%	0,727%	0,727%	0,727%	0,727%	0,727%	0,727%
8.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4444	4510	4620	4710	4800	4880	4950	28470
8.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	25,91	26,16	26,521	26,7	26,696	27,021	27,29	27,29
8.6	Pemasangan Rambu rambu	1600	1600	1630	1700	1800	1900	2000	2000
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,40	0,45	0,45	0,43	0,41	0,41	0,40	0,40
8.8	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	19.077	93.360
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	18.070	18.070	18.070	18.431	18.799	18.983	19.077	93.360
9.	Komunikasi dan Informatika								
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	15 Kelompok
10.	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah								
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	60,20%	51,20%	88%	88%	89%	89%	89%	89%
10.2	Persentase Usaha Mikro dan Keci	97,10%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%
11.	Penanaman Modal								
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4425	4425	-	-	-	-	-	-
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.905.119.222.129,00	10.905.119.222.129	11.450.375.183.235,40	12.022.893.942.397,20	12.624.038.639.517,10	13.255.240.571.492,90	13.918.002.600.067,60	13.918.002.600.067,60

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	6.87	6.87	7.87	8.66	9.53	10.49	11.54	11.54
11.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2.427.703.903.121,00	2.427.703.903.121,00	4.251.831.224.788,00	6.075.958.546.455	7.900.085.868.122	9.724.213.189.789	11.548.340.511.457	11.548.340.511.457
12.	Kepemudaan dan Olahraga								
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50,08	54,86	55,85	68,86	60,46	60,96	61,94	61,94
12.2	Persentase wirausaha muda	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
12.3	Cakupan pembinaan olahraga	Data tidak tersedia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Data tidak tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Cakupan pembinaan atlet muda	Data tidak tersedia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.6	Jumlah atlet berprestasi	Data tidak tersedia	0,00	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
12.7	Jumlah prestasi olahraga	Data tidak tersedia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Statistik								
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku
13.3	Buku "PDRB"	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku
13.4	Buku Kecamatan Dalam Angka	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	5 Buku
14.	Persandian								
14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Kebudayaan								
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Data tidak tersedia	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
15.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2 Karya Budaya	-	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	15 Karya Budaya
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	60 Cagar Budaya
Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pariwisata								
1.1	Kunjungan wisata	1071227		1071227	1076583	1081939	1087295	1092652	1098008
1.2	Lama Kunjungan wisata	2 hari		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pertanian								
2.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB								
	- Produksi Jagung	57,79	43,40	43,50	43,60	43,70	43,80	-	-
	- Produksi Kedelai	15,20	13,40	13,41	13,42	13,43	13,44	-	-
	- Produksi Kacang Tanah	13,98	13,00	13,01	13,02	13,03	13,05	-	-
	- Produksi Kacang Hijau	9,75	9,30	9,31	9,32	9,33	9,34	-	-
	- Produksi Ubi Kayu	206,02	190,05	190,07	190,08	190,10	190,15	-	-
	- Produksi Ubi Jalar	276,88	185,10	185,12	185,15	185,17	185,20	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-
	Produksi kakao	94,05	95,93	97,85	99,81	101,80	103,84	105,92	105,92
	Produksi kelapa	2.081,01	2.122,63	2.165,08	2.208,38	2.252,55	2.292,60	2343,56	2343,56
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	61,65	60,50	60,60	60,70	60,80	62,54	-	-
2.6	Cakupan bina kelompok petani	350	425	450	460	480	490	500	500
3.	Perdagangan								
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	62.492.817,35	57.260.445,10	57.760.445,20	58.260.445,35	58.760.445,35	59.260.445,35	59.760.445,10	59.760.445,10
4.	Kelautan dan Perikanan								
4.1	Konsumsi ikan	35,15	35,15	35,85	36,57	37,3	38,05	38,81	38,81
4.2	Cakupan bina kelompok nelayan	56	56	56	56	56	56	56	56
4.3	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.911,77	7.911,77	7.437	7.586	7.737	7.892	8.050	8.050
Penunjang Urusan									
1.	Perencanaan Pembangunan								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
2.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3,76 JP	8,34 JP	10,67 JP	13,00 JP	15,33 JP	17,66 JP	20 JP	20 JP
2.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3,85%	8,30%	11,64%	14,98%	18,32%	21,66%	25%	25%
2.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	80%	87,85%	90,28%	92,71%	95,14%	97,57%	100%	100%
2.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	37	37	37	37	37	37	37
2.5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	37	37	37	37	37	37	37
2.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2445	3448	3448	3145	3448	3145	2445	2445
3.	Penelitian dan Pengembangan								
3.1	Persentase implementasi rencana kelitbanan.	Data tidak tersedia	0,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
3.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbanan.	0,00	0,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
3.3	Penerapan SiDa:	Data tidak tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	57,90	63,20	65,80	68,40	71,10	73,70	76,30	76,30
3.5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Data tidak tersedia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
4.	Pengawasan								
4.1	Jumlah temuan BPK	20	20	20	20	19	18	18	95
5.	Sekretariat Dewan								
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	81,35	81,35	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50
5.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	81,35	81,35	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,50

Adapun Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (Enam) Bidang Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai tabel berikut :

TABEL 8.3										
Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)										
Kabupaten Badung Tahun 2021-2026										
NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Urusan Pendidikan									
11	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	5	100	100	100	100	100	100
12	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5	100	100	100	100	100	100
13	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	5	100	100	100	100	100	100
2	Urusan Kesehatan									
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.5	Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100
2.10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	5	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga Orang Terduga TBC	100	5	100	100	100	100	100	100
		tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan								
2.12	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan risiko Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immuno deficiency Virus) yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV)	100	5	100	100	100	100	100	100
		mendapatkan layanan kesehatan								
3	Urusan Pekerjaan Umum									
3.1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97,20	5	95,99	96,00	96,10	96,50	96,80	97,20
3.2	Penyediaan Layanan Pengolahan air Limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,20	5	97,04	97,40	97,75	97,85	98,20	98,20
4	Urusan Perumahan Rakyat									
4.1	Penyediaan dan Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	5	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Pelayanan Ketenteraman Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	5	100	100	100	100	100	100
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	5	100	100	100	100	100	100
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	5	100	100	100	100	100	100
5.4	Pelayanan Evakuasi Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	5	100	100	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Evakuasi Korban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	5	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan					
					Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Urusan Sosial									
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah Warga Negara penyandang	100	5	100	100	100	100	100	100
	Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti								
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan pada saat tanggap dan bencana bagi korban Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang perlindungan dan jaminan sosial	100	5	100	100	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini akan berakhir masa berlakunya pada Tahun 2026, sedangkan disisi lain pada tahun yang sama Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan sedang menyusun RPJMD Kabupaten Badung periode jangka menengah berikutnya, sebagai payung hukum penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2027.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan tahunan daerah sebelum RPJMD Kabupaten Badung periode jangka menengah berikutnya ditetapkan secara definitif, maka Rancangan RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2027 yang disusun pada Tahun 2026 oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Badung. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD masa transisi tersebut antara lain bertujuan untuk menyelesaikan target-target dan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang belum tertangani seluruhnya sampai dengan akhir periode RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, serta permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi pada tahun pertama masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru.

RKPD masa transisi tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2027 yang telah disusun untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah yang lebih baik.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau norma yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran dan Program

Pembangunan Daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan para pemangku kepentingan agar sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- 2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- 3) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 agar dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD Kabupaten Badung yang memuat antara lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah selama satu tahun kedepannya beserta pagu indikatifnya;
- 4) Penyusunan RKPD Kabupaten Badung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- 5) RKPD Kabupaten Badung harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-PD) yang memuat antara lain kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan PD sesuai dengan tugas dan fungsinya selama satu tahun kedepannya beserta pagu indikatifnya;
- 6) Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD;
- 7) Dalam rangka mewujudkan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah, RKPD Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- 8) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2021-2026, setiap PD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
- 9) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tersebut sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah;

- b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 10) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Kabupaten Badung yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung, berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. Hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.



[Handwritten signature]

Tabel 1.A
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan Nasional

No.	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kab. Badung Tahun 2021-2026					
	Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Target					Indikator Pembangunan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,00	6,50	6,60	6,60	6,70	Pertumbuhan Ekonomi	-	2,3-3,5	5,9	7,25	-	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	-	2,50-3,00	3,00-4,50	4,50-5,50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	3,52	3,33	3,05	2,75	2,45	Persentase Kemiskinan	-	3,50-4,00	3,00-3,50	2,50-3,00	-	Tingkat Kemiskinan (%)	-	-	2,00	1,95	1,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,50	1,30	1,30	1,20	1,00	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	5,63	1,23	0,91	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	-	1,20-3,00	1,00-2,00	0,90-1,50
4	Rasio Gini	-	-	-	-	0,360-0,474	Rasio Gini	-	0,369	0,3570	0,3450	-	Rasio Gini	-	-	0,301	0,300	0,299
5	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-	-	27,3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	-	-	-	-	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-	-	-
6	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	-	-	74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	75,51	76,93	77,78	-	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	81,60	81,61	81,63

Tabel 2.A
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Program Prioritas Nasional

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1.	PN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas							Data Tidak tersedia														
a	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5								-	-	-	-	-	-	-	
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,0	68,0	68,8	69,2	70,3								-	-	-	-	-	-	-	
b	PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4															
c	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2								Bidang Urusan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase pemanfaatan lumbung pangan	-	-	0%	100%	100%	

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang urusan pangan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	-	-	100%	100%	100%
																Bidang urusan program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pengawasan keamanan pangan	-	-	0%	100%	100%
																Urusan Kelautan dan Perikanan						
																Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	-	-	7437 TON	7986 TON	8146 TON
																Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	-	637 Ton	650 Ton	663 Ton

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	6.610 Ton	6.742 Ton	6.877 Ton
																Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0														
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0														
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/ PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5								Bidang Urusan Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Pemetaan Desa Rawan Pangan	-	-	0%	0%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0														
d	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9														
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80														
e	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0								Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembang an UMKM	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5								Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	-	-	100%	100%	100%
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5								Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Meningkatnya SDM Koperasi dan Pemahaman Terhadap Perkoperasian	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pesentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	-	100%	100%	100%
f	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1								Bidang Urusan Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesakitan Ternak Atau Hewan	-	-	5%	5%	5%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Pengendalian Dan Penanggulan Bencana Pertanian	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pemberdayaan Peranan Penyuluh Pertanian	-	-	100%	100%	100%
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8														
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1								Bidang Urusan Perindustrian Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Yang Produknya Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	20%	20%	20%
																Bidang Urusan Perindustrian Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM Yang Mempunyai Legalitas Usaha	-	-	100%	100%	100%
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5														
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189 - 1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4								Bidang Urusan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanaman Modal Yang Mematuhi Ketentuan	-	-	100%	100%	100%
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0								Bidang Urusan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	-	-	26%	27%	28%
																Bidang Urusan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas Dan Kuantitas Informasi Data	-	-	100%	100%	100%
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5														
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7														
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0														
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0								Urusan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	-	20%	20%	20%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata Dan Sektor Lainnya	-	-	2,50%	5%	7,50%
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0														
g	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2														
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0								Bidang Urusan Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	-	-	30%	40%	50%
																Bidang Urusan Pariwisata Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW Yang Ditata	-	-	72%	74,35%	76,92%
h	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4														
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0														
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.	PN	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan																				
	PP	Pengembangan Wilayah Jawa- Bali	IPM Wilayah Jawa-Bali (min- maks)					74.60 - 84.23								Bidang Urusan Pendidikan, Program Pengelola Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD dan SMP	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan strandar	-	-	100%	100%	100%
																	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Pendukung, Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
			Laju pertumbuhan PDRB Jawa- Bali (persen/tahun)					6.27														
			Persentase penduduk miskin wilayah Jawa-Bali (persen)					2,45								Bidang Urusan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam sosial (PMKS)pelaya nan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-	-	100%	100%	100%
			Share PDRB Wilayah Jawa- Bali (persen)					59.81														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.	PN	Meningkatkan Sdm Berkualitas Dan Berdaya Saing														Bidang Urusan Perindustrian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%
																Bidang Urusan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	21,03%	21,03%	21,03%
a	PP	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98								Bidang Urusan Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	100%	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1								Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			98%	98%	98%
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80								Bidang Urusan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%	100%
b	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98								Bidang Urusan Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-	-	100%	100%	100%
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80								Bidang Urusan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
c	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KH	-	-	113.45 per 100.000 KH	112.45 per 100.000 KH	111.45 per 100.000 KH
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	-	-	2.27 per 1000 KH	2.25 per 1000 KH	2.23 per 1000 KH
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	-	1.9 per 1000 KH	1.89 per 1000 KH	1.88 per 1000 KH
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4								Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	-	-	79,76%	79,79%	79,80%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4								Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	-	-	3,25%	3,24%	3,24%
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0								Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	-	-	0,15	0,14	0,13
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	-	-	6.05	6.00	5.95
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	-	-	3.22	3.21	3.2

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	-	-	0,19	0,18	0,18
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	231,0	190,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	-	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0								Urusan Kesehatan/ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak ada target, karena Kab. Badung bukan merupakan daerah endemis					
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Insidensi hepatitis B (persen)	-	-	1,39	1,24	1,09

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	-	-	8,7	8,7	8,7
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	-	-	21,8	21,8	21,8
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai Standar			13 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,0	70,0	80,0	90,0	100,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	-	-	13 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0								Urusan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	-	-	8 Rumah Sakit	8 Rumah Sakit	9 Rumah Sakit
d	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2								Bidang Urusan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	-	-	100%	100%	100%
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51														
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16														
e	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49														
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun														
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,2779428	91,2789623	91,3346958	91,3862702														
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,2448102	73,5005004	73,7405192	73,9659203	74,1774755														
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55														
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67														
f	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40								Bidang Urusan Sosial Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Sosial Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6				50								Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Sosial Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000				7.750.000														
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087														
g	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1														
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University																			
			a. Top 200	0	0	0	0	1														
			b. Top 300	1	1	1	1	2														
			c. Top 500	2	2	2	2	3														
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0														
4.	PN	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan																				

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
a	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	Indeks Capaian Revolusi Mental					74.3								Bidang Urusan Kepegawaian, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Kepegawaian, Program Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembang an Sumber Daya Manusia	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Pemerintahan Umum, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
b	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Indeks Pembangunan Kebudayaan					62.7								Unsur Kewilayahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Kebudayaan, Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara Adat	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	-	-	36%	36%	36%
																Bidang Urusan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah	Persentase Penduduk yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah	-	-	50%	75%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Kebudayaan, Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi	-	-	10 unit	10 unit	10 unit
																	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	-	-	3 unit	3 unit	3 unit
																Bidang Urusan Kebudayaan, Program Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraa n dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	-	-	1unit	1unit	1unit
																Bidang Urusan Kearsipan, Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	-	-	15 Orang	30 Orang	30 Orang
																Bidang Urusan Kearsipan, Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	-	-	26%	28%	30%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Kearsipan, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang diselamatkan dan di Lestarkan	-	-	0,16%	25%	25%
																Bidang Urusan Kearsipan, Progran Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	-	-	-	25%	25%
																Unsur Kewilayahan, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	-	-	100%	100%	100%
																Unsur kewilayahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan di Kecamatan Abiansemal	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur kewilayahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	-	-	100%	100%	100%
																Unsur kewilayahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Petang	-	-	100%	100%	100%
			Indeks Budaya Literasi													-	-	-	-	-	-	-
c	PP	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama					75.8								Unsur pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	-	-	100%	100%	100%
d	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan , Dan Berkarakter														Bidang Urusan Perpustakaan, Program Pembinaan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	8,13	8,85	9,57

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
5.	PN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar																				
a	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95								Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	-	-	100%	100%	100%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87								-	-	-	-	-	-	-
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60								-	-	-	-	-	-	-
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00								-	-	-	-	-	-	-

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)								Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	-	-	97,04%	97,40%	97,75%
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0								-	-	-	-	-	-	-
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan ; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan ; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan ; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan ; 14.57% pengurangan	80% penanganan ; 20% pengurangan								Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	-	-	73,00%	74,00%	75,00%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)								Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	-	-	96,00%	96,10%	96,50%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15								-	-	-	-	-	-	-
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52, 50189621	55, 18146289	57, 05999842	58, 10498273	58, 49863205								-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1								-	-	-	-	-	-	-
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229, 16667	115942, 7083	116142, 7083	116342, 7083	116342, 7083								Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	-	-	96,25%	96,55%	97,25%
																Bidang Urusan Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	-	-	60%	67%	70%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20								-	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325								-	-	-	-	-	-	-
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65								Bidang Urusan Perhubungan, Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terwujudnya penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) (persen)	-	-	100%	100%	100%
b	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)					2500 km								-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)					7 pelabuhan								-	-	-	-	-	-	-

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)					0.9								-	-	-	-	-	-	-
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)					7.635 km								-	-	-	-	-	-	-
c	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)					6 kota								-	-	-	-	-	-	-
d	PP	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100								-	-	-	-	-	-	-
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408								-	-	-	-	-	-	-
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07								-	-	-	-	-	-	-

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
e	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8								Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Program Aplikasi Informatika	Prosentase Penerapan teknologi di Kabupaten Badung	-	-	20%	40%	60%
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3								Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Program Informasi dan Komunikasi publik	Prosentase layanan masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-	-	20%	40%	60%
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100								Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Program Aplikasi Informatika	Prosentase Penerapan teknologi di Kabupaten Badung	-	-		100%	

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7								-	-	-	-	-	-	-
6.	PN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim																				
a	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50								Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50								Bidang Urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	100%	100%	100%
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50								-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50								Bidang urusan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	-	0%	100%	100%
b	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15														
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0								Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	-	-	100%	100%	100%
c	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4														

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,0	2,3	2,5	2,6	2,9														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7,0	7,3														
7.	PN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik																				
a	PP	Konsolidasi Demokrasi	0,29375																			
			Indeks Demokrasi Indonesia					78.37*								-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Kerawanan Pemilu					39								-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)					50.000								-	-	-	-	-	-	-

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)					72								Bidang Urusan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	-	-	100%	100%	100%
b	PP	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia Internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67								-	-	-	-	-	-	-
c	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73								-	-	-	-	-	-	-
d	PP	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/L embaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85								-	-	-	-	-	-	-

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85								-	-	-	-	-	-	-
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Ko ta) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70								Unsur Perencanaan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Perencanaan, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Antara Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Kegiatan Yang Bersfat Consulting (konsultasi)	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Sekretariat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Dengan Nilai PPMRB Baik	-	-	47%	60%	70%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Kuta Selatan	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	-	-	97%	98%	99%
																Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	42%	50%	58%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Usur Kewilayahan, Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023							RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026						
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Kewilayahan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dibina dan Diberdayakan	-	-	100%	100%	100%
																Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Penataan Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Abiansemal	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Abiansemal	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Mengwi	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahanu mum di Kecamatan Petang	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Kewilayahan, Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Petang	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Sekretariat Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mencapai level 4	-	-	3	2	2
e	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20								-	-	-	-	-	-	-
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24								-	-	-	-	-	-	-
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%								-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4								Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	90%	90%	90%
																Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Abiansemal	-	-	100%	100%	100%
																Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi	-	-	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023						RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026							
	Kode (PN / PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
																Unsur Kewilayahan, Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Petang	-	-	100%	100%	100%